

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan menurut Wikipedia adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Pendidikan dilihat dari perspektif teoritik, seringkali diartikan dan dimaknai oleh seseorang secara beragam, bergantung pada sudut pandang masing-masing atau teori yang dianutnya. Terjadinya perbedaan penafsiran pendidikan dalam konteks akademik merupakan sesuatu yang lumrah, bahkan dapat semakin memperkaya khazanah berfikir manusia dan bermanfaat untuk pengembangan teori itu sendiri. Tetapi untuk kepentingan kebijakan nasional, seyogyanya pendidikan dapat dirumuskan secara jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terkait dengan pendidikan, sehingga setiap orang dapat mengimplementasi kan secara tepat dan benar dalam setiap praktik pendidikan.

Sebuah hak atas pendidikan telah diakui oleh beberapa negara. Pada tingkat global, Pasal 13 PBB 1966 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Meskipun pendidikan adalah wajib di sebagian besar tempat sampai usia tertentu, bentuk pendidikan dengan hadir di sekolah sering tidak dilakukan, dan sebagian kecil orang tua memilih untuk pendidikan *home-schooling*, *e-learning* atau yang serupa untuk anak-anak mereka.

Pendidikan biasanya berawal saat seorang bayi itu dilahirkan dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan bisa saja berawal dari sebelum bayi lahir seperti yang dilakukan oleh banyak orang dengan memainkan musik dan membaca kepada bayi dalam kandungan dengan harapan ia bisa mengajar bayi mereka sebelum kelahiran. Bagi sebagian orang, pengalaman kehidupan sehari-hari lebih berarti dari pada pendidikan formal. Seperti kata Mark Twain, "Saya tidak pernah membiarkan sekolah mengganggu pendidikan saya." Anggota keluarga mempunyai peran pengajaran yang amat mendalam, sering kali lebih mendalam dari yang disadari mereka, walaupun pengajaran

anggota keluarga berjalan secara tidak resmi. Menurut David Popenoe, ada empat macam fungsi pendidikan yakni sebagai berikut: 1) Fungsi transmisi (pemindahan) kebudayaan. 2) Fungsi memilih dan mengajarkan peranan sosial. 3) Fungsi menjamin integrasi sosial. 4) Fungsi sekolah mengajarkan corak kepribadian. (baca: inovasi sosial).

Secara umum pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelektual dan tubuh anak); dalam Taman Siswa tidak boleh dipisahkan bagian-bagian itu agar supaya kita memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan, kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik, selaras dengan dunianya (Ki Hajar Dewantara, 1977:14)

Telah dikemukakan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi sangat penting bagi negara-negara untuk dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Analisis empiris cenderung mendukung prediksi teoritis bahwa negara-negara miskin harus tumbuh lebih cepat dari negara-negara kaya karena mereka dapat mengadopsi teknologi yang sudah dicoba dan diuji oleh negara-negara kaya. Namun, transfer teknologi memerlukan manajer berpendidikan dan insinyur yang mampu mengoperasikan mesin-mesin baru atau praktik produksi yang dipinjam dari pemimpin dalam rangka untuk menutup kesenjangan melalui peniruan. Oleh karena itu, kemampuan suatu negara untuk belajar dari pemimpin adalah fungsi dari efek "human capital". Studi terbaru dari faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi agregat telah menekankan pentingnya lembaga ekonomi fundamental dan peran keterampilan kognitif.

Pada tingkat individu, ada banyak literatur, umumnya terkait dengan karya Jacob Mincer, tentang bagaimana laba berkaitan dengan pendidikan dan modal manusia lainnya. Karya ini telah memotivasi sejumlah besar studi, tetapi juga kontroversial. Kontroversi utama berkisar bagaimana menafsirkan dampak sekolah. Beberapa siswa yang telah menunjukkan potensi yang tinggi untuk belajar, dengan menguji dengan intelligence quotient yang tinggi, mungkin tidak mencapai potensi penuh akademis mereka, karena kesulitan keuangan.

Ekonom Samuel Bowles dan Herbert Gintis berpendapat pada tahun 1976 bahwa ada konflik mendasar dalam pendidikan Amerika antara tujuan egaliter partisipasi demokratis dan ketidaksetaraan tersirat oleh profitabilitas terus dari produksi kapitalis di sisi lain.

## Daftar Pustaka

- Daron Acemoglu, Simon Johnson, and James A. Robinson (2001). "The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation". *American Economic Review* 91 (5): 1369–1401. doi:10.2139/ssrn.244582. JSTOR 2677930.
- David Card, "Causal effect of education on earnings," in *Handbook of labor economics*, Orley Ashenfelter and David Card (Eds). Amsterdam: North-Holland, 1999: pp. 1801–1863.
- Dewey, John (1916/1944). *Democracy and Education*. The Free Press. hlm. 1–4. ISBN 0-684-83631-9.
- Ensiklopedia bebas dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/ Pendidikan](https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan))
- Eric A. Hanushek (2005). *Economic outcomes and school quality*. International Institute for Educational Planning. ISBN 978-92-803-1279-9. Diakses 21 October 2011.
- Eric A. Hanushek and Ludger Woessmann (2008). "The role of cognitive skills in economic development". *Journal of Economic Literature* 46 (3): 607–608. doi:10.1257/jel.46.3.607.
- Jacob Mincer (1970). "The distribution of labor incomes: a survey with special reference to the human capital approach". *Journal of Economic Literature* 8 (1): 1–26. JSTOR 2720384.
- James J. Heckman, Lance J. Lochner, and Petra E. Todd., "Earnings functions, rates of return and treatment effects: The Mincer equation and beyond," in *Handbook of the Economics of Education*, Eric A. Hanushek and Finis Welch (Eds). Amsterdam: North Holland, 2006: pp. 307–458.
- Samuel Bowles; Herbert Gintis (18 October 2011). *Schooling In Capitalist America: Educational Reform and the Contradictions of Economic Life*. Haymarket Books. ISBN 978-1-60846-131-8. Diakses 21 October 2011.

## BAB II

### PENDIDIKAN ILMU SOSEKBUD

#### A. Konsep Dasar Pendidikan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengertian pendidikan dalam perspektif Islam akan dikemukakan pengertian pendidikan ditinjau dari segi bahasa dan istilah. Kata “pendidikan” dalam bahasa Arab berkaitan atau dekat dengan tiga terma, yaitu *ta’lîm*, *tarbiyah* atau *ta’dîb*.

Memahami makna dari masing-masing tema di atas, dapat dikemukakan bahwa; *ta’lîm* lebih menonjolkan pada aspek pengetahuan kognitif, *tarbiyah* lebih menekankan pada pemeliharaan dan asuhan dengan kasih sayang, sedang *ta’dîb* mencakup pengetahuan kognitif, afektif dan psikomotorik. Dengan demikian secara konseptual *ta’dîb* sudah mencakup pengetahuan (*’ilm*), pengajaran (*ta’lîm*) dan pengasuhan yang baik (*tarbiyah*) (Syed Muhammad al-Naqib al-Attas, 1990). Oleh karena itu, *ta’dîb* merupakan istilah yang tepat untuk menunjukkan pendidikan dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ayat al-Qur’ân maupun Hadîts, di antaranya adalah Q.S. *al-Baqarah*/2: 31, *al-’Alaq*/96: 4 - 5; *al-Isrâ’*/17: 24 dan *al-Syua’râ’*/26: 18. (Santoso dkk. 2005).

1. Q.S Al Baqarah /2: 31

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ  
أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

*Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: “Sebutkanlah kepada-Ku nama-nama benda itu, jika kamu memang orang-orang yang benar!”*

2. Q.S Al ‘alaq/96: 4-5

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

*Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.*

3. Q.S Al Isra'/17: 24

وَإخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا  
رَبَّبَانِي صَغِيرًا

*Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil"*

4. Q.S Al Syu'ara'/26: 18

قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ

*Fir'aun menjawab: "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara (keluarga) kami, waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu"*

Pendidikan dalam perspektif umum dikemukakan oleh para ahli atau pakar pendidikan, antara lain:

1. Syed Muhammad al-Naquib al-Attas, menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu proses penanaman sesuatu ke dalam diri manusia.
2. Omar Muhammad al-Touny al-Syaebany, menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha membimbing, mengarahkan potensi hidup manusia yang berupa kemampuan-kemampuan dasar dan kemampuan belajar, sehingga terjadilah perubahan di dalam kehidupan pribadinya sebagai makhluk individual dan sosial, serta hubungannya dengan alam sekitar ia hidup.
3. Ahmad D. Marimba, menyatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.
4. Hasil rumusan Kongres se-Dunia ke 2 pada tahun 1980 tentang Pendidikan Islam menetapkan bahwa pendidikan adalah usaha mengembangkan seluruh aspek kehidupan manusia, baik spiritual, intelektual, imajinasi (fantasi), jasmaniah, ilmiah, linguistik, baik

secara individual maupun kolektif, serta mendorong aspek-aspek itu ke arah kebaikan dan ke arah pencapaian kesempurnaan hidup. (M. Arifin, 1987).

5. Langeveld, menjelaskan pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh itu datang dari orang dewasa (atau yang diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari, dan sebagainya) dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa.
6. John Dewey, menjelaskan pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional kearah alam dan sesama manusia.
7. J.J. Rousseau, mengartikan pendidikan adalah memberi kita perbekalan yang ada pada masa kanak-kanak sampai remaja yang nantinya akan dibutuhkan pada saat kita dewasa nanti.
8. Carter V.Good, mendefinisikan pendidikan adalah suatuseni, praktik, atau profesi pengajar. Atau Ilmu yang sistematis atau pengajaran yang berhubungan dengan prinsip dan metode-metode mengajar, pengawasan dan bimbingan murid; dalam arti luas digantikan dengan istilah pendidikan.
9. Ki Hajar Dewantara, berpendapat bahwa pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. (Sumber: dikutip dari Wikipedia.com)

Sedangkan pendidikan menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Berdasarkan definisi pendidikan Sisdiknas tersebut, ditemukan 3 (tiga) pokok pikiran utama yang terkandung di dalamnya, yaitu: (1)

usaha sadar dan terencana; (2) mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya; dan (3) memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Di bawah ini akan dipaparkan secara singkat ketiga pokok pikiran tersebut.

#### 1) Sadar dan Terencana.

Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana menunjukkan bahwa pendidikan adalah sebuah proses yang disengaja dan dipikirkan secara matang (proses kerja intelektual). Oleh karena itu, di setiap level manapun, kegiatan pendidikan harus disadari dan direncanakan, baik dalam tataran nasional (makroskopik), regional/provinsi dan kabupaten kota (mesoskopik), institusional/sekolah (mikroskopik) mau-pun operasional (proses pembelajaran oleh guru).

Berkenaan dengan pembelajaran (pendidikan dalam arti terbatas), pada dasarnya setiap kegiatan pembelajaran pun harus direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diisyaratkan dalam Permendiknas RI No. 41 Tahun 2007. Menurut Permediknas ini bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.

#### 2) Mewujudkan Suasana Belajar dan Proses Pembelajaran

Pada pokok pikiran yang kedua ini saya melihat adanya *pengerucutan* istilah pendidikan menjadi pembelajaran. Jika dilihat secara sepintas mungkin seolah-olah pendidikan lebih dimaknai dalam setting pendidikan formal semata (persekolahan). Terlepas dari benar-tidaknya pengerucutan makna ini, pada pokok pikiran kedua ini, saya menangkap pesan bahwa pendidikan yang dikehendaki adalah pendidikan yang bercorak pengembangan (*developmental*) dan humanis, yaitu berusaha mengembangkan segenap potensi didik, bukan bercorak pembentukan yang bergaya

behavioristik. Selain itu, saya juga melihat ada dua kegiatan (operasi) utama dalam pendidikan: (a) mewujudkan suasana belajar, (b) mewujudkan proses pembelajaran.

Mewujudkan suasana belajar. Berbicara tentang mewujudkan suasana pembelajaran, tidak dapat dilepaskan dari upaya menciptakan lingkungan belajar, diantaranya mencakup: (a) lingkungan fisik, seperti: bangunan sekolah, ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang BK, taman sekolah dan lingkungan fisik lainnya; dan (b) lingkungan sosio-psikologis (iklim dan budaya belajar/akademik), seperti: komitmen, kerja sama, ekspektasi prestasi, kreativitas, toleransi, kenyamanan, kebahagiaan dan aspek-aspek sosio-emosional lainnya, yang memungkinkan peserta didik untuk melakukan aktivitas belajar. Baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosio-psikologis, keduanya didesain agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan segenap potensinya. Dalam konteks pembelajaran yang dilakukan guru, di sini tampak jelas bahwa keterampilan guru dalam mengelola kelas (*classroom management*) menjadi amat penting. Dan di sini pula, tampak bahwa peran guru lebih diutamakan sebagai fasilitator belajar siswa.

Mewujudkan proses pembelajaran. Upaya mewujudkan suasana pembelajaran lebih ditekankan untuk menciptakan kondisi dan pra kondisi agar siswa belajar, sedangkan proses pembelajaran lebih mengutamakan pada upaya bagaimana mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau kompetensi siswa. Dalam konteks pembelajaran yang dilakukan guru, maka guru dituntut untuk dapat mengelola pembelajaran (*learning management*), yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran (lihat Permendiknas RI No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses). Di sini, guru lebih berperan sebagai agen pembelajaran (Lihat penjelasan PP 19 tahun 2005), tetapi dalam hal ini saya lebih suka menggunakan istilah *manajer pembelajaran*, dimana guru bertindak sebagai seorang *planner*, *organizer* dan *evaluator* pembelajaran).

Sama seperti dalam mewujudkan suasana pembelajaran, proses pembelajaran pun seyogyanya didesain agar peserta didik

dapat secara aktif mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya, dengan mengedepankan pembelajaran yang berpusat pada siswa (*student-centered*) dalam bingkai model dan strategi pembelajaran aktif (*active learning*), ditopang oleh peran guru sebagai fasilitator.

### 3) Kekuatan Spiritual Keagamaan, Pengendalian Diri

Pokok pikiran yang ketiga ini, selain merupakan bagian dari definisi pendidikan sekaligus menggambarkan pula tujuan pendidikan nasional kita, yang menurut hemat saya sudah demikian lengkap. Di sana tertera tujuan yang berdimensi ke-Tuhan-an, pribadi, dan sosial. Artinya, pendidikan yang dikehendaki bukanlah pendidikan sekuler, bukan pendidikan individualistik, dan bukan pula pendidikan sosialistik, tetapi pendidikan yang mencari keseimbangan diantara ketiga dimensi tersebut.

Jika belakangan ini gencar disosialisasikan pendidikan karakter, dengan melihat pokok pikiran ketiga dari definisi pendidikan ini maka sesungguhnya pendidikan karakter sudah implisit dalam pendidikan, jadi pendidikan karakter sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru.

Selanjutnya tujuan-tujuan tersebut dijabarkan ke dalam tujuan-tujuan pendidikan di bawahnya (tujuan level meso dan mikro) dan dioperasionalkan melalui tujuan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Ketercapaian tujuan-tujuan pada tataran operasional memiliki arti yang strategis bagi pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Berdasarkan uraian di atas, kita melihat bahwa dalam definisi pendidikan yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003, tampaknya tidak hanya sekedar menggambarkan apa pendidikan itu, tetapi memiliki makna dan implikasi yang luas tentang siapa sesungguhnya pendidik itu, siapa peserta didik (siswa) itu, bagaimana seharusnya mendidik, dan apa yang ingin dicapai oleh pendidikan.

## **B. Konsep Dasar Pendidikan Ilmu Sosial**

Pengertian ilmu sosial menurut para ahli, diantaranya sebagai berikut ini:

1. Menurut, Achmad Sanusi, ilmu sosial terdiri disiplin-disiplin ilmu pengetahuan sosial yang bertaraf akademis & biasanya dipelajari pada tingkat perguruan tinggi, makin lanjut makin ilmiah.
2. Menurut, Peter Herman, ilmu sosial adalah sesuatu yang dipahami sebagai suatu perbedaan namun tetap merupakan sebagai satu kesatuan
3. Dan menurut, Gross, ilmu sosial merupakan disiplin intelektual yang mempelajari manusia sebagai makhluk sosial secara ilmiah, memusatkan pada manusia sebagai anggota masyarakat & pada kelompok atau masyarakat yang ia bentuk
4. Dalam catatan Wikipedia ilmu social adalah ilmu sosial (bahasa Inggris: *social science*) atau ilmu pengetahuan sosial (Inggris: *social studies*) adalah sekelompok disiplin akademis yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Ilmu ini berbeda dengan seni dan humaniora karena menekankan penggunaan metode ilmiah dalam mempelajari manusia, termasuk metoda kuantitatif, dan kualitatif. Istilah ini juga termasuk menggambarkan penelitian dengan cakupan yang luas dalam berbagai lapangan meliputi perilaku, dan interaksi manusia pada masa kini, dan masa lalu. Berbeda dengan ilmu sosial secara umum, IPS tidak memusatkan diri pada satu topik secara mendalam melainkan memberikan tinjauan yang luas terhadap masyarakat.
5. Ilmu sosial, dalam mempelajari aspek-aspek masyarakat secara subjektif, inter-subjektif, dan objektif atau struktural, sebelumnya dianggap kurang ilmiah bila dibanding dengan ilmu alam. Namun sekarang, beberapa bagian dari ilmu sosial telah banyak menggunakan metoda kuantitatif. Demikian pula, pendekatan interdisiplin, dan lintas-disiplin dalam penelitian sosial terhadap perilaku manusia serta faktor sosial, dan lingkungan yang mempengaruhinya telah membuat banyak peneliti ilmu alam tertarik pada beberapa aspek dalam metodologi ilmu social. Vessuri, Hebe. (2000)
6. metoda kuantitatif, dan kualitatif telah makin banyak diintegrasikan dalam studi tentang tindakan manusia serta implikasi, dan konsekuensinya.
7. Karena sifatnya yang berupa penyederhanaan dari ilmu-ilmu sosial, di Indonesia IPS dijadikan sebagai mata pelajaran untuk siswa sekolah

dasar (SD), dan sekolah menengah tingkat pertama (SMP/SLTP). Sedangkan untuk tingkat di atasnya, mulai dari sekolah menengah tingkat atas (SMA) dan perguruan tinggi, ilmu sosial dipelajari berdasarkan cabang-cabang dalam ilmu tersebut khususnya jurusan atau fakultas yang memfokuskan diri dalam mempelajari hal tersebut.

Dalam bidang pengetahuan sosial, ada banyak istilah. Istilah tersebut meliputi: Ilmu Sosial (*Social Sciences*), Studi Sosial (*Social Studies*) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

#### 1. Ilmu Sosial (*Social Science*)

Achmad Sanusi memberikan batasan tentang Ilmu Sosial (Saidihardjo, 1996) adalah sebagai berikut: “Ilmu Sosial terdiri disiplin-disiplin ilmu pengetahuan sosial yang bertaraf akademis dan biasanya dipelajari pada tingkat perguruan tinggi, makin lanjut makin ilmiah”.

Menurut Gross (Kosasih Djahiri, 1981), Ilmu Sosial merupakan disiplin intelektual yang mempelajari manusia sebagai makhluk sosial secara ilmiah, memusatkan pada manusia sebagai anggota masyarakat dan pada kelompok atau masyarakat yang ia bentuk.

Nursid Sumaatmadja, menyatakan bahwa Ilmu Sosial adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia baik secara perorangan maupun tingkah laku kelompok. Oleh karena itu Ilmu Sosial adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat.

#### 2. Studi Sosial (*Social Studies*).

Berbeda dengan Ilmu Sosial, Studi Sosial bukan merupakan suatu bidang keilmuan atau disiplin akademis, melainkan lebih merupakan suatu bidang pengkajian tentang gejala dan masalah social. Tentang Studi Sosial ini, Achmad Sanusi (1971:18) memberi penjelasan sebagai berikut: Sudi Sosial tidak selalu bertaraf akademis-universitas, bahkan merupakan bahan-bahan pelajaran bagi siswa sejak pendidikan dasar dan dapat berfungsi sebagai pengantar bagi lanjutan ke disiplin-disiplin ilmu sosial.

#### 3. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Pada dasarnya Mulyono (1980) memberi batasan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) adalah merupakan suatu pendekatan inter-disipliner (*Inter-disciplinary Approach*) dari pelajaran Ilmu-ilmu Sosial.

IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang Ilmu-ilmu Sosial, seperti sosiologi, antropologi budaya, psikologi sosial, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik, dan sebagainya. Hal ini lebih ditegaskan lagi oleh Saidiharjo (1996: 4) bahwa IPS merupakan hasil kombinasi atau hasil perpaduan dari sejumlah mata pelajaran seperti: geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, antropologi, politik.

Tekanan yang dipelajari IPS berkenaan dengan gejala dan masalah kehidupan masyarakat bukan pada teori dan keilmuannya, melainkan pada kenyataan kehidupan kemasyarakatan. Dari kerangka dan masalah sosial, ditelaah, dianalisis faktor-faktornya, sehingga dapat dirumuskan jalan pemecahannya.

Berdasarkan kerangka tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa IPS adalah bidang studi yang mempelajari, menelaah, menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan.

Latar belakang dimasukkannya bidang studi IPS ke dalam kurikulum sekolah di Indonesia karena pertumbuhan IPS di Indonesia tidak terlepas dari situasi kacau, termasuk dalam bidang pendidikan, sebagai akibat pemberontakan G30S/PKI, yang akhirnya dapat ditumpas oleh Pemerintahan Orde Baru. Setelah keadaan tenang pemerintah melancarkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Pada masa Repelita I (1969-1974) Tim Peneliti Nasional di bidang pendidikan menemukan lima masalah nasional dalam bidang pendidikan. Kelima masalah tersebut yaitu: a) Kuantitas, berkenaan dengan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar. b) Kualitas, menyangkut peningkatan mutu lulusan. c) Relevansi, berkaitan dengan kesesuaian sistem pendidikan dengan kebutuhan pembangunan. d) Efektifitas sistem pendidikan, efisiensi penggunaan sumber daya dan dana. e) Pembinaan generasi muda dalam rangka menyiapkan tenaga produktif bagi kepentingan pembangunan nasional

#### 4. Landasan Pendidikan Ilmu Sosial

Pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan yang sekaligus membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Hewan juga “belajar” tetapi lebih ditentukan oleh instinknya, sedangkan manusia belajar berarti merupakan rangkaian kegiatan menuju pendewasaan guna menuju kehidupan yang lebih berarti. Anak-anak

menerima pendidikan dari orang tuanya dan manakala anak-anak ini sudah dewasa dan berkeluarga mereka akan mendidik anak-anaknya, begitu juga di sekolah dan perguruan tinggi, para siswa dan mahasiswa diajar oleh guru dan dosen.

Pandangan klasik tentang pendidikan, pada umumnya dikatakan sebagai pranata yang dapat menjalankan tiga fungsi sekaligus. Pertama, mempersiapkan generasi muda untuk memegang peranan-peranan tertentu pada masa mendatang. Kedua, mentransfer pengetahuan, sesuai dengan peranan yang diharapkan. Ketiga, men-transfer nilai-nilai dalam rangka memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat sebagai prasyarat bagi kelangsungan hidup masyarakat dan peradaban. Butir kedua dan ketiga di atas memberikan pengertian bahwa pendidikan bukan hanya *transfer of knowledge* tetapi juga *transfer of value*. Dengan demikian pendidikan dapat menjadi helper bagi umat manusia.

Landasan Pendidikan merupakan salah satu kajian yang dikembangkan dalam berkaitannya dengan dunia pendidikan. Pada makalah ini berusaha memuat tentang: landasan hukum, landasan filsafat, landasan sejarah, landasan sosial budaya, landasan psikologi, dan landasan ekonomi .

#### a. Landasan Hukum

Kata landasan dalam hukum berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak. Sementara itu kata hukum dapat dipandang sebagai aturan baku yang patut ditaati. Aturan baku yang sudah disahkan oleh pemerintah ini , bila dilanggar akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku pula. Landasan hukum dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat terpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, dalam hal ini kegiatan pendidikan.

Pendidikan menurut Undang-Undang. Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Pasal-pasal yang bertalian dengan pendidikan dalam UUD 1945 hanya 2 pasal, yaitu pasal 31 dan Pasal 32. Yang satu menceritakan tentang pendidikan dan yang satu menceritakan tentang kebudayaan. Pasal 31 Ayat 1 berbunyi: Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran. Dan ayat 2 pasal ini berbunyi: Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajar. Pasal 32 pada

Undang Undang Dasar berbunyi: Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia, yang diatur dengan Undang Undang.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tidak semua pasal akan dibahas dalam buku ini. Yang dibahas adalah pasal-pasal penting terutama yang membutuhkan penjelasan lebih mendalam serta sebagai acuan untuk mengembangkan pendidikan. Pertama adalah Pasal 1 Ayat 2 dan Ayat 5. Ayat 2 berbunyi sebagai berikut: Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Selanjutnya Pasal 1 Ayat 5 berbunyi: Tenaga Pendidik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Menurut ayat ini yang berhak menjadi tenaga kependidikan adalah setiap anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Sedang yang dimaksud dengan Pendidik tertera dalam pasal 27 ayat 6, yang mengatakan bahwa Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

b. Landasan Filsafat

Filsafat pendidikan ialah hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam sampai keakar – akarnya mengenai pendidikan. Agar uraian tentang filsafat pendidikan ini menjadi lebih lengkap, berikut akan dipaparkan tentang beberapa aliran filsafat pendidikan yang dominan di dunia ini. Aliran itu ialah: a) Esensialis b) Perennialis c) Progresivis d) Rekonstruksionis e) Eksistensialis.

Filsafat pendidikan Esensialis bertitik tolak dari kebenaran yang telah terbukti berabad - abad lamanya. Kebenaran seperti itulah yang esensial, yang lain adalah suatu kebenaran secara kebetulan saja. Tekanan pendidikannya adalah pada pembentukan intelektual dan logika.

Filsafat pendidikan Perennialis tidak jauh berbeda dengan filsafat pendidikan Esensialis. Kalau kebenaran yang esensial pada esensialis ada pada kebudayaan klasik dengan *Great Book* nya, maka kebenaran Perennialis ada pada wahyu Tuhan. Tokoh filsafat ini ialah Agustinus dan Thomas Aquino.

Demikianlah Filsafat Progresivisme mempunyai jiwa perubahan, relativitas, kebebasan, dinamika, ilmiah, dan perbuatan nyata. Menurut filsafat ini, tidak ada tujuan yang pasti. Tujuan dan kebenaran itu bersifat relative. Apa yang sekarang dipandang benar karena dituju dalam kehidupan, tahun depan belum tentu masih tetap benar. Ukuran kebenaran ialah yang berguna bagi kehidupan manusia hari ini. Tokoh filsafat pendidikan Progresivis ini adalah John Dewey.

Filsafat pendidikan Rekonstruksionis merupakan variasi dari Progresivisme, yang menginginkan kondisi manusia pada umumnya harus diperbaiki (Callahan, 1983). Mereka bercita-cita mengkonstruksi kembali kehidupan manusia secara total.

Filsafat pendidikan Eksistensialis berpendapat bahwa kenyataan atau kebenaran adalah eksistensi atau adanya individu manusia itu sendiri. Adanya manusia di dunia ini tidak punya tujuan dan kehidupan menjadi terserap karena ada manusia. Manusia adalah bebas. Akan menjadi apa orang itu ditentukan oleh keputusan dan komitmennya sendiri.

#### c. Landasan Sejarah

Sejarah adalah keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian atau kegiatan yang dapat didasari oleh konsep – konsep tertentu.

Sejarah pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia sudah ada sebelum Negara Indonesia berdiri. Sebab itu sejarah pendidikan di Indonesia juga cukup panjang. Pendidikan itu telah ada sejak zaman kuno, kemudian diteruskan dengan zaman pengaruh agama Hindu dan Budha, zaman pengaruh agama Islam, pendidikan pada zaman kemerdekaan. Pada waktu bangsa Indonesia berjuang merintis kemerdekaan ada tiga tokoh pendidikan sekaligus pejuang kemerdekaan, yang berjuang melalui pendidikan. Merka membina anak-anak dan para pemuda melalui

lembaganya masing-masing untuk mengembalikan harga diri dan martabatnya yang hilang akibat penjajahan Belanda. Tokoh-tokoh pendidik itu adalah Mohamad Safei, Ki Hajar Dewantara, dan Kyai Haji Ahmad Dahlan (TIM MKDK, 1990).

Mohamad Syafei mendirikan sekolah INS atau *Indonesisch Nederlandse School* di Sumatera Barat pada Tahun 1926. Sekolah ini lebih dikenal dengan nama Sekolah Kayutanam, sebab sekolah ini didirikan di Kayutanam. Maksud ulama Syafei adalah mendidik anak-anak agar dapat berdiri sendiri atas usaha sendiri dengan jiwa yang merdeka. Tokoh pendidik nasional berikutnya yang akan dibahas adalah Ki Hajar Dewantara yang mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta. Sifat, system, dan metode pendidikannya diringkas ke dalam empat keemasan, yaitu asas Taman Siswa, Panca Darma, Adat Istiadat, dan semboyan atau perlambang. Asas Taman Siswa dirumuskan pada Tahun 1922, yang sebagian besar merupakan asas perjuang-an untuk menentang penjajah Belanda pada waktu itu.

Tokoh ketiga adalah KH. Ahmad Dahlan yang mendirikan organisasi Agama Islam pada tahun 1912 di Yogyakarta, yang kemudian berkembang menjadi pendidikan Agama Islam. Pendidikan Muhammadiyah ini sebagian besar memusatkan diri pada pengembangan agama Islam, dengan beberapa cirri seperti berikut (TIM MKDK, 1990). Asas pendidikannya adalah Islam dengan tujuan mewujudkan orang-orang muslim yang berakhlak mulia, cakap, percaya kepada diri sendiri, dan berguna bagi masyarakat serta Negara. Ada lima butir yang dijadikan dasar pendidikan yaitu: Perubahan cara berfikir, Kemasyarakatan, Aktivitas, Kreativitas, Optimisme

d. Landasan Sosial Budaya

Sosial mengacu kepada hubungan antar individu, antar masyarakat, dan individu secara alami, artinya aspek itu telah ada sejak manusia dilahirkan. Sama halnya dengan sosial, aspek budaya inipun sangat berperan dalam proses pendidikan. Malah dapat dikatakan tidak ada pendidikan yang tidak dimasuki unsur budaya. Materi yang dipelajari anak-anak adalah budaya, cara belajar mereka adalah budaya, begitu pula kegiatan-kegiatan mereka dan bentuk-bentuk yang dikerjakan juga budaya.

Kebudayaan dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu: 1) Kebudayaan umum, misalnya kebudayaan Indonesia. 2) Kebudayaan daerah, misalnya kebudayaan Jawa, Bali, Sunda, Nusa Tenggara Timur dan sebagainya 3) Kebudayaan populer, suatu kebudayaan yang masa berlakunya rata-rata lebih pendek daripada kedua macam kebudayaan terdahulu.

Kebudayaan menurut Taylor adalah totalitas yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh orang sebagai anggota masyarakat (Imran Manan, 1989). Hassan (1983) mengatakan kebudayaan berisi (1) norma-norma, (2) *folkways* yang mencakup kebiasaan, adat, dan tradisi, dan (3) *mores*. Sementara itu Imran Manan (1989) menunjukkan lima komponen kebudayaan sebagai berikut: 1) Gagasan 2) Ideologi 3) Norma 4) Teknologi 5). Benda. Agar menjadi lengkap, perlu ditambah beberapa komponen lagi yaitu: Kesenian, Ilmu, Kepandaian.

e. Landasan Psikologi

Psikologi atau ilmu jiwa adalah ilmu yang mempelajari jiwa manusia. Jiwa itu sendiri adalah roh dalam keadaan mengendalikan jasmani, yang dapat dipengaruhi oleh alam sekitar. Karena itu jiwa atau psikis dapat dikatakan inti dan kendali kehidupan manusia, yang berada dan melekat dalam manusia itu sendiri.

- 1) *Psikologi perkembangan*, ada tiga pendekatan teori tentang perkembangan. Pendekatan yang dimaksud adalah:
  - a) Pendekatan pentahapan. Perkembangan individu berjalan melalui tahapan-tahapan tertentu. Pada setiap tahap memiliki ciri-ciri pada tahap-tahap yang lain.
  - b) Pendekatan diferensial. Pendekatan ini memandang individu-individu itu memiliki kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan. Atas dasar ini lalu orang-orang membuat kelompok-kelompok
  - c) Pendekatan ipsatif. Pendekatan ini berusaha melihat karakteristik setiap individu, dapat saja disebut sebagai pendekatan individual. Melihat perkembangan seseorang secara individual. (Nana Syaodih, 1988)

Sementara itu Stanley Hall penganut teori Evolusi dan teori Rekapitulasi membagi masa perkembangan anak sebagai berikut

- a) Masa *kanak-kanak* ialah umur 0-4 tahun sebagai masa kehidupan binatang.
  - b) Masa *anak* ialah umur 4-8 tahun merupakan masa sebagai manusia pemburu
  - c) Masa *muda* ialah umur 8-12 tahun sebagai manusia belum berbudaya
  - d) Masa *adolesen* ialah umur 12-dewasa merupakan manusia berbudaya
- 2) *Psikologi Belajar*, Belajar adalah perubahan perilaku yang relative permanent sebagai hasil pengalaman (bukan hasil perkembangan, pengaruh obat, atau kecelakaan) dan bisa melaksanakannya pada pengetahuan lain serta mampu mengkomunikasikan kepada orang lain.

Ada sejumlah prinsip belajar menurut Gagne (1979) sebagai berikut:

- a) Kontiguitas, memberikan situasi atau materi yang mirip dengan harapan pendidik tentang respon anak yang diharapkan, beberapa kali secara berturut-turut.
- b) Pengulangan, situasi dan respon anak diulang-ulang atau dipraktikkan agar belajar lebih sempurna & lebih lama diingat.
- c) Penguatan, respon yang benar misalnya diberi hadiah untuk mempertahankan dan menguatkan respon itu.
- d) Motivasi positif dan percaya diri dalam belajar.
- e) Tersedia materi pelajaran yang lengkap untuk memancing aktivitas anak-anak
- f) Ada upaya membangkitkan keterampilan intelektual untuk belajar, seperti apersepsi dalam mengajar
- g) Ada strategi yang tepat untuk mengaktifkan anak dalam belajar
- h) Aspek-aspek jiwa anak harus dapat dipengaruhi oleh factor-faktor dalam pengajaran. (Nana Syaodih, 1988)

f. Landasan Ekonomi

Pada zaman pasca modern atau globalisasi sekarang ini, yang sebagian besar manusianya cenderung mengutamakan kesejahteraan materi disbanding kesejahteraan rohani, membuat ekonomi mendapat perhatian yang sangat besar. Tidak banyak orang mementingkan peningkatan spiritual. Sebagian besar dari mereka ingin hidup enak dalam arti jasmaniah. Seperti diketahui dana pendidikan di Indonesia sangat terbatas. Oleh sebab itu ada kewajiban suatu lembaga pendidikan untuk memperbanyak sumber-sumber dana yang mungkin bias digali adalah sebagai berikut:

- 1) Dari pemerintah dalam bentuk proyek-proyek pembangunan, penelitian-penelitian bersaing, pertandingan karya ilmiah anak-anak, dan perlombaan-perlombaan lainnya.
- 2) Dari kerjasama dengan instansi lain, baik pemerintah, swasta, maupun dunia usaha. Kerjasama ini bias dalam bentuk proyek penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan proyek pengembangan bersama.
- 3) Membentuk pajak pendidikan, dapat dimulai dari satu desa yang sudah mapan, satu daerah kecil, dan sebagainya. Program ini dirancang bersama antara lembaga pendidikan dengan pemerintah setempat dan masyarakat. Dengan cara ini bukan orang tua siswa saja yang akan membayar dana pendidikan, melainkan semua masyarakat.
- 4) Usaha-usaha lain, misalnya; Mengadakan seni pentas keliling atau dipentaskan di masyarakat, Menjual hasil karya nyata anak-anak, Membuat bazaar, Mendirikan kafetariae, Mendirikan toko keperluan personalia pendidikan dan anak-anak, Mencari donator tetap, Mengumpulkan sumbangan, Mengaktifkan BP 3 khusus dalam meningkatkan dana pendidikan. Seperti diketahui setiap lembaga pendidikan mengelola sejumlah dana pendidikan yang bersumber dari pemerintah (untuk lembaga pendidikan negeri), masyarakat, dan usaha lembaga itu sendiri. Menurut jenisnya pembiayaan pendidikan dijadikan tiga kelompok yaitu :

- a) Dana rutin, ialah dana yang dipakai membiayai kegiatan rutin, seperti gaji, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, perkantoran, biaya pemeliharaan, dan sebagainya.
- b) Dana pembangunan, ialah dana yang dipakai membiayai pembangunan-pembangunan dalam berbagai bidang. Yang dimaksudkan dengan pembangunan disini adalah membangun yang belum ada, seperti prasarana dan sarana, alat-alat belajar, media, pembentukan kurikulum baru, dan sebagainya.
- c) Dana bantuan masyarakat, termasuk SPP, yang digunakan untuk membiayai hal-hal yang belum dibiayai oleh dana rutin dan dana pembangunan atau untuk memperbesar dana itu.
- d) Dana usaha lembaga sendiri, yang penggunaannya sama dengan butir 3 di atas.

#### 5. Sumber Pembelajaran Ilmu Sosial dan IPS

Pembelajaran ilmu-ilmu sosial dan IPS dilaksanakan berdasarkan disain pembelajaran yang mono-disiplin atau interdisiplin, serta berdasarkan pendekatan pengajarnya. Studi historis tentang alat bantu pembelajaran dan sumber pembelajaran menunjukkan bahwa konsep tentang alat bantu mengajar mengalami perkembangan, ada tiga periode pemikiran tentang alat bantu mengajar atau yang pada tahun 1950-an sebagai media pembelajaran dan sumber pembelajaran. Pemikiran tersebut berkaitan dengan kemajuan studi kurikulum dan indursti alat pembelajaran.

Pemikiran tentang alat bantu mengajar tersebut secara garis besar dibedakan dalam periode-periode berikut. (i) Sampai tahun 1700-an pemikiran tentang alat peraga didominasi oleh wawasan filosofis. Joh Amos Comenius (1592-1670) misalnya mendobrak dominasi dengan visual aid tectbook-nya. Hal ini merintis perombakan pemikiran alat peraga. (ii) Periode 1700-1900 lahir rintisan eksperimentasi psikologi dan teori belajar baru. Alat peraga mulai dikaitkan dengan metode mengajar. (iii) Sejak tahun 1900 sampai sekarang yang dapat dibedakan menjadi dua tahap, yaitu tahun 1900-1950 dan sesudah tahun 1950.

Sejak tahun 1900 perhatian pada alat peraga semakin tinggi, dan mulai menjadi suatu spesialisasi baru. Penelitian tentang penggunaan radio, film, televisi, dan alat peraga lain semakin sistematis. Ada dua jenis konsep tentang alat peraga dan sumber pembelajaran. Pertama, konsep keilmuan alam tentang teknologi pembelajaran yang memandang segala media pembelajaran sebagai alat bantu mengajar. Asumsinya bahwa alat audiovisual dan mesin-mesin merupakan media nonverbal yang berguna untuk menghindarkan verbalisme. Konsep ini berpengaruh secara dominan tahun 1900-1950-an. Kedua, muncul konsep ilmu perilaku (behavioral science) tentang teknologi pembelajaran. Konsep ini berusaha menghilangkan pandangan dikotomis tentang alat peraga yang membedakan media pembelajaran verbal dan non-verbal.

Konsep keilmuan yang membedakan alat peraga verbal dan non-verbal mengakibatkan penyebelian mengajar. Konsep ilmu perilaku memandang media pembelajaran, mesin-mesin, sumber pengetahuan, materi pembelajaran sebagai bagian integral program pengajaran, yang akan mengubah perilaku pembelajar. Praktek pembelajaran tergantung pada metode keilmuan yang dikembangkan oleh ahli ilmu perilaku (behavioral science, sebagai fusi psikologi, sosiologi, dan antropologi).

Hubungan antara ilmu perilaku dengan teknologi instruksional sejajar dengan hubungan antara ilmu pengetahuan alam dengan teknologi engineering, atau hubungan antara biologi dengan teknologi kedokteran. Konsep perilaku ini berlaku sejak tahun 1950 sampai sekarang. Pembelajaran ilmu-ilmu sosial sudah tentu terpengaruh oleh perkembangan industri alat peraga dan konsep media pembelajaran.

IPS progresiveme memandang media pengajaran sebagai bagian integral program pembelajaran IPS. Social science education juga memandang media pembelajaran sebagai bagian integral program pembelajaran ilmu sosial. Aliran ini menunjukkan adanya simbol bahasa, simbol visual sebagai alat mempelajari ilmu sosial. IPS gaya baru memandang media pembelajaran dan sumber pengetahuan yang ada di masyarakat sebagai bagian integral program pembelajaran IPS.

Memposisikan media pembelajaran dan sumber pengetahuan di masyarakat sebagai bagian integral program pembelajaran ilmu sosial. Untuk lebih jelasnya, berikut akan diuraikan tentang hal itu yaitu:

- a. Memposisikan ilmu pengetahuan sebagai sistem pengetahuan terbuka. Artinya pengetahuan yang terdapat dalam buku teks dan realitas sosial di masyarakat merupakan suatu komprehensivitas. Dengan kata lain, buku pengetahuan baru merupakan sebagian dari pengetahuan. Si pembelajar, atau pembaca buku pengetahuan masih harus menerapkan keterampilan metodis mengungkap masyarakat menjadi pengetahuan.
- b. Memposisikan pembelajar sebagai seorang pribadi aktif pencari ilmu pengetahuan. Kedudukan pembelajar sebagai pencari aktif ilmu pengetahuan menyederajatkan pembelajar sebagai peneliti ilmu pengetahuan. Hal ini berakibat mengubah pola interaksi pembelajar-pembelajar pengetahuan.
- c. Memposisikan ilmu pengetahuan sebagai salah satu unsur kebudayaan, disamping benda-benda budaya dan perilaku sosial. Ilmu sosial dipandang sebagai salah satu unsur kebudayaan, di samping sistem berfikir logis, menganut orientasi nilai keilmuan, dan berbeda dengan orientasi nilai yang lain.

Instrumen pembelajaran ilmu-ilmu sosial atau media pembelajaran dan sumber-sumber ilmu sosial merupakan unsur keilmuan cabang-cabang ilmu sosial. alat bantu dapat berupa alat peraga dan simbol-simbol, baik simbol verbal, simbol visual, simbol nilai.

Nilai keilmuan alat bantu pembelajaran tersebut secara kategoris benda-benda sesuai dengan kedudukan dalam perangkat hubungan antara fakta konsep generalisasi dan teori secara ilmiah. Secara fungsional berarti bahwa setiap alat peraga memiliki kegunaan khusus pada acuan sudut pandang disiplin ilmu sosial tertentu.

Sebagai ilustrasi, globe sebagai model ilmiah berfungsi sebagai media ke ruangan tentang palet di dunia, dan penunjuk lokasi di bumi. Dokumen misalnya, merupakan media rekonstruksi tidak sejarah. Tabel jumlah penduduk misalnya, merupakan media yang melukiskan kondisi tengah kerja dalam acuan tindakan ekonomis. Gambar atau bagan interaksi sosial misalnya, melukiskan interaksi antar individu

dan antar kelompok, yang memungkinkan prediksi tidak-tindak sosial maupun politis dalam masyarakat.

Benda-benda budaya bukan hanya melukiskan tingkat keterampilan seseorang pendukung kebudayaan suatu zaman, tetapi juga dapat melukiskan tingkat pengetahuan suatu bangsa di tengah pergaulan dengan bangsa-bangsa lain. Media pembelajaran dan sumber pengetahuan ilmu-ilmu sosial dalam rangka pembelajaran keilmuan dapat dibedakan fungsinya menjadi beberapa kategori sebagai berikut.

- 1) Benda asli merupakan peraga kongkrit sebagai media rekonstruksi sosial dan historis, dan dasar pembentukan konsep keilmuan. Pada giliran selanjutnya dapat digunakan sebagai konstruk generalisasi dan rekonstruksi sistem sosial dan sistem nilai. Benda tiruan memiliki fungsi serupa dengan benda asli.
- 2) Model ilmiah seperti tiruan perbesaran atau pengecilan benda seperti globe, merupakan sarana berfikir keilmuan yang melukiskan hubungan fakta, konsep, generalisasi dan teori ilmiah. Dengan model ilmiah tersebut ilmuwan menyusun teori atau merevisi teori.
- 3) Buku ilmu pengetahuan, buku pelajaran, laporan hasil penelitian dan jurnal ilmu-ilmu sosial merupakan sumber ilmu-ilmu sosial yang sangat penting bagi jenjang sekolah yang relevan. Karya tulis ilmiah ilmu sosial tersebut dapat dikategorikan sebagai sumber primer, sekunder atau tertier. Pada karya tulis tersebut dapat ditemukan artikel ilmu sosial dalam surat kabar dan majalah semi ilmiah dan majalah umum. Karya tulis jenis ini merupakan sumber kuarter yang berguna untuk pengayaan bahan pembelajaran. Berbeda dengan buku sumber primer dan sekunder, maka sumber ini perlu diterima secara kritis.
- 4) Masyarakat dan kebudayaan sebagai sumber pengetahuan ilmu-ilmu sosial. masyarakat dan kebudayaan adalah realitas sosial yang dapat dijadikan lahan penelitian ilmu-ilmu sosial. sebagai realitas sosial merupakan penyedia fakta keilmuan, dan sekaligus wilayah uji teori keilmuan.

### **C. Konsep Dasar Ekonomi**

Di dalam laman <http://isma-ismi.com/pengertian-ekonomi.html> dijelaskan istilah ekonomi menurut bahasa, berasal dari bahasa Yunani

yaitu *Oikos* berarti keluarga atau rumah tangga sedangkan *Nomos* berarti peraturan atau aturan. Sedangkan menurut istilah yaitu manajemen rumah tangga atau peraturan rumah tangga. Pengertian ekonomi adalah salah satu bidang ilmu sosial yang membahas dan mempelajari tentang kegiatan manusia berkaitan langsung dengan distribusi, konsumsi dan produksi pada barang atau jasa.

Pada dasarnya masalah ekonomi yang selalu dihadapi oleh manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi adalah jumlah kebutuhan manusia tidak terbatas sedangkan jumlah alat pemuas kebutuhan manusia terbatas. Terdapat beberapa factor yang mempengaruhi jumlah kebutuhan seseorang berbeda dengan jumlah kebutuhan orang lain, yaitu antara lain: faktor fisik, moral, pendidikan, ekonomi, dan faktor sosial budaya.

Apabila membahas mengenai pengertian ekonomi, secara otomatis akan membicarakan tentang ilmu ekonomi dimana ilmu ekonomi merupakan sebuah ilmu kajian yang membahas tentang ekonomi itu sendiri. Secara umum, ilmu ekonomi dibagi menjadi dua yaitu; 1) ilmu ekonomi makro dan 2) ilmu ekonomi mikro. Metodologi dalam pengertian ekonomi menggunakan metode kuantitatif yaitu adanya pergerakan uang atau uang digunakann sebagai alat tukar-menukar dalam masyarakat. Ekonomi mengkombinasi ilmu statistik, matematika dan teori ekonomi.

Pembahasan Tentang Pengertian Ekonom, dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi sangat diperlukan dalam memenuhi kebutuhan, oleh karenanya ekonomi merupakan salah satu ilmu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Selain itu, ekonomi sebagai alat untuk mengukur tingkat kemajuan dalam suatu negara, apakah keadaan ekonomi yang baik atau semakin memburuk.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa pengertian ekonomi adalah sebuah bidang kajian ilmu yang berhubungan tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia. Karena itulah, ekonomi merupakan salah satu ilmu yang berkaitan tentang tindakan dan perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang berkembang dengan sumber daya yang ada melalui kegiatan konsumsi, produksi dan distribusi.

1. Pengertian Ekonomi menurut beberapa ahli, yaitu sebagai berikut:
  - a. J. S, ekonomi adalah salah satu sains praktikal tentang penagihan dan pengeluaran.

- b. Adam Smith, ekonomi adalah penyelidikan yang berkaitan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara.
  - c. Abraham Maslow, ekonomi adalah salah satu bidang kajian yang mencoba menyelesaikan masalah keperluan asas manusia melalui penggabungan segala sumber ekonomi yang ada dengan berdasarkan pada prinsip dan teori dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien.
  - d. Hermawan Kartajaya, ekonomi adalah platform yang dimana sektor industri melekat di atasnya.
  - e. Paul A. Samuelson, ekonomi adalah cara yang dilakukan manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikan oleh masyarakat untuk dikonsumsi. <http://isma-ismi.com/pengertian-ekonomi.html>
2. Pengertian Ekonomi Makro dan Mikro Serta Pebedaannya.
- a. Pengertian Ekonomi Makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Sedangkan pada Pengertian Ekonomi Mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan perekonomian hanya pada bagian kecilnya. Ekonomi makro dan Ekonomi Mikro merupakan bagian dari ekonomi teori yang bertugas dalam menjelaskan peristiwa-peristiwa ekonomi dan selanjutnya merumuskan hubungan dalam hukum ekonomi.
  - b. Kajian Ekonomi Makro. Ekonomi makro merupakan kegiatan perekonomian yang mempelajari secara keseluruhan, artinya dalam cabang ilmu ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang memengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Dalam perkembangan Ekonomi Makro berkaitan dengan masalah ekonomi publik (negara).
 

Aspek analisis dalam Ekonomi Mikro adalah sebagai berikut; Pendapatan nasional, Investasi, Kesempatan kerja, Inflasi, Neraca pembayaran
  - c. Kajian Ekonomi Mikro
 

Ekonomi mikro merupakan kegiatan perekonomian yang mempelajari hanya pada bagian kecilnya, artinya bagian kecilnya yaitu seperti perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan

harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang, dan jasa yang diperjualbelikan. Dalam perkembangan ekonomi mikro yang kini telah melahirkan beragam teori dan konsep mengenai ekonomi regional, ekonomi manajerial, ekonomi lingkungan, dan ekonomi sumber daya alam. Dalam aspek analisis ekonomi mikro sebagai berikut; Analisis biaya dan manfaat, Teori permintaan dan penawaran, Elastisitas. Model-model pasar. Industri. Teori produksi. Teori harga

d. Hubungan Ekonomi Makro dan Ekonomi Mikro

Ekonomi makro dan ekonomi mikro saling terkait menurut Gregory Mankew, karena perubahan ekonomi yang secara makro (menyeluruh), tentu saja dampak/hasilnya pada perubahan ada pada individu-individu yang berjuta-juta akan merasakan dan melakukan kegiatan ekonomi, Dengan demikian, perubahan yang ada pada ekonomi makro, merupakan hasil dari perubahan yang terjadi dalam ekonomi mikro.

e. Perbedaan Ekonomi Makro dan Ekonomi Mikro

Dilihat Dari	Ekonomi Mikro	Ekonomi Makro
Harga	Harga adalah nilai dari suatu komoditas barang tertentu saja	Harga adalah nilai dari komoditas secara agregat keseluruhan/menyeluruh
Unit Analisis	Perubahan kegiatan ekonomi secara perorang an contohnya permintaan & penawaran konsumen, perilaku konsumen, perilaku produsen, pasar, penerimaan, biaya dan laba atau rugi	Kegiatan ekonomi yang membahas secara menyeluruh. Contohnya Pendapatan nasional, Investasi, Kesempatan kerja, Inflasi , Neraca pembayaran
Tujuan Analisis	Terkonsentrasi mengenai cara dalam mengalokasikan sumber daya agar dapat dicapai kombinasi yang tepat	Terkonsentrasi pada pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara menyeluruh

f. Manfaat Ekonomi Makro dan Ekonomi Mikro

- 1) Ekonomi makro dapat memberikan kita manfaat, jika dipelajari, manfaat tersebut adalah dapat mengetahui pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi nasional, dan neraca pembayaran nasional.
- 2) Ekonomi mikro dapat memberikan manfaat, jika dipelajari, manfaat tersebut adalah dapat melakukan penghematan dalam sumber daya yang terbatas dan dapat mengetahui cara-cara mencapai kepuasan maksimum dalam penggunaan sumber daya yang serta terbatas.

#### D. Konsep Dasar Budaya

##### 1. Pengertian Budaya

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi, dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut *culture*, yang berasal dari kata Latin *Colere*, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata *culture* juga kadang diterjemahkan sebagai "kultur" dalam bahasa Indonesia.

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistemagama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya, dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.

Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar, dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia.

Beberapa alasan mengapa orang mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan orang dari budaya lain terlihat dalam definisi

budaya: Budaya adalah suatu perangkat rumit nilai-nilai yang dipolarisasikan oleh suatu citra yang mengandung pandangan atas keistimewaannya sendiri."Citra yang memaksa" itu mengambil bentuk-bentuk berbeda dalam berbagai budaya seperti "individualisme kasar" di Amerika, "keselarasan individu dengan alam" di Jepang dan "kepatuhan kolektif" di Cina.

Citra budaya yang bersifat memaksa tersebut membekali anggota-anggotanya dengan pedoman mengenai perilaku yang layak dan menetapkan duniamakna dan nilai logis yang dapat dipinjam anggota-anggotanya yang paling bersahaja untuk memperoleh rasa bermartabat dan pertalian dengan hidup mereka.

Dengan demikian, budayalah yang menyediakan suatu kerangka yang koheren untuk mengorganisasikan aktivitas seseorang dan memungkinkannya meramalkan perilaku orang lain. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah *Cultural-Determinism*.

Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai *superorganic*. Menurut Andreas Eppink, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual, dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat.

Menurut Edward Burnett Tylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Sedangkan menurut Selo Soemardjan, dan Soelaiman Soemardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh kesimpulan bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan, dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian

kebudayaan itu bersifat abstrak, sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, bisa berupa perilaku, dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

## 2. Paradigma Budaya

### a. Paradigma Struktural

Pada mulanya paradigma struktural berasal dari dan tumbuh dalam ilmu bahasa, namun kemudian berkembang ke dalam bidang-bidang ilmu lain, seperti sosiologi, antropologi, dan kritik sastra. Perkembangan tersebut pada dasarnya merupakan perluasan paradigma struktural ilmu bahasa ke dalam bidang-bidang ilmu yang ikut menerapkan paradigma tersebut.

Paradigma struktural menekankan pentingnya objek kajian sebagai sebuah sistem yang terstruktur. Oleh karena itu, dalam ilmu bahasa paradigma ini memfokuskan kajiannya terhadap sistem bahasa (*langue*), dan bukan pada pemakaian bahasa (*parole*). Aplikasi paradigmatik strukturalisme dalam ilmu sosial tentu saja memfokuskan kajiannya terhadap sistem sosial, dan bukan pada bagaimana pemakaian aturan-aturan sosial secara individual. Aplikasi paradigma tersebut membentuk aliran sosiologi struktural, yang kemudian juga dipengaruhi oleh fungsionalisme dari antropologi sosial menjadi strukturalisme fungsional. (Teori Struktural Fungsional).

Begitu pula aplikasinya dalam antropologi, seperti yang dilakukan oleh Levi-Strauss, memfokuskan kajiannya terhadap sistem-sistem budaya, misalnya sistem kuliner, sistem kekerabatan, dan sistem totemisme, sebagai contoh, sistem kuliner yang diteliti oleh Levi-Strauss meletakkan klasifikasi makanan dalam sistem oposisi biner, yaitu makanan yang matang/mentah. Sistem kekerabatan yang berkaitan dengan perkawinan diletakkan dalam oposisi biner, yaitu yang boleh/tidak boleh dinikahi. Sistem tabu inses, misalnya, memberikan larangan endogami dan mengharuskan eksogami. Sistem kekerabatan berdasarkan tabu inses tersebut

mengangkat manusia dari sistem biologis ke sistem sosial budaya dalam perkawinan. Begitu pula halnya dengan sistem totemisme.

Totemisme diletakkan dalam oposisi biner, dunia atas/dunia bawah. Dunia atas adalah jagat para dewa yang menjadi sesembahan masyarakat pendukungnya; sedangkan dunia bawah adalah alam para binatang, tumbuh-tumbuhan yang menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat tersebut.

Paradigma struktural berusaha mencari aturan-aturan atau hukum-hukum tersembunyi yang mengatur dan membentuk sebuah sistem. Dalam ilmu bahasa, paradigma ini mencari aturan-aturan atau hukum-hukum yang mengatur dan membentuk sebuah sistem bahasa. Dalam ilmu sosial, paradigma ini mencari aturan-aturan atau hukum-hukum yang mengatur dan membentuk sebuah sistem masyarakat. Dalam antropologi, paradigma ini mencari aturan-aturan atau hukum-hukum yang mengatur dan membentuk sistem budaya.

Paradigma struktural menekankan pentingnya sistem yang terstruktur dan mengabaikan individu-individu yang terdapat dalam sistem tersebut. Dalam sistem sosial, individu hanya dianggap sebagai robot yang terprogram sesuai dengan sistem yang berlaku. Jika terjadi pelanggaran sistemik oleh individu, maka ia dianggap melanggar hukum dan mendapat sangsi-sangsi sosial. Dengan demikian, paradigma struktural berusaha melanggengkan sistem yang berlaku.

b. Paradigma Pascastruktural

Paradigma pascastruktural pada dasarnya merupakan antitesis dari paradigma struktural. Dalam paradigma ilmu bahasa terdapat peralihan objek kajian dari sistem bahasa (*langue*) ke pemakaian bahasa (*parole*). Dalam paradigma ilmu sosial terdapat peralihan objek kajian dari sistem sosial ke para individu atau pelaku sosial dalam masyarakat. Dalam istilah sosiologi, peralihan dari *social structure* ke *social agency*.

Paradigma pascastruktural beranggapan bahwa *social parole* lebih penting daripada *social system*. Agen sosial perlu mendapatkan perhatian yang memadai dalam penelitian, karena kreativitas para individu dalam masyarakat itulah yang menciptakan sistem-

sistem sosial. Dari sisi regulasi, sebuah sistem sosial tidak akan berfungsi apabila para individu dalam masyarakat tersebut tidak menaati aturan-aturan atau hukum-hukumnya. Dari sisi produksi, para individu akan menciptakan sistem baru apabila sistem lama sudah tidak memiliki fungsi regulatifnya.

Para individu dalam masyarakat melakukan negosiasi-negosiasi dalam produksi sistem sosial yang kemudian menjadi konvensi-konvensi yang memiliki fungsi regulatif dalam masyarakat tersebut. Dalam paradigma ini, agen sosial bersifat produktif terhadap penciptaan sistem sosial dalam masyarakat, sehingga sistem tidak lagi statis seperti dalam paradigma struktural, melainkan dinamis, berubah, dan berkembang sesuai dengan dinamika sosial dalam masyarakat.

Barangkali, interaksionisme simbolik merupakan contoh yang pas dari paradigma pascastruktural. Interaksionisme simbolik telah menggeser penelitian dari kajian terhadap aturan-aturan atau hukum-hukum tersembunyi yang mengatur sistem masyarakat, kepada kajian terhadap interaksi-interaksi simbolik dalam masyarakat. Interaksi sosial merupakan interaksi simbolik, begitu pula interaksi budaya.

Sebagai contoh pelaksanaan upacara ritual dalam masyarakat merupakan interaksi simbolik yang diproduksi berdasarkan negosiasi-negosiasi para individu pendukungnya. Negosiasi tersebut menciptakan aturan dan peran sosial yang menjadi konvensi sosial dalam ritual tersebut.

Apabila konvensi sosial diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, maka konvensi tersebut menjadi tradisi. Dengan demikian tradisi itu sendiri merupakan produk interaksi simbolik.

Contoh lain adalah dramaturgi sosial dari Goffman. Dia beranggapan bahwa fenomena sosial identik dengan pentas drama. Seperti halnya panggung drama, pentas sosial juga terbagi ke dalam tiga wilayah. Wilayah formal terdapat pada latar depan atau di atas panggung; wilayah informal terdapat pada latar belakang atau di belakang panggung; dan wilayah interaktif terdapat pada latar penonton.

Dengan mengacu pada Goffman, fenomena sosial dapat dipilah ke dalam wilayah formal, wilayah informal, dan wilayah interaktif. Dalam wilayah formal, sebuah fenomena sosial bersumber pada aturan dan peran sosial yang resmi. Dalam wilayah informal, terdapat aturan dan peran sosial yang tidak resmi tetapi berpengaruh terhadap wilayah formal. Dalam wilayah interaktif, terdapat interaksi simbolik antara fenomena sosial di wilayah formal dengan para penonton (pengamat, peneliti, atau masyarakat lain). Interaksi simbolik antara wilayah formal dengan wilayah interaktif ini juga menghasilkan negosiasi-negosiasi yang kemudian menjadi konvensi-konvensi.

Paradigma yang berusaha mengambil jalan tengah dan dikenal dengan mazhab ketiga dalam sosiologi adalah paradigma yang ditawarkan oleh Giddens. Paradigma ini berusaha mensintesa-kan antara struktur sosial dengan agensi sosial. Sintesa tersebut menghasilkan teori yang terkenal dengan nama teori *strukturasi*.

c. Paradigma Posmodern

Masyarakat modern adalah masyarakat yang terjajah oleh sistem. Teori besar (grand theory) juga bersifat imperial, menjajah secara intelektual. Sebaliknya, masyarakat posmodern berusaha memerdeka kan diri dari penjajahan sistemik dan teoretik.

Secara teoretis, paradigma posmodern banyak mengacu para teori-teori pascastrukturalis. Meskipun demikian, pergeseran dari modernism ke posmodernisme menghasilkan peralihan paradigmatik dari paradigma produksi ke paradigma konsumsi. Sebagai konsekuensinya, paradigma ini mengalihkan objek kajiannya dari produksi sosiokultural ke konsumsi sosiokultural.

Dapat dikatakan bahwa masyarakat modern adalah masyarakat produsen, dan masyarakat posmodern adalah masyarakat konsumen. Dalam kaitannya dengan kebudayaan, budaya modern merupakan budaya produksi, dan budaya posmodern merupakan budaya konsumsi. Perilaku posmodern adalah perilaku konsumsi yang mengacu pada reproduksi-reproduksi.

Dengan mengacu pada paradigma posmodern, fenomena sosial merupakan fenomena reproduksi dalam sistem konsumsi

sosial. Begitu pula fenomena budaya merupakan fenomena reproduksi dalam sistem konsumsi budaya.

Masyarakat dan kebudayaan posmodern adalah masyarakat dan kebudayaan yang termediasi, yang dalam istilah Baudrillard, masyarakat *hyperreal*. Realitas sudah menjadi hyperrealitas dalam dunia posmodern. Oleh karena itu, Baudrillard tidak lagi mengacu pada interaksi simbolik (*symbolic interaction*), melainkan pada pertukaran simbolik (*symbolic exchange*). Pertukaran simbolik ini melebur dinding pemisah antara yang nyata dan yang tidak nyata. Fenomena-fenomena sosiokultural yang termediasi membentuk dan dibentuk hyperrealitas. Dalam kondisi tersebut terjadi apa yang dinamakan Baudrillard sebagai konspirasi simbolik (*symbolic conspiracy*).

Sebagai contoh, masyarakat konsumen media cetak maupun elektronik menganggap bahwa fenomena sosiokultural yang termediasi oleh media tersebut sama nyatanya dengan kenyataan hidup sehari-hari. Hal ini terjadi karena media tidak lagi berfungsi sebagai sarana representasi tetapi sebagai sarana reproduksi sosiokultural.

Paradigma postmodern mengalihkan kajian dari fakta ke citra. Fakta sosial (*social fact*) yang menjadi temuan penting sosiologi modern telah digeser oleh citra sosial (*social image*) yang menjadi temuan penting sosiologi posmodern. Fungsi sosial (*social function*) sudah tergantikan oleh gaya hidup (*social lifestyle*). Dengan demikian, struktural fungsional sudah tergantikan oleh stilistika sosiokultural.

Adanya pergeseran dari masyarakat (*society*), menuju masyarakat massa (*masssociety*) ke masyarakatmaya (*cybersociety*) yang berkaitan dengan mediamorfosis dari mediamassa ke mediamaya, serta dari budayamassa ke budayamaya memerlukan perubahan paradigma dalam teori-teori sosial budaya. Paradigma struktural, pascastruktural, dan posmodern merupakan konsekuensi dari kondisi-kondisitersebut. <http://kajinasrull.blogspot.com/2013/06/paradigma-teori-kebudayaan.html>

### 3. Animisme, Dinamisme, dan Totemisme

Animisme adalah kepercayaan terhadap roh yang mendiami semua benda. Manusiapurba percaya bahwa roh nenek moyang masih berpengaruh terhadap kehidupan didunia. Mereka juga memercayai adanya roh di luar roh manusia yang dapat berbuatjahat dan berbuat baik. Roh-roh itu mendiami semua benda, misalnya pohon, batu, gunung, dsb. Agar mereka tidak diganggu roh jahat, mereka member-kan sesaji kepadaroh-roh tersebut.

Dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga ataukekuatan yang dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup. Mereka percaya terhadap kekuatan gaib dan kekuatan itu dapat menolong mereka. Kekuatan gaib itu terdapat di dalam benda-benda seperti keris, patung, gunung, pohon besar, dll. Untuk mendapatkan pertolongan kekuatan gaib tersebut, mereka melakukan upacara pemberian sesaji, atau ritual lainnya.

Totemisme adalah kepercayaan bahwa hewan tertentu dianggap suci dan dipujakarena memiliki kekuatan supranatural. Hewan yang dianggap suci antara lain sapi, ular, dan harimau.<http://handikap60.blogspot.com/2013/02/pengertian-animisme-dinamisme-dan.html>

## Daftar Pustaka

- Achmad Sanusi. 1971. *Studi Sosial di Indonesia*. Bandung: IKIP.
- Ade Soetara. 2011. *Makalah IPS sebagai Program Pendidikan*“ <http://soetara.blogspot.com/2011/01/makalah-ips-sebagai-program-pendidikan.html> (diakses tanggal 10 maret 2011).
- Arifin, M. 1987. *Kapita selekta pendidikan (umum dan agama)*. Semarang : CV. Toha Putra
- Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat. 2006. *Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ensiklopedia bebas dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/ Pendidikan](https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan))
- Fatah Santoso, dkk. 2005. *Studi Islam 3*. Surakarta: LPID-UMS.
- Hidayati, Mujinem & Anwar Senen. 2008. *Pengembangan Pendidikan IPS SD*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Reese, W.L. 1980. *Dictionary of Philosophy and Religion: Eastern and Western Thought*, p. 488.
- Vessuri, Hebe. (2000). "Ethical Challenges for the Social Sciences on the Threshold of the 21st Century." *Current Sociology* 50, no. 1 (January): 135-150.

## **BAB III**

### **GREND TEORI TKI**

#### **A. Asumsi Teori TKI**

TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke Luar Negeri dalam kajian teori yang paling sesuai adalah teori migrasi, salah satu analisis ilmiah migrasi adalah karya Ravenstein tentang hukum migrasi (*The Laws of Migration*) yang mencoba melakukan analisis menyeluruh dari Sensus di Inggris tahun 1881. Ravenstein melacak migrasi di seluruh Britania Raya dan menemukan hukum migrasi sebagai berikut: (1) Migrasi berbanding lurus dengan penduduk yang dikirim dan penduduk yang diterima dan berbanding terbalik dengan jarak, (2) migrasi terjadi di dalam tahapan-tahapan dan berpusat pada pusat-pusat industri utama, (3) untuk setiap arus migran, di sana ada sebuah arus balik (4) orang-orang yang lahir di pedesaan lebih mungkin bermigrasi dibandingkan mereka yang lahir di kota-kota. (5) para wanita memiliki suatu kecenderungan yang lebih tinggi untuk bermigrasi dibanding para pria.

Empat tahun kemudian, di tahun 1885, Ravenstein memperluas penyelidikan empirisnya mengenai migrasi ke Eropa dan Amerika Serikat. Berdasarkan pada studi kedua ini, dia menambahkan dua hukum lagi, yaitu; (6) orang-orang bermigrasi untuk membuat hidup mereka lebih baik, (7) migrasi memiliki hubungan positif dengan produksi/ekonomi (Temple, 1974).

Pernyataan-pernyataan tersebut di atas dipertegas juga oleh Everett S. Lee (1966), bahwa sebenarnya kajian-kajian tentang migrasi sudah ada sejak Ravenstein memulai kajiannya pada tahun 1885, ia terdorong menyajikan karyanya yang sangat terkenal tentang hukum-hukum migrasi di dalam suatu pertemuan *Royal Statistical Society* tanggal 17 Maret 1885. Karyanya itu didasarkan pada Sensus di Inggris tahun 1881, tetapi pada tahun 1889 Ravenstein mengulangi kajiannya dengan judul *The Laws of Migration* dengan menggunakan data lebih dari 20 negara. Kesimpulan yang diambil dari karya pertama dan kedua hukum-hukum migrasi

Ravenstein adalah; (1) Migrasi dan jarak , (2) migrasi bertahap (3) migrasi arus dan arus balik, (4) Terdapat perbedaan antara desa dan kota mengenai kecenderungan penduduk untuk migrasi, (5) Kebanyakan wanita lebih suka bermigrasi ke daerah-daerah yang dekat, (6) teknologi dan migrasi dan, (7) motif ekonomi merupakan dorongan utama bermigrasi” (Lee, diterjemahkan oleh Daeng, ditinjau kembali oleh Mantra, 1987: 2-3).

Hukum migrasi tersebut ada titik kelemahannya, sebagaimana analisis Temple (1974: 15) bahwa karya Ravenstein tersebut di atas yang sangat berpengaruh pada perkembangan selanjutnya bukan merupakan sebuah teori migrasi tetapi sebuah daftar mengenai karakteristik makro yang mungkin menghasilkan sebuah fungsi migrasi makro. Hanya hukum ke 6 dari yang ada tersebut di atas yang mengindikasikan apa yang mungkin mendasari proses keputusan individu untuk bermigrasi. Ravenstein tidak menawarkan bukti bahwa pentingnya gejala-gejala dari arus-arus migrasi Inggris akan tetap permanen. Tradisi ini paling malang karena para ahli teori berikutnya telah melakukan hal-hal yang sama dan terkonsentrasi pada karakteristik makro.

Analisis Lee tidak jauh berbeda dengan Temple. Dia menjelaskan bahwa hukum-hukum kependudukan dan hukum-hukum ekonomi umumnya tidak setepat hukum-hukum ilmu alam (Lee, terjemahan Daeng, 1987: 1). Seorang kritikus yang bernama N.A. Humprey menanggapinya dengan pedas. Setelah membaca dengan teliti karya Ravenstein, ia berkesimpulan bahwa migrasi tidak mempunyai hukum sama sekali, itulah cirinya yang khas yaitu tidak ada hukum tertentu (Lee, 1966, dalam Mantra, 1987: 1). Stephen Bourne juga mengajukan kritik yang tidak mengecilkan hati, tetapi secara logis lebih serius.

Menurut Bourne, Ravenstein tidak memformulasikan hukum-hukum migrasi dalam susunan yang sedemikian pasti sehingga dapat dikritik. Walaupun demikian, diakui bahwa karyanya tersebut tahan uji dan dalam waktu lama menjadi titik tolak untuk penelitian teori migrasi.

## **B. Teori Migrasi Everett S. Lee**

Mobilitas penduduk dari desa ke kota baik yang permanen (migrasi) maupun yang non-permanen (sirkulasi), pada hakekatnya memiliki kesamaan terutama tentang daya dorong dan dalam hal proses pengambilan keputusan untuk melakukan mobilitas (Mantra, 1987: 140-144;). Ketetapan

an menjadi migran permanen atau non-permanen tersebut sangat tergantung pada kemampuan kota dalam mengembangkan industrialisasi (Mc.Gee, 1977: dalam Abu-Lughod dan Hay, eds., 1977: 209-211; dalam Sutomo 1993: 22) termasuk di dalamnya kesempatan kerja sektor perdagangan, dan sektor-sektor yang lain. Suatu mobilitas akan terjadi apabila individu memutuskan lebih baik pindah dari pada menetap tinggal karena kepindahan tersebut dirasa akan lebih menimbulkan keuntungan. Untuk menjelaskan mekanisme migrasi perlu dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan. Konsep yang paling membantu untuk memahami mekanisme tersebut adalah teori dorong-tarik (*push-pull theory*).

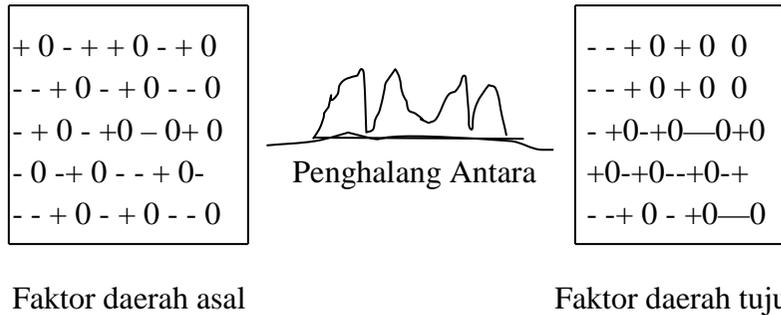
Teori dorong-tarik (*push-pull theory*) mengasumsikan bahwa setiap fenomena migrasi selalu berkaitan dengan daerah asal, daerah tujuan, dan bermacam-macam rintangan yang menghambat. Menurut Lee ada empat faktor yang berpengaruh orang mengambil keputusan untuk melakukan migrasi, yaitu; (1) Faktor-faktor yang terdapat di daerah asal, (2) faktor-faktor di daerah tujuan, (3) faktor rintangan, dan (4) faktor pribadi.

Faktor-faktor di daerah asal dan daerah tujuan dapat bersifat positif, negatif atau bersifat netral. Faktor-faktor di daerah asal dikatakan positif kalau sifatnya mendorong migran, negatif kalau menghambat migran, dan netral kalau tidak berpengaruh terhadap migran. Sedangkan faktor-faktor di daerah tujuan dikatakan positif jika menarik calon migran, negatif kalau menghambat masuknya calon migran, dan netral kalau tidak berpengaruh terhadap migran (Lee, 1966, diterjemahkan oleh Daeng, ditinjau kembali oleh Mantra, 1987).

Dari keempat kelompok faktor tersebut yang terutama adalah faktor pribadi, karena pada akhirnya keputusan bermigrasi atau tidak bermigrasi tergantung kepada yang bersangkutan. Apakah sesuatu faktor bersifat positif, negatif, atau netral dan seberapa jauh mendorong, menghambat, atau menarik calon migran bergantung kepada pribadi yang mempersepsikannya.

Lee menjelaskan bahwa tiga hal yang pertama dari faktor-faktor tersebut secara skematis terlihat pada gambar 2.1. Dalam setiap daerah banyak sekali faktor yang mempengaruhi orang menetap di situ atau menarik orang untuk pindah ke situ ada pula faktor-faktor lain yang memaksa mereka meninggalkan daerah itu.

Gambar 2.1. Teori Dorong-tarik (*Push-Pull Theory*) Lee



Faktor-faktor itu terlihat dalam diagram sebagai tanda + (positif) dan - (negatif), faktor lain yang ditunjukkan dengan tanda 0 (netral) ialah faktor yang pada dasarnya tidak ada pengaruhnya sama sekali pada penduduk. Beberapa faktor itu mempunyai pengaruh yang sama terhadap beberapa orang, sedangkan ada faktor yang mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap seseorang.

Pada gambar 2.1 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa orang akan membuat kalkulasi kualifikasi faktor-faktor (+) dan faktor-faktor (-) untuk menentukan sesuatu daerah memuaskan atau tidak sehingga diperoleh nilai kefaedahan (*place utility*) daerah tersebut. Proses mobilitas akan terjadi apabila neraca perbandingan faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh pada keinginan berpindah lebih banyak dari pada faktor-faktor yang berpengaruh pada penghambat. Kedua faktor tersebut mempunyai peran yang berbeda dalam proses mobilitas.

Faktor-faktor (+) di daerah asal berpengaruh sebagai penahan agar seseorang tetap tinggal di daerahnya, faktor-faktor (-) di daerah asal berpengaruh sebagai pendorong (*push factors*) agar seseorang pindah ke daerah lain, sebaliknya faktor-faktor (+) di daerah tujuan berpengaruh sebagai penarik (*pull factors*) agar seseorang melakukan pindah ke daerah tersebut, faktor-faktor (-) di daerah tujuan berpengaruh agar seseorang tidak datang di daerah tersebut, faktor-faktor (0) baik di daerah asal maupun di daerah tujuan merupakan faktor netral (*neutral factors*) yang berarti tidak berpengaruh dalam proses mobilitas.

Pengambilan keputusan apakah seseorang pindah ke daerah lain atau tetap tinggal di daerah tersebut bukan hanya tergantung pada perbedaan

nilai faedah daerah-daerah tersebut melainkan juga tergantung pada seberapa besar faktor penghalang (*intervening obstacles*) ikut berpengaruh dalam merintangi seseorang untuk berhubungan dari daerah asal dengan daerah tujuan. Salah satu contoh faktor penghalang yang selalu ada dalam proses migrasi adalah faktor jarak. Seperti tanggapan pada faktor-faktor yang menentukan nilai kefaedahan suatu daerah di atas, tanggapan terhadap faktor penghalang antara ini-pun bervariasi berkaitan dengan tingkat sosial-ekonomi, karakteristik pribadi seseorang, dan lingkungan hidup (*life cycle*) (Sutomo, 1993: 30).

Akhirnya masih ada sebuah faktor lagi yang berpengaruh kepada seseorang yang akan melintasi ambang pintu untuk pindah, yaitu faktor pribadi. Faktor-faktor ini dapat mempermudah atau memperlambat proses migrasi. Kepekaan pribadi, kecerdasan, dan kesadaran tentang kondisi di lain daerah sangat berpengaruh hasil evaluasinya terhadap keadaan di daerah asalnya. Beberapa faktor pribadi ada yang agak tetap sepanjang hidup seseorang, sedangkan beberapa faktor lainnya sangat berhubungan dengan masa-masa perkembangan dalam lingkungan hidupnya. Suwarno (1986: 39) mengungkapkan bahwa dalam kaitannya dengan migrasi faktor-faktor pribadi seperti sikap yang tertutup dan terpaku pada lokal tempat hidupnya (*localism attitude*) dan sikap yang menyenangi terhadap adanya perubahan-perubahan (*attitude toward change*) merupakan ubahan antara dalam proses migrasi.

Penjelasan mekanisme migrasi terkait dalam konsep pengambilan keputusan seseorang untuk pindah atau tetap tinggal di daerahnya dijelaskan oleh Mantra bahwa; para pakar demografi Mabogunje, 1970; Hugo, 1975; telah sependapat bahwa keputusan seseorang melakukan perpindahan dapat dilihat sebagai reaksi dari stres karena kebutuhan atau aspirasinya yang tidak terpenuhi di daerah asal. Lebih jauh dikemukakan bahwa stres merupakan aktivitas kejiwaan yang datang dari faktor luar atau faktor dalam yang mempengaruhi keputusan terhadap kebutuhan dasar atau yang mengganggu stabilitas keseimbangan (Mantra, 1987:140). Maslow, mengelompokkan kebutuhan dasar manusia dalam lima tingkatan (*live hierarchy of needs*) yang pemenuhannya secara bertahap, yakni: (1) Kebutuhan fisik atau biologis (*physiological needs*), (2) kebutuhan rasa tenang atau aman (*safety needs*), (3) kebutuhan rasa saling memiliki dan kasih sayang (*belongingness and love needs*), (4) kebutuhan harga diri

(*esteem needs*). (5) kebutuhan untuk mengaktualisasi diri (*needs for self-actualization*).

Dalam hubungan ini perlu dikemukakan bahwa yang mendorong untuk migrasi itu bukan faktor-faktor nyata yang terdapat di tempat asal dan tempat tujuan, tetapi persepsi seseorang terhadap faktor-faktor itu. Kepekaan pribadi, kecerdasan, kesadaran tentang kondisi di lain tempat mempengaruhi evaluasinya tentang keadaan di tempat asal; pengetahuan tentang keadaan di tempat tujuan tergantung pada hubungan-hubungan seseorang atau berbagai sumber informasi yang tidak tersedia secara umum. Lagi pula ada orang yang gigih menolak perubahan-perubahan, perubahan tempat tinggal maupun perubahan lainnya, ada pula orang yang menyambut dengan gembira perubahan itu. Untuk beberapa orang, harus ada alasan yang benar-benar memaksa untuk bermigrasi, sedang untuk orang lain dorongan sedikit saja atau janji sudah cukup.

Karena itu keputusan untuk migrasi tidak pernah seluruhnya rasional dan untuk sejumlah orang unsur-unsur motivasi yang rasional jauh lebih sedikit dari pada yang tidak rasional. Oleh sebab itu kita akan menemukan banyak pengecualian dari generalisasi yang kita kemukakan, karena selintas emosi, gangguan jiwa dan peristiwa-peristiwa tertentu yang terjadi menjadi sebab sebagian besar dari migrasi. Namun demikian semuanya itu akan kembali pada keputusan pribadi apakah ia akan bermigrasi atau tidak.

Lee menjelaskan bahwa berkaitan dengan arus dan arus balik ini paling tidak ada 6 hal yang penting dan perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) Migrasi pada umumnya cenderung mengikuti arus yang teratur.
- 2) Setiap arus migrasi yang besar menimbulkan arus balik.
- 3) Efisiensi arus (perbandingan arus terhadap arus balik atau redistribusi netto penduduk yang terjadi karena arus berlawanan) itu tinggi jika faktor-faktor yang menyebabkan arus migrasi sebagian besar merupakan faktor-faktor negatif di tempat asal.
- 4) Efisiensi arus dan arus balik cenderung menjadi rendah jika faktor-faktor di tempat asal dan tempat tujuan sama.
- 5) Efisiensi arus-arus migrasi akan menjadi tinggi jika faktor-faktor penghalang-antara besar.
- 6) Efisiensi arus migrasi itu berbanding dengan kondisi-kondisi ekonomi, ialah meningkat pada masa makmur dan menurun pada masa depresi (Lee, dalam Daeng dan Mantra, 1987: 14-19).

### C. Kritik Teori Migrasi Lee

Hasil penelitian Lee, pada satu sisi penelitian ini melihat migrasi hanya sebatas data angka-angka yang kebanyakan diambil dari data-data sensus, yang sifatnya kuantitatif, meskipun bagi aliran kuantitatif data-data sensus sudah dianggap valid, dan tidak diperlukan pengecekan data di lapangan. Padahal bagi aliran kualitatif melihat bahwa data-data angka dari hasil sensus, perlu diadakan pengecekan data di lapangan, hal ini dilakukan untuk menjaga validitas data, oleh karena itu penelitian yang hanya mengandalkan data sensus dan tidak diadakan pengecekan data di lapangan maka ini suatu kelemahan metode kuantitatif.

Pada sisi yang lain, penelitian kuantitatif seperti penelitian migrasi oleh Lee ini hanya menjelaskan fenomena objektif (material) dan tidak sampai memahami fenomena subjektif (non material) yaitu makna migrasi. Pusat perhatiannya hanya pada hubungan kausal dan tidak sampai pada alasan di balik tindakan. Paradigmanya sebatas pada positivisme dan sangat mengabaikan interpretivisme.

Kritik berikutnya pada kesimpulan bahwa; Penelitian Lee ini belum sampai pada kajian sosiologis dan mengabaikan dorongan sosiologis, barangkali karena memang penelitian Lee ini dirancang hanya akan melihat dorongan utama bermigrasi yakni dorongan ekonomi. Padahal motif ekonomi dan dorongan sosiologi orang melakukan migrasi sangat erat kaitannya, bahkan secara ekstrim keduanya tidak bisa dipisahkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian migrasi Lee belum sampai pada kajian sosiologis, dengan kata lain belum sampai pada tataran makna.

Kritik teori migrasi Lee juga disampaikan oleh Amin, dalam Mc Gee, 1977, dalam Abu-Lughod dan Hay, 1977, dalam Sutomo (1993: 24). bahwa, model tersebut menggunakan asumsi ekonomi rasional di mana keputusan migrasi diambil dengan dasar pengetahuan yang cukup tentang dua buah ubahan, yakni; kesenjangan pendapatan yang diperoleh pekerja di kota. Sedangkan kenyataan secara regional di Asia Tenggara menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan orang yang pindah ke kota dua-kali lipat dari tingkat pertumbuhan penduduknya, dan sesampainya di kota kebanyakan dari mereka hidup dalam keadaan kemiskinan dan kesengsaraan; sekalipun demikian terus berlangsung proses perpindahan.

Pendapat yang demikian ini juga ditunjang oleh beberapa penelitian lokal, di antaranya Mantra (1981: 163) yang mengungkapkan bahwa; pengambilan keputusan untuk migrasi sering berbentuk serial yang terkait dengan situasi yang memungkinkan, terutama untuk tipologi migran berantai dimana seseorang yang telah berhasil di tempat tujuan kemudian menarik sanak-famili atau teman-temannya yang masih tinggal di daerah asal. Hal ini sesuai dengan temuan Harre, dalam Sutomo, (1993: 25) terhadap penelitiannya di Pulau Pitcairn, Selandia Baru, dijelaskan bahwa penelitian Lee sangat “deskriptif dan mengabaikan penjelasan”.

Dari uraian tersebut di atas jelas bahwa penelitian Lee tentang migrasi sangat kuantitatif, dan hanya dilihat sebagai realitas objektif, padahal fenomena migrasi tidak bisa lepas dengan realitas subjektif. Fenomena migrasi ada sesuatu yang tersembunyi dibalik realitas objektifitu yaitu makna, makna migrasi ini yang belum dikaji oleh Lee. Oleh karena itu untuk menutupi kelemahan yang ada maka penelitian mobilitas penduduk dan penelitian TKI ini dilihat dari realitas subjektif, perspektif yang digunakan adalah perspektif fenomenologi.

#### **D. Teori–Teori Migrasi Desa-Kota**

Beberapa pandangan tentang migrasi desa-kota mula-mula berlandaskan beberapa hipotesis yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Migrasi merupakan penyebab utama peningkatan jumlah penduduk perkotaan serta peningkatan yang cepat kemiskinan di perkotaan.
2. Mayoritas mereka yang hidup di perkampungan (*slums*) dan pemukiman liar (*squatter settlements*) adalah para migran.
3. Sebagian besar dari para migran adalah miskin atau tidak mampu penduduk asal perkotaan.
4. Aliran perpindahan para migran ke daerah perkotaan berasal terutama dari daerah pedesaan.
5. Para migran yang terpaksa meninggalkan daerah pedesaan karena kemiskinan dan pengangguran di desa, biasanya menuju ke arah perkotaan.
6. Perbaikan keadaan di desa akan mengurangi arus migrasi desa-kota.
7. Program-program pembangunan yang dilaksanakan dipedesaan akan memperbaiki kondisi pedesaan dan dengan demikian akan mengurangi migrasi desa-kota (Pardoko, 1987: 17).

Selanjutnya Pardoko menjelaskan bahwa: beberapa bukti dari pandangan tersebut ternyata kurang sesuai. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa pertumbuhan alamiah penduduk kota merupakan 60 % dari pertumbuhan kota dan para migran merupakan minoritas dari mereka yang hidup di *slums*. Selain itu dinyatakan pula bahwa para migran tidaklah semiskin yang diperkirakan serta hampir sama mempunyai dengan penduduk asli perkotaan. Di beberapa daerah lain dilihat bahwa jumlah migran ke kota yang berasal dari kota lain cukup besar, sehingga tidak selalu datang dari pedesaan. Perserikatan Bangsa-Bangsa memproyeksikan bahwa volume migrasi ke kota-kota akan merupakan proporsi sekitar kurang dari 25% dari pertumbuhan kota-kota di Amerika Latin dan sekitar kurang dari 40% dari pertumbuhan kota-kota di kawasan Asia. Karena perubahan batas-batas administratif, maka daerah-daerah pedesaan menjadi perkotaan, menyebabkan semakin banyak penduduk pedesaan termasuk klasifikasi penduduk "kota" (urban).

Arus migrasi pedesaan yang satu ke daerah pedesaan yang lain juga dapat terjadi yaitu di beberapa tempat di Afrika. Arus migrasi dari daerah perkotaan kembali ke daerah pedesaan yang biasa kita sebut sebagai migrasi balik (*return migration*) terjadi di Colombia.

Untuk lebih jelasnya kaitan antara berbagai faktor yang mempengaruhi migrasi desa-kota, mungkin model pada Diagram 2. I dapat kita pakai. Program-program pembangunan pedesaan yang efektif dapat diharapkan menaikkan produksi pedesaan yang akan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Ini merupakan sebagian daya tarik pedesaan. Jika pembangunan pedesaan berhasil, hal ini akan meningkatkan permintaan akan barang-barang hasil produksi kota (alat-alat pertanian dan sebagainya) secara bahan-bahan masukan pertanian (pupuk dan sebagainya). Permintaan yang timbul ini akan meningkatkan kesempatan-kesempatan kerja di kota dan meningkatkan kegiatan-kegiatan ekonomi di kota (perdagangan, jasa dan industri) yang sekaligus berperan sebagai daya tarik perkotaan bagi orang-orang pedesaan.

Pada dua bentuk daya tarik antara desa dan kota tersebut bekerja berbagai faktor yang mempengaruhi. Daya tarik pedesaan ini diperkuat dengan tersedianya sarana dan prasarana transportasi dan lebih mudahnya perhubungan fisik, antara lain jalan yang baik, jembatan dan sebagainya. Daya tarik perkotaan banyak dipengaruhi oleh hambatan-hambatan fisik

dan sosio-budaya (pandangan tradisional, sikap dan aspirasi "modern", akreditasi kemampuan dan bahasa dan sebagainya) yang dapat diatasi dengan pembangunan desa itu sendiri. Faktor "tekanan tanah garapan" akan berperan kuat jika tidak ada pembangunan desa. Pardoko kemudian menjelaskan, dari model ini mungkin dapat ditemukan berbagai intervensi yang efektif untuk mempengaruhi migrasi antara desa dan kota. Terutama peranan pembangunan desa yang kini banyak dilaksanakan oleh negara-negara sedang berkembang akan mempengaruhi faktor-faktor tersebut.

#### **E. Teori-teori lain tentang Mobilitas Penduduk**

Mobilitas memiliki banyak bentuk sehingga definisi diskriptif agak sulit ditentukan. Menurut Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN (1998). Mobilitas penduduk adalah gerak ke ruangan penduduk dengan melewati batas administrasi daerah tingkat II. Mangalam, dalam Standing (1991) menyebutkan adanya unsur waktu yakni perubahan tempat tinggal dengan melewati batas-batas wilayah yang telah ditetapkan sebelumnya selama satu atau dua tahun. Sedangkan Hugo, dalam Salladien 1999 menetapkan waktu enam bulan.

Menurut Ross, migrasi termasuk perpindahan kerumah sebelah yang berjarak beberapa meter dari rumah lama, tetapi juga mencakup perpindahan dari suatu negara ke negara lain yang berjarak beribu-ribu kilometer. Migrasi juga menyangkut perpindahan dalam periode waktu beberapa jam saja di daerah tujuan, tetapi juga menyangkut perpindahan sampai akhir hayat. Sedangkan Zelinsky (1971), menyatakan bahwa migrasi merupakan sebuah transaksi fisik dan sosial, sehingga tidak sekedar merupakan peristiwa biologis, oleh karenanya tidak menutup kemungkinan bahwa migrasi ini merupakan peristiwa yang berulang-ulang sepanjang hidup seseorang. Selanjutnya Rusli (1982) menjelaskan bahwa migrasi adalah suatu gerak penduduk geografis yang melibatkan perubahan tempat tinggal, yaitu dari tempat asal ke tempat tujuan.

Migrasi sebagai mobilitas penduduk dapat dibagi dua, yaitu mobilitas penduduk permanen dan mobilitas penduduk tidak permanen. Mobilitas penduduk permanen merupakan gerak penduduk yang melintasi batas desa dalam periode atau kurun waktu enam bulan atau lebih dengan maksud untuk menetap di daerah tujuan. Sedangkan mobilitas tidak permanen

merupakan bentuk mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain dengan tidak ada maksud untuk menetap di daerah tujuan. Menurut Naim mobilitas tidak permanen merupakan mekanisme yang mengatur keseimbangan *equilibrial* antara kemampuan daya dukung ekologis dan daerahnya dengan perkembangan penduduk dalam arti di daerah-daerah yang berpenduduk padat dan kemampuan daya dukung dari tanah terbatas maka di sana tingkat dan intensitas migrasi tidak permanen tinggi.

Bentuk-bentuk mobilitas penduduk menurut Mantra (1981), meliputi Nglaju, Sirkulasi, dan Migrasi. Yang dimaksud nglaju (ulang-alik atau komutasi) adalah mobilitas penduduk dari desa ke kota atau tempat lain dan kembali ketempat asal pada hari yang sama, dalam hal ini Hugo (1975) memberi batasan desa sebagai wilayah dan tidak menetapkan batas waktu minimum meninggalkan desa. Sedangkan yang dimaksud sirkulasi adalah mobilitas penduduk ke kota atau ke daerah lain dalam jangka waktu lebih satu hari, atau kurang dari satu tahun tetapi tidak ada niat untuk menetap di daerah tujuan, dalam hal ini Standing (1985) menjelaskan bahwa sirkulasi merupakan perpindahan jangka pendek yang berulang kali tanpa ada maksud untuk mengubah tempat tinggal secara permanen atau jangka panjang. Sirkulasi ini berbeda dengan nglaju, karena kepergiannya dari rumah melebihi hari kerja yang penuh dan tidak pada jam-jam kerja saja. Sedangkan yang dimaksud dengan Migrasi adalah perpindahan penduduk ke kota atau daerah lain dengan maksud untuk bertempat tinggal menetap di daerah tujuan.

Dikemukakan pula oleh Amien (1984), bahwa mobilitas penduduk dapat diartikan sebagai pergerakan dari satu daerah ke daerah lain, baik untuk sementara maupun untuk jangka waktu yang lama atau menetap, seperti mobilitas sirkuler, mobilitas ulang-alik (komunitas), migrasi dan sebagainya. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang memutuskan melakukan mobilitas, secara umum ada dua hal yakni seperti yang ditulis oleh Razi Munir dalam Salladien (1996), yaitu adanya faktor pendorong dan faktor penarik.

Yang termasuk faktor-faktor pendorong misalnya: (1) Makin berkurangnya sumber-sumber alam (2) Menurunnya permintaan atas barang-barang tertentu yang bahan bakunya makin susah diperoleh seperti hasil tambang, kayu atau bahan dari pertanian (3) Menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal akibat masuknya teknologi yang menggunakan

mesin (4) Adanya tekanan-tekanan atau diskriminasi politik, agama, suku di daerah asal (5) Tidak cocok lagi dengan adat, budaya, kepercayaan di tempat asal (6) Alasan pekerjaan atau perkawinan yang menyebabkan tidak bisa mengembangkan karir pribadi (7) Bencana alam, banjir, kebakaran, gempa bumi, musim kemarau panjang atau adanya wabah penyakit.

Sedangkan yang termasuk faktor penarik antara lain (1) Adanya rasa superior di tempat yang baru atau kesempatan untuk memasuki lapangan pekerjaan yang cocok (2) Kesempatan mendapatkan pendapatan yang lebih baik (3) Kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi (4) Keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan, misalnya: iklim, perumahan, sekolah dan fasilitas-fasilitas kemasyarakatan lainnya (5) Tarikan dari orang yang diharapkan sebagai tempat berlindung (6) Adanya aktivitas-aktivitas di kota besar, tempat-tempat hiburan, pusat kebudayaan sebagai daya tarik bagi orang-orang dari desa atau kota kecil.

Di sisi lain, lahan pertanian yang semakin menciut akibat perkembangan perumahan menjadi masalah tersendiri bagi angkatan kerja di bidang pertanian (baca pedesaan). Sekitar 70.000 hektar lahan sawah, termasuk sawah tadah hujan di Jawa dalam periode 1980-1990 berubah fungsi lahan pemukiman dan sasaran lainnya. Luas lahan pertanian di Jawa yang semula 3,490 juta hektar telah menyusut menjadi 3,420 hektar pada periode tersebut (Muljana, 1995: 4). Beberapa penelitian mikro mengungkapkan rata-rata pemilikan lahan pertanian di desa yang ternyata sangat sempit berkisar 0,09-0,32 hektar per kepala keluarga. Keterbatasan pemilikan lahan merupakan faktor penyebab utama semakin banyaknya petani yang “terhempas” dari sektor primer (Hadisupadmo, 1991: 4).

Sementara itu, daerah perkotaan relatif memiliki daya tarik berupa potensi kemudahan yang diciptakan oleh keberlangsungan pembangunan. Analisis sensus penduduk 1990 mengungkapkan bahwa kesempatan kerja di sektor tertier daerah perkotaan mencapai hampir tiga kali lipat dari sektor manufaktur atau sektor sekunder. Pekerja di sektor tertier mencapai 11.915 ribu, sedang sektor sekunder hanya 4.319 ribu (Sutomo, 1993: 4).

Ketimpangan tersebut menunjukkan adanya perbedaan dalam model perkembangan yang dialami negara Barat pada tahap awal pembangunan mereka. Menurut Lewis, Fei, dan Ranin, pengalaman historis pertumbuhan ekonomi di Barat memperlihatkan bahwa tingkat mobilitas tenaga kerja

dari desa ke kota dan penciptaan kesempatan sektor modern di perkotaan berjalan proporsional dengan tingkat akumulasi modal yang diinvestasikan dalam pembangunan industri. Semakin cepat tingkat akumulasi modal semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan sektor modern dan pada gilirannya mempercepat penciptaan kesempatan kerja yang baru. Sektor sekunder yang banyak dibangun di kota menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi dan mampu menyerap kelebihan tenaga kerja (*labour surplus*) yang berpindah dari daerah pedesaan ke kota.

#### **F. Mobilitas TKI (Tenaga Kerja Indonesia) Efeknya terhadap Pembangunan Desa**

Mobilitas tenaga kerja dapat dipandang sebagai perpindahan antar sektor pekerjaan maupun perpindahan tempat bekerja antar daerah. Perpindahan antar sektor biasanya diikuti dengan perpindahan tempat kerja. Dari kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa mobilitas tenaga kerja tidak dapat dilepaskan dari masalah migrasi. Masalah migrasi merupakan permasalahan kependudukan yang belum terselesaikan secara tuntas karena faktor yang mempengaruhi sangat kompleks. Migrasi pada satu sisi dapat secara langsung mempengaruhi distribusi antar daerah, komposisi penduduk antar usia maupun pada pasar tenaga kerja, pada sisi yang lain banyak ahli demografi yang berpendapat bahwa motif ekonomi merupakan motivasi utama bagi penduduk untuk melakukan migrasi. Motif ini berkembang karena adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi antar daerah. Harapan penduduk melakukan migrasi adalah untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih tinggi dibanding dengan pendapatan di daerah asal (Salladien, 1999: 1).

Pada satu sisi, dalam menjelaskan hubungan mobilitas penduduk dengan pembangunan di pedesaan ada dua pandangan utama yang berbeda yaitu *neo-classical economics equilibrium perspective* dan *historical structuralist perspective* (Saefullah, dalam Prisma, 10 Oktober, 1995: 23). Lebih lanjut Saefullah menjelaskan bahwa berdasarkan *neo-classical economic equilibrium perspective*, mobilitas penduduk merupakan mekanisme untuk mencari keseimbangan antara daerah yang sedikit fasilitas sosial-ekonominya dengan daerah yang banyak fasilitas sosial-ekonominya. Dengan kata lain, mobilitas penduduk berperan sebagai penyeimbang *human capital* dari daerah-daerah yang kelebihan tenaga

kerja tetapi kekurangan modal. Dalam jangka panjang, mobilitas penduduk mempunyai efek positif terhadap proses pembangunan, karena ketidakmerataan regional akan dapat diseimbangkan melalui *human capital* dari gerak perpindahan penduduk.

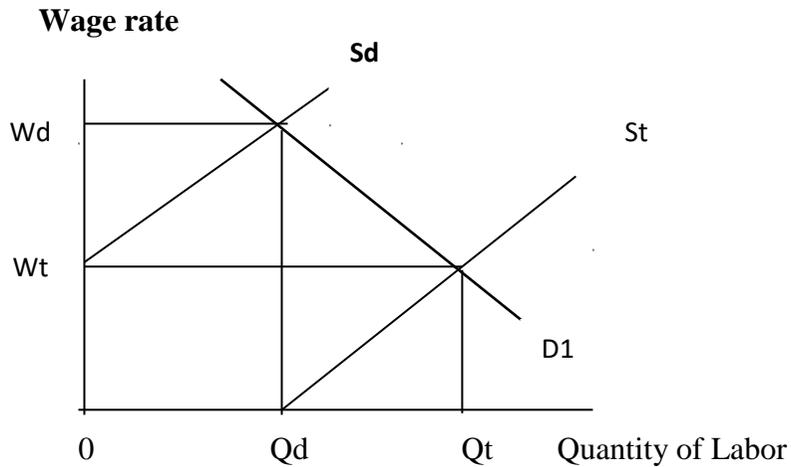
Berbeda dengan *neo-classical economics equilibrium*, penganut *historical structuralist* menurut Saefullah penduduk hanya dapat dipahami dengan baik apabila dilihat pula hubungannya dengan perubahan sosial-ekonomi dan sosial-politik secara menyeluruh. Berdasarkan pandangan ini, mobilitas penduduk lebih banyak mempunyai efek negatif terhadap proses pembangunan. Sumber daya manusia yang potensial dan fasilitas modal yang baik akan terkonsentrasi pada daerah tertentu sehingga terjadi ketimpangan antar daerah serta menimbulkan masalah sosial dan ekonomi baik di daerah asal maupun di daerah tujuan.

Pada sisi yang lain, dengan adanya migrasi dan mobilitas tenaga kerja itu juga akan menimbulkan efek positif maupun negatif bagi masyarakat pedesaan. Efek positif meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian, karena pada awalnya sektor ini banyak mengandung pengangguran tak kentara (*disquised unemployment*) yang mengakibatkan rendahnya produktivitas tenaga kerja. Dengan pindahnya tenaga kerja desa-kota akan mengurangi *disquised unemployment* dan meningkatnya produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian.

Sedangkan efek negatif adalah terjadinya masalah konsumerisme di masyarakat pedesaan, hal ini merupakan pengaruh langsung dari pola hidup kota yang dibawa migran pulang ke desa. Karena terpengaruh pada konsumerisme maka kebutuhan hidup bertambah pesat pada satu sisi dan penghasilan masyarakat desa tetap pada sisi yang lain, karena lahan pertaniannya tetap bahkan cenderung menyempit akibatnya terjadi eksploitasi besar-besaran terhadap sumber alam yang terbatas.

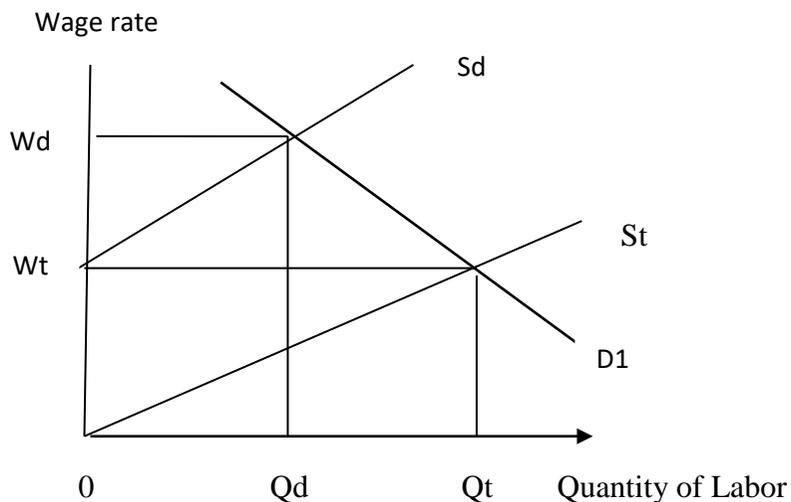
Dari sudut pandang ekonomi, mobilitas penduduk memiliki efek:

1. *Employment effects*, hal ini timbul karena banyaknya tenaga kerja yang pindah akan mengakibatkan kurva *supply of labor* bergeser ke kiri atas (berkurang). Dengan kurva *demand* yang tetap dan *supply* bergeser tersebut akibatnya jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan juga berkurang sebagaimana gambar di bawah ini.



Mula-mula *demand of labor* adalah D1 dan *supply of labor* adalah St sehingga jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sebanyak Qt. Setelah ada perpindahan tenaga kerja ke kota *supply of labor* geser menjadi Sd sedangkan *demandnya* tetap, akibatnya jumlah labor yang dibutuhkan menjadi Qd (turun sebesar Qd. Qt).

2. *Wage effects* yaitu efek tingkat upah. Perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian di desa ke kota dapat mengakibatkan naiknya tingkat upah di sektor pertanian pedesaan. Hal ini disebabkan semakin sedikitnya *supply* tenaga kerja di sektor pertanian.



Mula-mula demand of labor adalah  $D_1$  dan supply of labor adalah  $S_1$  sehingga tingkat upah adalah  $W_1$ . Setelah ada perpindahan tenaga kerja ke kota supply of labor geser menjadi  $S_2$  sedangkan demandnya tetap, akibatnya jumlah labor yang dibutuhkan menjadi  $Q_2$  dan tingkat upah naik menjadi  $W_2$  terjadi kenaikan upah sebesar  $W_2 - W_1$  (Stanley, dalam Salladien, 1999: 6)

Dari uraian singkat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa motif utama perpindahan tenaga kerja potensial dari desa ke kota adalah motif ekonomi yaitu untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik. Perpindahan tenaga kerja tersebut mempunyai efek sosial antara lain; terjadinya konsumerisme, eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya yang terbatas, kerusakan lingkungan, menurunnya nilai sosial.

Sedangkan efek ekonomi adalah menurunnya jumlah penawaran tenaga kerja dan meningkatnya tingkat upah tenaga kerja di sektor pertanian. Efek positif yang lain dari perpindahan tenaga kerja pedesaan adalah meningkatnya produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian.

## Daftar Pustaka

- Abu-Loghod and Richard Hay Jr. (eds.). *Strid World Urbanization*. London: Longman.
- Amien, M. 1984. *Mobilitas Penduduk Pedesaan di Daerah Tingkat II Kabupaten Semarang dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Pendapatan*, Yogyakarta: Disertasi UGM.
- Hugo, Graeme, J. 1975. *Population Mobility in West Jawa, Indonesia*, Ph.D. Dissertation. Departement of Demography. The Australia National University. Canberra (Unpublished).
- Lee, E. S. 1966. *A Theory of Migratio*. Demography 3 (1) 47-57. Alexandria: Population Association of America.
- . 1984. *Teori migrasi*. Seri Terjemahan No. 3. Yogjakarta: Pusat Peneitian Kependudukan. Universitas Gajah Mada.
- . 1992. *Teori Migrasi*. Seri Terjemahan di Terjemahkan oleh Hans Daeng, ditinjau Kembali oleh Ida Bagus Mantra, Yogyakarta, Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gajah Mada.
- Mabogunje, A.L. 1970. *System Approach to a Theory of Rural-Urban Migration*. Geography Analysis.
- Mantra, I. B. 1981. *Population Mobility in West Java*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- dan Sumantri. 1988. *Migrasi Penduduk Aceh Berdasarkan Data Supas 1985*. Jakarta: Kerjasama LDFE Universitas Syah Kuala dan Kantor Menteri Negara KLH.
- Pardoko R.H. 1987. *Mobilitas Migrasi dan Urbanisasi*. Bandung: Angkasa.
- Ross, J. L. 1997. *Controlling State Crime. An Introduction.*, dalam *The Journal of Conflict Studies*, Journal of The Centre for Conflict Studies University of New Brunswick, Spring.
- Salladien. 1999. *Perpindahan Tenaga Kerja Potensial Serta Dampaknya di Sekitar Pertanian*. Malang: Media Center Fakultas Pendidikan IPS. IKIP Malang.

- Standing Guy. 1981. *Migration and the Labor Process for Migration Survey*. Geneva International Labor Office.
- Sutomo, H. 1993. *Hubungan Antara Mobilitas Horizontal dan Mobilitas Vertikal Migran Sirkuler Sektor Informal di Kota Wonosobo dan Cilacap*. Yogyakarta: Disertasi, UGM.
- Suwarno, B., dkk. 1986. *Migrasi Penduduk Desa-Kota dan Kesempatan Kerja*. Survey di Tiga Kota Sumatera Utara. *Majalah Demografi Indonesia*, 13(25) Juni. Jakarta: LD-FE,UI.
- Temple, P. G. 1974. *Migration to Jakarta: Empirical Search for A Theory*, University of Wisconsin.
- Zelinsky W. 1971. *The Hypothesis of Mobility Transition*, *Geographical Review*, 61:221-249, Yogyakarta: Faculty of Geography. Gajah Mada University.

## **BAB IV**

### **PENDEKATAN FENOMENOLOGI**

#### **A. Perkembangan Fenomenologi**

Dalam perkembangannya perspektif ini dikenal sebagai teori kefilosofatan yang di gulirkan oleh Hegel, Husserl, Sheller, Schutz, dan kemudian Berger. Namun dengan pemikiran-pemikiran Weber dalam pengembangan teori sosial yang berorientasi pada paradigma definisi sosial, akhirnya pendekatan ini banyak digunakan sebagai alat analisis terhadap fenomena sosial (Gordon, 1991: 438-491).

Muhadjir memberikan komentar bahwa pendekatan fenomenologi mengakui adanya kebenaran “empirik etik” yang memerlukan akalbudi untuk melacak dan menjelaskan serta berargumentasi. Akalbudi disini mengandung makna bahwa kita perlu menggunakan kriteria lebih tinggi lagi dari sekedar *truth or false* (benar atau salah)(Muhadjir, 1996: 83). Nilai moral yang digunakan pendekatan ini tidak terbatas pada nilai moral tunggal yaitu *truth or false*. Tetapi nilai moral yang digunakan pada pendekatan ini mengacu pada nilai moral ganda yang herarkik yang berarti ada kebermaknaan tindakan.

##### **1. Perkembangan Fenomenologi Hegel Sampai Berger**

Perkembangan fenomenologi dari Hegel sampai dengan Berger, bahwa; Fenomenologi pada masa Hegel, telah dikedepankan konsep tese dan antitese yang dapat menghasilkan sintese. Konsep ini merupakan gerakan dari yang tidak ada menuju yang ada (Hadiwiyono, 1980: 101-102). Dalam perkembangannya fenomenologi sebagai suatu pendekatan filsafat oleh Husserl menempatkan sebagai metode pengkajian untuk mengenali, menjelaskan dan menafsirkan pengalaman indrawi dan makna untuk mengenali apa yang dialami. Dalam posisi semacam ini Husserl menganjurkan peneliti melakukan observasi partisipan agar dapat mengetahui secara pasti apa yang dialami orang lain. Hal ini berarti fenomenologi Husserl terfokus pada logika yang merujuk pada “makna” untuk mengenali apa yang dialami. Oleh

karena itu Husserl menganjurkan peneliti melakukan observasi partisipatif agar dapat mengetahui secara pasti apa yang dialami orang lain.

Menurut Husserl bahwa suatu fenomena yang tampak sebenarnya merupakan refleksi yang tidak berdiri sendiri, karena yang tampak adalah sebagai objek penuh dengan makna yang transendental. Maka untuk bisa memahami makna haruslah mampu menerobor sesuatu di balik sesuatu yang nampak tersebut (Waters, 1994: 31). Oleh karena itu penggunaan fenomenologi menurut Husserl adalah harus kembali kepada “data” dan tidak kepada “pemikiran”. Sumbernya adalah apa yang ada pada halnya sendiri atau yang menampakkan dirinya sendiri. Bagi Husserl hasil pengetahuan sejati bukan rekayasa pikiran untuk membentuk teori, melainkan kehadiran data dalam kesadaran budi.

Berbeda dengan fenomenologi Sheller yang memberikan penekanan pada hakikat. Dia mengajarkan agar peneliti melakukan “penilikan hakikat” dengan menggunakan pengertian nilai dan pribadi. Penekanan fenomenologi Sheller terletak pada perhatiannya kepada manusia, sehingga menjadikan “kasih” sebagai dasar ajarannya. Kasih itu bukan perasaan melainkan “pribadi”. Dengan demikian penelitian yang diarahkan pada manusia harus mampu melihat apa yang ada di balik nilai yang ada tersebut sebagai gambaran pribadi (Hadiwiyono, 1980: 146).

Perkembangan fenomenologi selanjutnya dikembangkan oleh Schutz yang tertarik pada pemikiran Weber tentang tindakan sosialnya dan memadukan antara fenomenologi transendental milik Husserl dengan *verstehen* tindakan sosial milik Weber (Collin, 1997: 111). Aliran fenomenologi yang dikedepankan oleh Schutz mengajarkan bahwa setiap individu hadir dalam arus kesadaran yang diperoleh dari proses refleksi atas pengalaman sehari-hari (Campbell, 1994: 234) Pendekatan yang dikembangkan Schutz berusaha memasuki konsep para subjek penelitian sampai memahami apa dan bagaimana pengertian mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupannya sehari-hari. Konsep Schutz ini dipengaruhi teori aksi Weber yang menjelaskan bahwa sesuatu itu memiliki kebermaknaan secara subjektif (Collin, 1997: 110).

Berikutnya jika konsep fenomenologi Husserl bertitiktolak pada fenomena transendental, maka fenomenologi Schutz mencoba

menyandingkannya dengan konsep *verstehen* dari Weber. Menurut Schutz dunia sosial merupakan sesuatu yang *intersubjektif* dan pengalaman yang penuh makna (*meaningfull*). Konsep fenomenologi Schutz bertolak pada makna tindakan. Dalam hal ini makna tindakan identik dengan motif yang mendasari tindakan tersebut yang dikenal dengan istilah *in order to motive* (motif supaya). Konsep ini mengajarkan bahwa untuk bisa memahami makna tindakan seseorang peneliti harus melihat motif apa yang mendasari tindakan itu. Dengan demikian makna tindakan subjektif dapat dikaji dari motif pelakunya sendiri dengan melalui ungkapan subjeknya sendiri. Kemudian Schutz mengembangkannya dengan melengkapi suatu konteks yang disebut dengan *because motive* (motif karena). Di sini Schutz mengkaji makna subjektif dengan konsep hubungan sebab akibat sehingga benar-benar memenuhi motif asli yang mendasari tindakan individu (Waters, 1994: 33).

Berbeda dengan Berger, yang mencoba mengembangkan fenomenologi dengan terlebih dahulu mengkritisi konsep pendahulunya. Fenomenologi Berger banyak diwarnai oleh konsep “hakikat makna” dari Schutz. Namun Berger mengembangkan fenomenologi sebagai metodologi penelitian dengan melakukan sintesa dari berbagai konsep tentang manusia dan lingkungan sosial. Berger menilai karya pendahulu bersifat konduktif menuju pada ilmu empiris belum mampu mendekati permasalahan dengan karakter apa adanya. Berger menyoroti konsep Husserl mengenai “fenomena murni” sebagai akar dari idealisme intelektual belaka yang pada dasarnya telah menghindari adanya realitas secara empiris yang dilakukan secara bersama.

Dalam hal ini Berger menawarkan pendekatan *first order understanding* (meminta peneliti untuk menanyakan kepada pihak yang diteliti guna mendapatkan penjelasan yang benar), dan kemudian dilanjutkan dengan *second order understanding* (dalam hal ini peneliti memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap interpretasi itu sampai memperoleh suatu makna yang baru dan benar) (Santoso, 2002: 12). Hal ini tentu berbeda dengan paradigma fakta sosial yang bergerak pada kajian makro dan menempatkan peran pranata sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan sangat dominan dalam mempengaruhi perilaku manusia.

## 2. Alasan dari Makna Tindakan

Dalam perkembangan teori ilmu sosial, perspektif fenomenologi sebagai pendekatan dikenal sebagai cikal bakal dari teori konstruksi sosial, menurut Collin (1997) bahwa; sejumlah alasan untuk status konstruksi sosial didasarkan pengamatan bahwa “aksi/tindakan diilhami dari makna subjektif”. Menurut Collin, bahwa; Aksi tidak hanya perilaku, tidak hanya sekedar gerakan tubuh, tetapi memiliki suatu *inside* “kedalaman” yang terdiri dari proses mental pelakunya. Kedalaman memberikan esensi individual pada setiap aksi tertentu. Dalam hal ini doktrin “*meaningfulness of action*” mengasumsikan karakter tesis seorang konstruktivis sosial. Jika peneliti menyamakan “*meaning*” dengan pikiran dan penilaian atau setidaknya tidaknya jaminan bahwa pikiran dan penilaian itu contoh dari “*meaning*” maka peneliti harus berkesimpulan bahwa pikiran manusia membawa realitas sosial ke dalam aksi manusia sebagai esensi yang sangat menentukan (Collin, 1997: 103).

Lebih lanjut Collin menjelaskan bahwa; seperti halnya pendapat Dilthey bahwa “Kami menjelaskan alam, tetapi kami memahami kehidupan mental”. Setelah Delthey, Weber mengatakan bahwa; “kita bisa membedakan antara tindakan luar yang asli (*verhalten*) gerakan tubuh, dengan tindakan bagian “dalam” dalam bentuk makna subjektif”. Schutz, juga menerima wawasan Weber, bahwa; “tidakan memiliki subjektivitas, sisi yang bernilai”. Dan Husserl menjelaskan bahwa, “fenomenologi tampaknya telah mengambil langkah yang penting dari seseorang subjektifis yang menggunakan metode penyelidikan filosofis”.

Analogi “kebermaknaan” tersebut di atas tak terkecuali dalam aksi mobilitas penduduk ini bukan hanya dilihat dari aspek materi tetapi dari aspek non materi, bukan dari aspek dampak tetapi dari aspek proses, bukan dari realitas objektif tetapi dari realitas subjektif, bukan dari perspektif positivistik tetapi dari perspektif fenomenologi. Aksi mobilitas penduduk juga diilhami makna subjektif, dan aksi *boro* ini tidak sekedar gerakan fisik (mobilitas fisik) tetapi juga memiliki sesuatu *inside* (bagian dalam) yaitu makna mobilitas penduduk. Fenomena yang akan dikaji dari aksi mobilitas penduduk adalah makna

social mobilitas penduduk. Ada makna sosial yang membuat mereka mobilitas?

### 3. Meaningfulness of Action menurut Wilhelm Dilthey

Ungkapan Collin bahwa “Perilaku manusia penuh makna karena dipengaruhi oleh pengalaman dan pemahaman. Pengalaman adalah dasar dan sumber perilaku manusia. Pengalaman terdiri dari kehidupan mental manusia yang bersifat subjektif. Konsepsi ini melihat perilaku manusia yang muncul dari dua sumber mental yang terpisah yakni kepercayaan dan keinginan. Pengalaman juga disebut sebagai sumber perilaku yang berasal dari pikiran dan keinginan yang menyatu. Dan ini disebut Dilthey sebagai kesatuan holistik dari kehidupan” (Collin, 1997: 104).

Sedangkan pemahaman, dianggap Dilthey sebagai pengalaman kembali (*reexperiencing*), penciptaan kembali (*recreating*) dan empati kembali (*emphathising*). Menurut Delthey, sebagaimana dikemukakan juga oleh pemikir fenomenologi yang dikutip oleh Santoso mengatakan bahwa peristiwa sejarah dapat dipahami dalam tiga proses, yaitu: (1) Memahami sudut pandang atau gagasan para pelaku asli (2) Memahami arti atau makna kegiatan-kegiatan mereka pada hal-hal yang secara langsung berhubungan dengan peristiwa sejarah (3) Menilai peristiwa-peristiwa tersebut berdasarkan gagasan yang berlaku pada saat sejarawan itu hidup. Proses (1) dan (2) merupakan *first order understanding* dan proses (3) merupakan *second order understanding* (Santoso, 2002: 12).

Mengikuti Dilthey, Weber menekankan bahwa ilmuwan boleh membedakan fenomena di luar perilaku manusia antara perilaku luar yang murni (gerakan badan), dan apa yang ada di dalam, dalam bentuk makna subyektif. Schutz (1972) menerima bahwa Weber berada pada jalur yang benar tetapi ada beberapa aspek problematika terhadap konsepsinya tentang aksi yang dianggap sebagai perilaku bermakna subjektif yang perlu disempurnakan sebagaimana diuraikan di muka. Uraian baru dari pendukung Schutz diberikan oleh Berger dan Lukman (1967). Dia memulai dari premis bahwa manusia mengkonstruksi realitas sosial dimana proses-proses subjektif dapat diobjektifkan. Dalam mengkontruksi realitas sosial itu diperlukan legitimasi dan

justifikasi, yakni bahwa dunia makna yang berbeda dan dilokalisir ini perlu diciptakan dan diadakan bersama-sama (Collin, 1997: 105-106).

## B. Argumen Fenomenologi

Argumen *fenomenologi* semata-mata menyatakan bahwa; manusia dan fakta (kenyataan) sosial terbentuk ketika perilaku manusia disatukan dengan makna (*meaning*) yang diperlihatkan oleh agen. Selain itu, makna tersebut membentuk fakta perilaku murni. Makna menciptakan tindakan dan berperan sebagai suatu komponen atau aspek. Makna adalah aspek tindakan “*inner*” (batin) yang bersatu dengan aspek tindakan “*eksternal*” untuk membentuk suatu kesatuan tindakan (Collin, 1997: 115). Makna ini hasil suatu fakta melebihi fakta tentang perilaku yang murni. Dengan cara ini, formula konstruktivis dipenuhi. Formula itu menentukan konstruktivisme sebagai posisi bahwa pikiran, keyakinan, manusia menciptakan fakta sosial.

Terkait dengan argumen fenomenologi yang direkonstruksi. Menurut Collin (1997), pembahasan tentang psikologisme yang menyatakan bahwa argumen fenomenologi diwarisi dari Weber dan Schutz. Memuat dua ketakutan atau keraguan, yaitu; Keraguan yang berkaitan dengan teori *eksplanasi* yang didukung oleh Weber dan Schutz, yang menegaskan bahwa eksplanasi dicapai oleh identifikasi atau ketetapan ulang yang bersifat subjektif. Keraguan lain berkaitan dengan implikasi ontologi argumen fenomenologi seperti yang dinyatakan oleh Schutz. Argumen ini nampak menyebabkan ilmuwan untuk memahami dualisme, karena argumen ini menggambarkan mental sebagai bidang yang terpisah.

### 1. Mungkinkah Fakta Sosial dibentuk oleh Makna?

Menurut Collin (1997: 121) “pandangan yang dibentuk oleh argumen *meaningfulness* kurang menarik dari pada pandangan yang dirancang oleh *broad argument* walau tidak mendapat dukungan. Tidaklah cukup bila dikatakan bahwa makna adalah kondisi yang seharusnya bagi fakta-fakta sosial. Makna-makna manusia hanyalah satu aspek dari fakta sosial, oleh karena itu menghasilkan fakta sosial yang bersamaan dengan aspek-aspek lain. Adapun aspek-aspek yang diperlukan untuk mencakup sisi aksi perilaku eksternal murni, yang khas dan bersifat fisik serta item-item lain yang membentuk setting dan topangan bagi perilaku itu sendiri”.

## 2. Ruang Lingkup Argumen Fenomenologi

Banyak pakar mendukung versi argumen fenomenologi yang sudah direkonstruksi dan menyimpulkan bahwa; "fakta-fakta sosial tertentu dimunculkan oleh makna-makna agen. Fakta bahwa konsep sosial mengandung arti eksistensi objektif dari suatu hal, dan kondisi-kondisi subjektif sebuah agen. Itu berarti konsep-konsep tersebut mempunyai implikasi-implikasi eksternal" (Collin, 1991: 131), dijelaskan; fakta sosial yang diwujudkan oleh makna itu sendiri menimbulkan keterbatasan, kebanyakan fenomena sosial terdiri dari berbagai sifat-sifat eksternal dan objektif. Makna mencakup pengakuan bahwa seseorang memiliki status khusus, dan hasil kajian menjelaskan bahwa kecenderungan di antara ilmuwan sosial mengabaikan implikasi eksternal itu.

Penjelasan ini, jika dikaitkan dengan aksi sosial mobilitas penduduk yang hendak dikaji yang berkaitan dengan makna dan yang dilihat sebagai realitas subjektif, maka perspektif fenomenologi sebagai suatu pendekatan metodologi, bukan hendak menampilkan teori dan konseptualisasi yang sekedar berisi anjuran atau imperatif, melainkan mengangkat makna etika dalam berteori dan berkonsep sebagaimana telah disinggung di muka.

## C. Kelebihan dan Kelemahan Fenomenologi

### 1. Kelebihan Fenomenologi

Kelebihan perspektif fenomenologi untuk menjelaskan mobilitas penduduk dari realitas subyektif adalah pada satu sisi awalnya fenomenologi sebagai metode penelitian sosial termasuk teori kefilosofatan, teori ini dikembangkan oleh Hegel, Husserl, Scheller, Schutz dan Berger. Pada sisi yang lain dengan kesungguhan Weber dalam mengembangkan teori sosial yang berada di dalam paradigma definisi sosial ini, akhirnya fenomenologi banyak digunakan sebagai alat analisis terhadap fenomena sosial (Gordon, 1991: 438-492).

Dilihat dari sisi filsafat ilmu ada perbedaan mendasar antara pendekatan positivistik dan rasionalistik disatu pihak dengan pendekatan fenomenologi dan realisme metafisik dilain pihak. Menurut Muhadjir (1996) bahwa; Pendekatan positivistik dan rasionalistik, hanya mengakui kebenaran empirik sensual dan empirik

logik, artinya hanya mengakui sesuatu sebagai kebenaran bila dapat dibuktikan secara empirik indrawi dan dalam konteks kausalitas dapat dilacak dan dijelaskan. Sedangkan pendekatan fenomenologi dan realisme metaphisik mengakui adanya kebenaran empirik etik yang memerlukan akal budi untuk melacak dan menjelaskan serta berargumentasi. Akal budi di sini mengandung makna bahwa kita perlu menggunakan kriteria lebih tinggi lagi dari sekedar *truth or false* (benar atau salah) (Muhadjir, 1996: 83).

Nilai moral yang digunakan pada dua pendekatan yang pertama tegas Muhadjir, terbatas pada nilai moral tunggal yaitu benar atau salah. Sedangkan nilai moral yang digunakan pada pendekatan dua yang kedua mengacu pada nilai moral ganda yang hirarkik. Perspektif fenomenologi itu pada aplikasinya bahwa peneliti dalam berilmu pengetahuan tidak dapat lepas dari pandangan moralnya, baik taraf mengamati, menghimpun data, menganalisis, ataupun dalam membuat kesimpulan. Perspektif fenomenologi ini juga bukan hendak menampilkan teori dan konseptualisasi yang sekedar berisi anjuran atau imperatif, melainkan mengangkat “makna etika” dalam berteori dan berkonsep.

Uraian ini menjelaskan bahwa kelebihan perspektif fenomenologi akan mampu mengkaji makna mobilitas penduduk sebagai realitas subjektif, perspektif fenomenologi menghendaki adanya sejumlah interpretasi dari individu sebagai subjek penelitian, dan selanjutnya peneliti memberikan interpretasi terhadap interpretasi-interpretasi itu, sampai bisa masuk ke dalam dunia makna dan dunia konseptual subjek penelitian.

## 2. Kelemahan Fenomenologi

Di samping kelebihan-kelebihan teori fenomenologi tersebut di atas, fenomenologi tentu ada sisi kelemahannya. Waters dalam bukunya yang berjudul; *Modern Sociological Theory* menjelaskan bahwa, di samping dari Weber, asal mula pendekatan fenomenologi ini berasal dari filsafat fenomenologi Husserl, dikatakan bahwa: Fenomenologi Husserl menjauhkan diri dari perhatian pada struktur bahasa yang akrab di dalam filsafat analitis Anglo-Saxon, sebaliknya mengkonsentrasikan pada cara-cara bagaimana manusia menyadari dan menerima realitas. Di dalam fenomenologi, realitas hanya berupa

penampilan dan pengalaman hanya dapat memahami realitas melalui indra-indra. Jadi realitas dapat eksis dalam data indera rabaan, oral, visual, audio dan tekstual (Waters, 1994: 31).

Ketika terlibat penelitian demikian, Schutz (1972: 19-24) berusaha menerapkan pandangan Husserl tentang fenomenologi dan pandangan sosiologi Weber. Schutz menerima bahwa Weber berada pada jalur yang benar, tetapi ada beberapa aspek problematik terhadap konsepsinya tentang aksi yang dianggap sebagai perilaku bermakna subjektif yang perlu penyempurnaan: *Pertama*, dia menanyakan ide Weber bahwa makna aksi identik dengan motif untuk aksi. Aksi oleh Weber dianggap bersifat habitual dan afektual dan aksi itu bermakna. Mereka bermakna karena mereka memahami rangkaian pengalaman kehidupan manusia, Jadi sebagian besar aksi, dan tidak hanya aksi rasional, kenyataannya adalah bermakna.

*Kedua*, Schutz berargumen menyakinkan bahwa Weber hanya berkata sedikit tentang bagaimana cara-cara kita mengetahui makna yang didukung oleh orang lain. Tentu saja hal itu sangat mungkin disalah-artikan oleh orang lain, tetapi fakta sederhana adalah bahwa di sepanjang waktu, orang lain itu tidak mencoba mengekspresikan motif-motif dan niat mereka kepada kita.

Kesimpulan bahwa sementara kita dapat mengetahui apa yang sedang dilakukan orang lain adalah sangat tidak mungkin, kita akan mengetahui mengapa mereka melakukan hal itu. Makna aksi orang lain dalam pengertian motif tidak tersedia bagi kita (Waters, 1994: 32). Hal inilah yang mendorong Schutz mengkritik konsep Weber tentang *Verstehen*.

Uraian baru tentang fenomenologi yang sedikit filosofis dan banyak aspek sosiologis dari pendukung Schutz diberikan oleh Berger dan Lukman (1967). Mereka memulai dari premis bahwa manusia mengkonstruksi realitas sosial dimana proses-proses subjektif dapat di objektifkan. Dalam klaim fungsionalis, mereka mengatakan bahwa dalam mengkonstruksi masyarakat sekarang ini diperlukan legitimasi dan justifikasi yakni bahwa semua dunia makna yang berbeda dan dilokalisasi ini perlu diciptakan dan diadakan bersama-sama.

Kelemahan lain teori fenomenologi itu telah digunakan untuk menandai suatu “metode filsafat” (Husserl), namun mereka yang telah

merujukkan diri mereka dengan menamakan kaum fenomenologis, atau yang dianggap oleh kaum lain seperti itu, tidak memiliki bentuk-bentuk prinsip yang utuh, karena itu maka fenomenologi pada awalnya “bukan suatu aliran dan bukan suatu pendekatan metodologis dalam penelitian sosial”. Hanya saja, ketidakjelasan label fenomenologi tidak menurunkan pamornya yang telah diperkenalkan sejak abad 19-an (Merleau Ponty, Zeitlin 1998: 208). Dalam hal ini Ponty masih menganggap perlu memulai lagi mempertanyakan karya utamanya dengan pertanyaan; “apa itu fenomenologi?” Dia menambahkan bahwa tampak aneh apabila pertanyaan ini masih diperdebatkan setelah memakan waktu setengah abad dari karya Husserl yang pertama. Faktanya pertanyaan itu masih belum terjawabkan.

Lebih tegas lagi “pembelaan ketidak-berpihakan” metodologis Scheler merupakan suatu kelemahan perspektif fenomenologi, karena “tidak jelas”, apakah ia tidak berkepentingan dan tidak berpihak atau memisahkan dari dirinya sendiri.

Kelemahan yang lain agaknya sosiologi pengetahuannya untuk mengkaji dunia makna dirancang sebagai suatu “instrumen elit penguasa yang bersifat manipulasi”, padahal dunia makna tidak bisa dimanipulasi.

Dari kelemahan tersebut di atas diharapkan terjadi modifikasi perspektif fenomenologi yaitu yang semula fenomenologi lebih dikenal sebagai metode filsafat, teori dan metodologis. Modifikasi yang diharapkan adalah pendekatan fenomenologi yang diasumsikan bahwa manusia dalam berilmu pengetahuan tidak dapat lepas dari pandangan moralnya, baik taraf mengamati, menghimpun data, menganalisis, ataupun dalam membuat kesimpulan. Fenomenologi bukan hendak menampilkan teori dan konseptualisasi yang sekedar berisi anjuran atau imperatif, melainkan mengangkat makna etika dalam berteori dan berkonsep.

Dari sudut pandang sosiologi, fenomena mobilitas penduduk merupakan aktivitas sosial yang di dalamnya terendap hubungan sosial yang terorganisir dalam beberapa macam sistem, sistem hubungan mobilitas penduduk yang melekat pada kehidupan masyarakat modern-industrial lebih kompleks dibandingkan dengan yang melekat pada masyarakat tradisional-agraris.

### 3. Fenomenologi yang Digunakan

Dari sekian uraian perspektif fenomenologi tersebut di atas, maka fenomenologi yang peneliti gunakan adalah fenomenologi Berger. Fenomenologi Berger dalam penelitian ini, untuk mengkaji pengetahuan pemahaman tentang pemahaman para migran terhadap makna mobilitas penduduk sebagai realitas subjektif, dengan pertimbangan bahwa: pendekatan ini dengan paradigma definisi sosial yang bergerak pada kajian mikro akan memberi peluang individu sebagai subjek penelitian melakukan interpretasi, dan kemudian peneliti melakukan interpretasi terhadap interpretasi itu sampai mendapatkan pengetahuan tentang makna mobilitas penduduk, Berger menyebutnya dengan *first order understanding* (meminta peneliti untuk menanyakan kepada pihak yang diteliti guna mendapatkan penjelasan yang benar), dan *second order understanding* (dalam hal ini peneliti memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap interpretasi itu sampai memperoleh suatu makna yang baru) sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Selain itu penggunaan perspektif ini tidak bisa lepas dari pandangan moralnya, baik taraf mengamati, menghimpun data, menganalisis, ataupun dalam membuat kesimpulan. Tidak dapat lepas, bukan berarti keterpaksaan, melainkan adanya makna etika. Perspektif fenomenologi bukan hendak menampilkan teori dan konseptualisasi yang sekedar berisi anjuran atau imperatif, melainkan mengangkat makna etika dalam berteori dan berkonsep.

### 4. Penggunaan Fenomenologi untuk Memahami TKI

Perspektif fenomenologi ini digunakan untuk memahami pemahaman para pelaku mobilitas penduduk terhadap makna TKI. Pemahaman tentang pemahaman ini diharapkan menghasilkan suatu temuan yang dapat memperbaiki teori tentang migrasi. Penggunaan fenomenologi juga untuk memahami makna TKI sebagai kebenaran empirik etik yang memerlukan akalbudi untuk melacak dan menjelaskan serta berargumentasi. Akalbudi disini mengandung makna bahwa peneliti perlu menggunakan kriteria lebih tinggi dari sekedar *truth or false*. Nilai moral yang digunakan untuk mengkaji makna mobilitas penduduk (TKI) ini mengacu pada nilai moral ganda yang hirarki.

Berikutnya penggunaan fenomenologi ini terkait dengan suatu alasan dari kebermaknaan tindakan untuk status konstruksi sosial bahwa suatu aksi itu diilhami makna subjektif. Aksi pelaku mobilitas penduduk (aksi TKI) ini tidak hanya sekedar gerakan tubuh, tetapi memiliki suatu *inside* (kedalaman) yang terdiri dari proses mental pelaku mobilitas penduduk. Oleh karena itu penggunaan fenomenologi untuk memahami aksi mobilitas penduduk bukan dilihat dari aspek materi tetapi dari aspek non materi, bukan dari aspek dampak tetapi dari aspek proses, bukan dari realitas objektif tetapi dari realitas subjektif, dan bukan dari perspektif positivistik tetapi dari perspektif fenomenologi.

Data yang dibutuhkan berkaitan dengan beberapa aspek yang dikaji itu berupa; peristiwa-peristiwa tentang mobilitas penduduk atau pelaku TKI, tindakan-tindakan tentang TKI, dan ungkapan-ungkapan tentang TKI. Peristiwa-peristiwa, tindakan-tindakan dan ungkapan-ungkapan itu dari interpretasi oleh subjek penelitian, dan kemudian interpretasi terhadap interpretasi-interpretasi oleh peneliti sampai pada tataran makna.

Penggunaan fenomenologi untuk memahami fenomena mobilitas penduduk atau pelaku TKI sebagai realitas subjektif membutuhkan metode khusus, metode khusus yang dimaksudkan adalah “reduksi”. Husserl mengatakan, yang paling penting adalah mengembangkan suatu metode yang akurat sehingga mampu mendorong peneliti mencapai “sesuatu itu sendiri” dan tujuan filsafatnya adalah suatu filsafat tanpa adanya praduga-praduga. Ungkapan yang terkenal dari Husserl adalah “seseorang mengurung dunianya yang bersifat objektif”, dengan cara memahami dunia yang bersifat subjektif, oleh karena itu diperlukan metode yang disebut “reduksi”, dan dengan reduksi ini mendorong kaum fenomenologi untuk mentransformasikan dirinya sendiri ke dalam sosok peneliti yang tidak berkepentingan (Zeitlin, dalam Juhanda & Anshori, 1998: 216-217).

Inti dari pemikiran Husserl tentang “reduksi” adalah untuk melampaui pemikiran sampai bisa melakukan refleksi, dengan refleksi maka sesuatu yang sebelumnya sudah diketahui menjadi dipertanyakan kembali. Jika kajian migrasi selama ini telah diketahui faktor-faktor penyebabnya, maka menjadi dipertanyakan lebih mendalam tentang

bagaimana proses dan makna mobilitas penduduk atau pelaku TKI bagi mereka? Fakta-fakta yang dulunya tidak diperhatikan (dianggap tidak penting), proses “reduksi” menjadi suatu sikap yang memperhatikan akan hal itu, sehingga mendapatkan suatu yakni makna mobilitas penduduk atau peleku TKI bagi mereka. Di saat peneliti mulai merefleksi dunia yang telah “tereduksi” maka segera akan menemukan bahwa dunia bukanlah bersifat pribadi, tetapi suatu dunia makna dan nilai yang telah diciptakan secara inter subjektive.

## Daftar Pustaka

- Berger, P. and T. Luckmann. 1967. *The Social Construction of Reality*. London: Allen Lane.
- , 1990. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan. Jakarta: LP3ES.
- , *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Campbell T. 1994. *Tujuh Teori Sosial: Sketsa Penilaian Perbandingan*. Yogyakarta: Kanesusus.
- Collin F. 1991. *Social Reality*. New York London: Routledge.
- Gordon, S. 1991. *The History and Philosophy of Science* London-New York : Routledge.
- Muhadjir, N. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (edisi III). Yogyakarta: Penerbit Rakesarasin.
- Santoso, T. 2002. *Kekerasan Politik-Agama: Suatu Studi Konstruksi Sosial tentang Perusakan Gereja di Situbondo*. 1996. Ringkasan Disertasi. Surabaya: Pascasarjana UNAIR.
- Schutz, A. 1972. *The Phenomenology of the Social World*. London: Heinemann.
- Waters, M. 1994. *Modern Sociological Theory*. SAGE Publication. London: Thausand Oaks, New Delhi.
- Zeitlin, M. Z. 1998. *Memahami Kembali Sosiologi Kritik Terhadap Teori Sosiologi Kontemporer*. Penerjemah Juhanda dan Anshori. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

## **BAB V**

### **KAJIAN MASYARAKAT**

#### **A. Masyarakat**

##### **1. Hakiket Masyarakat**

Masyarakat (sebagai terjemahan istilah *society*) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata "masyarakat" sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, *musyarak*. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.

Menurut Syaikh Taqyuddin An-Nabhani, sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem/aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan.

Masyarakat sering diorganisasikan berdasarkan cara utamanya dalam bermata pencaharian. Pakar ilmu sosial mengidentifikasi ada: masyarakat pemburu, masyarakat pastoral nomadis, masyarakat bercocoktanam, dan masyarakat agrikultural intensif, yang juga disebut masyarakat peradaban. Sebagian pakar menganggap masyarakat industri dan pasca-industri sebagai kelompok masyarakat yang terpisah dari masyarakat agrikultural tradisional.

Masyarakat dapat pula diorganisasikan berdasarkan struktur politiknya: berdasarkan urutan kompleksitas dan besar, terdapat masyarakat *band*, suku, *chiefdom*, dan masyarakat negara.

Masyarakat sering dikatakan dengan istilah *society*, yang berasal dari bahasa latin, *societas*, yang berarti hubungan persahabatan dengan yang lain. *Societas* diturunkan dari kata *socius* yang berarti teman,

sehingga arti *society* berhubungan erat dengan kata sosial. Secara implisit, kata *society* mengandung makna bahwa setiap anggotanya mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan bersama.

Untuk menganalisa secara ilmiah tentang proses terbentuknya masyarakat sekaligus problem-problem yang ada sebagai proses-proses yang sedang berjalan atau bergeser kita memerlukan beberapa konsep. Konsep-konsep tersebut sangat perlu untuk menganalisa proses terbentuk dan tergesernya masyarakat dan kebudayaan serta dalam sebuah penelitian antropologi dan sosiologi yang disebut dinamik sosial (*social dynamic*).

Pada hakikatnya masyarakat adalah suatu perwujudan kehidupan bersama manusia. Dalam masyarakat berlangsung proses kehidupan sosial, proses antar hubungan dan antar aksi. Dengan demikian masyarakat dapat fahami sebagai wadah atau medan tempat berlangsungnya antar aksi warga masyarakat itu. Untuk mengerti bentuk dan sifat masyarakat dalam mekanismenya ada ilmu masyarakat yang sebut sosiologi.

Prof. Robert W. Richey dalam bukunya : *“Planning for Teaching an Introduction to Education”* memberikan pemahaman tentang syarakat sebagai suatu kelompok manusia yang hidup bersama di suatu wilayah dengan tata cara berpikir dan bertindak yang relatif.

Berdasarkan pemahaman tersebut makan masyarakat (relatif) luas wilayahnya, dan meliputi (relatif) banyak anggota atau warganya. Oleh karena jumlahnya yang relatif besar, akan terjadi pula “masyarakat” di dalam masyarakat tersebut.

Ada bermacam-macam faktor yang menyebabkan terbentuknya “masyarakat” dimaksud. Terjadilah pembedaan-pembedaan yang dikenal dengan istilah “masyarakat kota”, “masyarakat desa”, “masyarakat pendalaman”, ada pula “masyarakat atas”, “masyarakat bawah”, dan sebagainya.

## 2. Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah sejumlah besar orang yang tinggal dalam wilayah yang sama, relatif independen dan orang-orang di luar wilayah itu, dan memiliki budaya yang relatif sama (Richard T. Schaefer dan Robert P. Lamm, 1998).

Definisi Masyarakat adalah orang-orang yang berinteraksi dalam sebuah wilayah tertentu dan memiliki budaya bersama (John J. Macionis, (1997).

Adam Smith menulis bahwa sebuah masyarakat dapat terdiri dari berbagai jenis manusia yang berbeda, yang memiliki fungsi yang berbeda (as among different merchants), yang terbentuk dan dilihat hanya dari segi fungsi bukan dari rasa suka maupun cinta dan sejenisnya, dan hanya rasa untuk saling menjaga agar tidak saling menyakiti "*may subsist among different men, as among different merchants, from a sense of its utility without any mutual love or affection, if only they refrain from doing injury to each others.*

Masyarakat menurut Soerjono Soekanto (1993), para ahli antropologi sosial biasanya mengartikan masyarakat sebagai wadah dari orang-orang yang buta huruf, mengadakan reproduksi sendiri, mempunyai adat istiadat, mempertahankan ketertiban, dengan menerapkan sanksi-sanksi sebagai sarana pengendalian sosial, dan yang mempunyai wilayah tempat tinggal yang khusus.

Sedangkan menurut Koentjaraningrat (2002) mendefinisikan mengenai masyarakat secara khusus yaitu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Ciri-ciri masyarakat tersebut nampak selaras dengan definisi masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh J.L. Gillin dan J.P. Gillin dalam Abdul Syani (2002;32) bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. Masyarakat itu meliputi pengelompokan-pengelompokan yang lebih kecil. Dalam buku sosiologi karangan Abu Ahmadi dalam Abdul Syani (2002;32), menyatakan bahwa masyarakat harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut : 1) Harus ada pengumpulan manusia, dan harus banyak, bukan pengumpulan binatang. 2) telah bertempat tinggal dalam waktu lama di suatu daerah tertentu. 3) adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama.

Pengertian masyarakat menurut Linton adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga dapat

terbentu organisasi yang mengatur setiap individu dalam masyarakat tersebut dan membuat setiap individu dalam masyarakat dapat mengatur diri sendiri dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batasan tertentu.

Menurut M.J. Heskovits, masyarakat adalah sebuah kelompok individu yang mengatur, mengorganisasikan, dan mengikuti suatu cara hidup (the way life) tertentu. Menurut S.R. Steinmentz, masyarakat didefinisikan sebagai kelompok manusia yang terbesar meliputi pengelompokan-pengelompokan manusia yang lebih kecil yang mempunyai perhubungan erat dan teratur.

J.L Gillin mengartikan masyarakat sebagai sebuah kelompok manusia yang tersebar yang memiliki kebiasaan (habit), tradisi (tradition), sikap (attitude) dan perasaan persatuan yang sama.

Menurut Mack Ever, arti Masyarakat sebagai suatu sistem dari cara kerja dan prosedur, otoritas dan saling bantu-membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial, sistem pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan. Sistem yang kompleks dan selalu berubah dari relasi sosial.

Sedang Selo Soemardjan memberikan pengertian masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebuda.

Dari definisi masyarakat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah suatu komunitas orang yang hidup di suatu wilayah tertentu berinteraksi satu sama lain sehingga terbentuk sistem peradapan tertentu yang dinamis.

## **B. Nilai dan Norma Sosial**

Setiap manusia memiliki kriteria yang berbeda-beda mengenai baik buruknya sesuatu. Suatu nilai berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam masyarakat. Seperti kerja sama, persaudaraan, rasa kekeluargaan, ketaatan, kedisiplinan, kebersihan, ketertiban, dan lain-lain. Begitu pentingnya nilai bagi masyarakat, maka nilai diaktualisasikan dalam bentuk norma-norma sosial yang dilengkapi dengan sanksi-sanksi bagi pelanggarnya. Setelah nilai dan norma disepakati serta diterima, maka nilai dan norma tersebut disosialisasikan kepada warga masyarakat secara turun-temurun. Tujuannya agar warga masyarakat menyesuaikan perilakunya dengan nilai dan norma itu, sehingga tercipta keteraturan sosial.

## 1. Nilai Sosial

Nilai sosial adalah sebuah konsep abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap *baik* dan apa yang dianggap *buruk*, *indah* atau *tidak indah*, dan *benar* atau *salah*.<sup>[1]</sup> Nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Untuk menentukan sesuatu itu dikatakan baik atau buruk, pantas atau tidak pantas harus melalui proses menimbang. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh kebudayaan yang dianut masyarakat. Tak heran apabila antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain terdapat perbedaan tata nilai.

Nilai sosial adalah juga dapat didefinisikan sebagai ukuran-ukuran, patokan-patokan, anggapan-anggapan, keyakinan-keyakinan, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta dianut oleh banyak orang dalam lingkungan masyarakat mengenai apa yang benar, pantas, luhur, dan baik untuk dilakukan. Nilai-nilai sosial merupakan aktualisasi dari kehendak masyarakat mengenai segala sesuatu yang dianggap benar dan baik. Pada intinya, adanya nilai sosial dalam masyarakat bersumber pada tiga hal yaitu dari Tuhan, masyarakat, dan individu.

Nilai sosial memiliki cirri-ciri tertentu, adapun ciri nilai sosial di antaranya sebagai berikut; 1) Merupakan konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antarwarga masyarakat. 2) Disebarkan di antara warga masyarakat (bukan bawaan lahir). 3) Terbentuk melalui sosialisasi (proses belajar). 4) Merupakan bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial manusia. 5) Bervariasi antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain. 6) Dapat memengaruhi pengembangan diri social. 7) Memiliki pengaruh yang berbeda antarwarga masyarakat. 8) Cenderung berkaitan satu sama lain dan membentuk sistem nilai.

Berdasarkan ciri-cirinya, nilai sosial dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu nilai dominan dan nilai mendarah daging (*internalized value*).

- a. Nilai dominan adalah nilai yang dianggap lebih penting daripada nilai lainnya. Ukuran dominan tidaknya suatu nilai didasarkan pada hal-hal berikut; 1) Banyak orang yang menganut nilai tersebut. Contoh, sebagian besar anggota masyarakat menghendaki perubah-

an ke arah yang lebih baik di segala bidang, seperti politik, ekonomi, hukum, dan sosial. 2) Berapa lama nilai tersebut telah dianut oleh anggota masyarakat. Masyarakat (sebagai terjemahan istilah *society*) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. 3) Tinggi rendahnya usaha orang untuk dapat melaksanakan nilai tersebut. Contoh, orang Indonesia pada umumnya berusaha pulang kampung (mudik) di hari-hari besar keagamaan, seperti Lebaran atau Natal. 4) Prestise atau kebanggaan bagi orang yang melaksanakan nilai tersebut. Contoh, memiliki mobil dengan merek terkenal dapat memberikan kebanggaan atau prestise tersendiri.

- b. Nilai mendarah daging adalah nilai yang telah menjadi kepribadian dan kebiasaan sehingga ketika seseorang melakukannya kadang tidak melalui proses berpikir atau pertimbangan lagi (bawah sadar). Biasanya nilai ini telah tersosialisasi sejak seseorang masih kecil. Umumnya bila nilai ini tidak dilakukan, ia akan merasa malu, bahkan merasa sangat bersalah. Contoh, seorang kepala keluarga yang belum mampu memberi nafkah kepada keluarganya akan merasa sebagai kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab. Demikian pula, guru yang melihat siswanya gagal dalam ujian akan merasa gagal dalam mendidik anak tersebut.

Bagi manusia, nilai berfungsi sebagai landasan, alasan, atau motivasi dalam segala tingkah laku dan perbuatannya. Nilai mencerminkan kualitas pilihan tindakan dan pandangan hidup seseorang dalam masyarakat. Menurut Notonegoro, nilai sosial terbagi 3, yaitu: 1) Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi fisik/jasmani seseorang. 2) Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang mendukung aktivitas seseorang. 3) Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jiwa/psikis seseorang.

Didalam masyarakat tolok ukur nilai sosial itu berbeda-beda, setiap masyarakat mempunyai nilai yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan setiap masyarakat mempunyai tolok ukur nilai yang berbeda-beda pula. Selain itu, perbedaan cara pandang masyarakat terhadap nilai mendorong munculnya perbedaan nilai. Suatu nilai dapat

tetap dipertahankan apabila nilai tersebut mempunyai daya guna fungsional, artinya mempunyai kebermanfaatan bagi kehidupan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan sumbernya, tolok ukur nilai social dapat dibagi lagi menjadi empat jenis yaitu: 1) Nilai kebenaran, bersumber dari akal manusia (cipta); 2) Nilai keindahan atau estetika, bersumber dari unsur rasa manusia (estetika); 3) Moral atau kebaikan, bersumber dari kehendak manusia (karsa); 4) Nilai religius, bersumber pada ke-Tuhanan.

## 2. Norma Sosial

Norma sosial adalah kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat dan batasan wilayah tertentu. Norma akan berkembang seiring dengan kesepakatan-kesepakatan sosial masyarakatnya, sering juga disebut dengan *peraturan sosial*. Norma menyangkut perilaku-perilaku yang pantas dilakukan dalam menjalani interaksi sosialnya. Keberadaan norma dalam masyarakat bersifat memaksa individu atau suatu kelompok agar bertindak sesuai dengan aturan sosial yang telah terbentuk. Pada dasarnya, norma disusun agar hubungan di antara manusia dalam masyarakat dapat berlangsung tertib sebagaimana yang diharapkan.

Norma tidak boleh dilanggar. Siapa pun yang melanggar norma atau tidak bertingkah laku sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam norma itu, akan memperoleh hukuman. Misalnya, bagi siswa yang terlambat dihukum tidak boleh masuk kelas, bagi siswa yang mencontek pada saat ulangan tidak boleh meneruskan ulangan.

Norma merupakan hasil karya manusia sebagai makhluk sosial. Pada awalnya, aturan ini dibentuk secara tidak sengaja. Lama-kelamaan norma-norma itu disusun atau dibentuk secara sadar. Norma dalam masyarakat berisis tata tertib, aturan, dan petunjuk standar perilaku yang pantas atau wajar.

Jadi manusia tidak pernah lepas dari peraturan. Di mana pun dan kapan pun manusia bertempat tinggal di sekelilingnya terdapat aturan yang membatasi perilaku manusia. Norma Sosial sebagai patokan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsinya adalah untuk memberi batasan berupa perintah atau larangan dalam berperilaku, memaksa individu untuk menyesuaikan diri dengan nilai

yang berlaku di masyarakat dan menjaga solidaritas antaranggota masyarakat. Oleh karena fungsi-fungsi tersebut, maka sosialisasi norma memiliki peran yang penting dalam mewujudkan ketertiban sosial.

Berdasarkan daya pengikatnya, norma dibedakan menjadi empat.

1) Cara (*usage*) merupakan norma yang daya pengikatnya sangat lemah. 2) Kebiasaan(*folkways*) ialah aturan yang daya pengikatnya lebih kuat dari *usage*. 3) Tata kelakuan (*mores*) ialah aturan yang telah diterima masyarakat dan biasanya berhubungan dengan sistem kepercayaan atau keyakinan. 4) Adat istiadat (*custom*) merupakan aturan yang memiliki sanksi keras terhadap pelanggarnya, berupa penolakan atau pengadilan.

Macam-macam norma sosial, antara lain;1) Norma Agama 2) Norma Kesusilaan (Mores). 3) Norma Adat. 4) Norma Kebiasaan. 5) Norma Kesopanan 6) Norma Hukum

### 3. Peran Norma dan Nilai Sosial

Norma serta nilai sosial dibentuk dan disepakati bersama. Tidak dapat dimungkiri bahwa nilai dan norma dijadikan sebagai pelindung dari tindakan destruktif orang lain terhadap diri. Nilai dan norma sosial memiliki peranan yang berarti bagi individu anggota suatu masyarakat maupun masyarakat secara keseluruhan. Peran-peran tersebut antara lain:

- a. Sebagai petunjuk arah (*Orientasi*) bersikap dan bertindak
- b. Sebagai pemandu dan pengontrol bagi sikap dan tindakan manusia.
- c. Sebagai pendorong sikap dan tindakan manusia.
- d. Sebagai benteng perlindungan bagi keberadaan masyarakat.
- e. Sebagai alat pemersatu anggota masyarakat

Pelanggaran nilai dan norma sosial beserta solusinya. Pelanggaran nilai dan norma, menurut Robert M.Z. Lawang (1985), perilaku pelanggaran norma dibedakan menjadi empat macam, yaitu: 1) Pelanggaran nilai dan norma yang dilihat dan dianggap sebagai kejahatan, misalnya: pemukulan, pemerkosaan, penodongan, dan lain-lain. 2) Pelanggaran nilai dan norma yang berupa penyimpangan seksual, yaitu perzinahan, homoseksualitas, dan pelacuran. 3) Bentuk-bentuk konsumsi yang sangat berlebihan, misalnya alkohol, candu,

morfin, dan lain-lain. 4) Gaya hidup yang lain dari yang lain, misalnya penjudi profesional, geng-geng, dan lain-lain.

Solusi terhadap pelanggaran norma, dalam Sosiologi, solusi yang tepat dalam menangani pelanggaran norma menggunakan pengendalian sosial. Pengendalian sosial adalah cara dan proses pengawasan yang direncanakan atau tidak direncanakan, guna mengajak, mendidik, serta memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma sosial.

Berikut ini merupakan beberapa usaha agar masyarakat menaati aturan-aturan yang ada, seperti: 1) Mempertebal keyakinan para anggota masyarakat akan kebaikan adat istiadat yang ada. 2) Memberi ganjaran kepada warga masyarakat yang biasa taat. 3) Mengembangkan rasa malu dalam jiwa masyarakat yang menyeleweng dari adat istiadat. 4) Mengembangkan rasa takut dalam jiwa warga masyarakat yang hendak menyeleweng dari adat istiadat dengan berbagai ancaman dan kekuasaan.

### **C. Interaksi Sosial**

Interaksi sosial menurut catatan Wikipedia, merupakan suatu fondasi dari hubungan yang berupa tindakan yang berdasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku dan diterapkan di dalam masyarakat. Dengan adanya nilai dan norma yang berlaku, interaksi sosial itu sendiri dapat berlangsung dengan baik jika aturan - aturan dan nilai – nilai yang ada dapat dilakukan dengan baik. Jika tidak adanya kesadaran atas pribadi masing – masing, maka proses sosial itu sendiri tidak dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan.

Di dalam kehidupan sehari – hari tentunya manusia tidak dapat lepas dari hubungan antara satu dengan yang lainnya, ia akan selalu perlu untuk mencari individu ataupun kelompok lain untuk dapat berinteraksi ataupun bertukar pikiran.

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekamto di dalam pengantar sosiologi, interaksi sosial merupakan kunci rotasi semua kehidupan sosial. Dengan tidak adanya komunikasi ataupun interaksi antar satu sama lain maka tidak mungkin ada kehidupan bersama. Jika hanya fisik yang saling berhadapan antara satu sama lain, tidak dapat menghasilkan suatu bentuk kelompok sosial yang dapat saling berinteraksi. Maka dari itu dapat disebutkan

bahwa interaksi merupakan dasar dari suatu bentuk proses sosial karena tanpa adanya interaksi sosial, maka kegiatan-kegiatan antar satu individu dengan yang lain tidak dapat disebut interaksi.

Interaksi sosial yang dikutip dari <http://www.davishare.com/2015/01/interaksi-sosial-pengertian-syarat-ciri.html> dijelaskan bahwa interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih, dan masing-masing orang yang terlibat di dalamnya memainkan peran secara aktif. Dalam interaksi juga lebih dari sekedar terjadi hubungan antara pihak-pihak yang terlibat melainkan terjadi saling mempengaruhi.

#### 1. Pengertian Interaksi Sosial Menurut Para Ahli:

Menurut Homans (dalam Ali, 2004: 87) mendefinisikan interaksi sebagai suatu kejadian ketika suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang terhadap individu lain diberi ganjaran atau hukuman dengan menggunakan suatu tindakan oleh individu lain yang menjadi pasangannya. Konsep yang dikemukakan oleh Homans ini mengandung pengertian bahwa interaksi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam interaksi merupakan suatu stimulus bagi tindakan individu lain yang menjadi pasangannya.

Pengertian Interaksi sosial menurut Bonner (dalam Ali, 2004) merupakan suatu hubungan antara dua orang atau lebih individu, dimana kelakuan individu mempengaruhi, mengubah atau mempengaruhi individu lain atau sebaliknya. Sedangkan pengertian interaksi sosial menurut John Lewis Gillin; "Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial dinamis yang menyangkut hubungan antarindividu, antara individu dan kelompok, atau antar kelompok."

Syarat Terjadinya Interaksi Sosial, menurut tim Sosiologi (2002), interaksi sosial dapat berlangsung jika memenuhi dua syarat di bawah ini, yaitu Kontak sosial dan komunikasi sosial. a) Kontak Sosial adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak lain yang merupakan awal terjadinya interaksi sosial, dan masing - masing pihak saling bereaksi antara satu dengan yang lain meski tidak harus bersentuhan secara fisik. b) Sedangkan komunikasi adalah berhubungan atau bergaul dengan orang lain.

Terdapat beberapa cirri interaksi sosial, ada empat ciri - ciri interaksi sosial, antara lain; Jumlah pelakunya lebih dari satu orang, a) terjadinya komunikasi di antara pelaku melalui kontak social. b)

Mempunyai maksud atau tujuan yang jelas. c) dilaksanakan melalui suatu pola sistem sosial tertentu.

## 2. Faktor yang Mempengaruhi Interaksi Sosial

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial, antara lain:

- a. *Sugesti*. Sugesti adalah pemberian pengaruh pandangan seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu, sehingga orang tersebut mengikuti pandangan/pengaruh tersebut tanpa berpikir panjang. Sugesti biasanya dilakukan oleh orang yang berwibawa, mempunyai pengaruh besar, atau terkenal dalam masyarakat. Contoh sugesti salah satunya adalah obat yang harganya mahal yang merupakan produk impor dianggap pasti manjur menyembuhkan penyakit. Anggapan tersebut merupakan sugesti yang muncul akibat harga obat yang mahal dan embel-embel produk luar negeri.
- b. *Imitasi*. Imitasi adalah tindakan atau usaha untuk meniru tindakan orang lain sebagai tokoh idealnya. Imitasi cenderung secara tidak disadari dilakukan oleh seseorang. Imitasi pertama kali akan terjadi dalam sosialisasi keluarga. Misalnya, seorang anak sering meniru kebiasaan-kebiasaan orang tuanya seperti cara berbicara dan berpakaian. Namun, imitasi sangat dipengaruhi oleh lingkungannya terutama lingkungan di sekolah. Karena seseorang (terutama saat seseorang sudah menginjak usia remaja) cenderung lebih sering di sekolah dan bersosialisasi dengan temannya dengan berbagai macam kebiasaan.
- c. *Identifikasi*. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Identifikasi mengakibatkan terjadinya pengaruh yang lebih dalam dari sugesti dan imitasi karena identifikasi dilakukan oleh seseorang secara sadar. Contoh identifikasi: seorang pengagum berat artis terkenal, ia sering mengidentifikasi dirinya menjadi artis idolanya dengan meniru model rambut, model pakaian, atau gaya perilakunya dan menganggap dirinya sama dengan artis tersebut.
- d. *Simpaty*. Simpaty adalah suatu proses seseorang yang merasa tertarik pada orang lain. Perasaan simpaty itu bisa juga disampaikan kepada seseorang atau sekelompok orang atau suatu lembaga formal pada saat-saat khusus. Contoh simpaty adalah pada

peringatan ulang tahun, pada saat lulus ujian, atau pada saat mencapai suatu prestasi.

- e. *Empati*. Empati adalah kemampuan mengambil atau memainkan peranan secara efektif dan seseorang atau orang lain dalam kondisi yang sebenar-benarnya, seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain tersebut seperti rasa senang, sakit, susah, dan bahagia. Empat hampir mirip dengan sikap simpati. Perbedaannya, sikap empati lebih menjiwai atau lebih terlihat secara emosional. Contoh empati adalah saat kita turut merasakan empati terhadap masyarakat Yogyakarta yang menjadi korban letusan Gunung Merapi.
- f. *Motivasi*. Motivasi adalah dorongan, rangsangan, pengaruh, atau stimulus yang diberikan seorang individu kepada individu yang lain sedemikian rupa sehingga orang yang diberi motivasi tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasi secara kritis, rasional, dan penuh tanggung jawab. Contoh motivasi adalah guru yang memberikan motivasi kepada siswanya supaya siswanya semakin giat belajar.

Tidak selamanya interaksi berjalan sesuai dengan rencana. Kontak sosial yang berlangsung kadang-kadang dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, namun sebaliknya suatu interaksi akan mengalami gangguan dan bahkan terhenti seandainya terjadi hal-hal berikut: Subjek-subjek yang terlibat dalam interaksi tidak mempunyai harapan lagi untuk mencapai tujuan. Interaksi yang terjadi tidak lagi bermanfaat atau tidak mendatangkan keuntungan. Tidak adanya adaptasi atau penyesuaian antara pihak-pihak yang saling berinteraksi. Salah satu pihak atau keduanya tidak bersedia lagi mengadakan interaksi.

### 3. Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial.

Hubungan yang terjadi antar warga masyarakat berlangsung sepanjang waktu. Rentang waktu yang panjang serta banyaknya warga yang terlibat dalam hubungan antar warga melahirkan berbagai bentuk interaksi sosial.

Selain itu kehidupan masyarakat selalu diwarnai oleh dua kecenderungan yang saling bertolak belakang. Di satu sisi manusia berinteraksi untuk saling bekerja sama, menghargai, menghormati,

hidup rukun, dan bergotong royong, dalam teori social disebut teori truktural fungsional, teori ini melihat bahwa kehidupan masyarakat cenderung tertaur (kemapanan). Di sisi lain, manusia berinteraksi dalam bentuk pertikaian, peperangan, tidak adanya rasa saling memiliki, dalam teori social disebut teori konflik, teori ini melihat bahwa kehidupan masyarakat cenderung tidak teratur, berkompetitif (ketidak mapanan).

Dengan demikian interaksi sosial mempunyai dua bentuk, yakni interaksi sosial yang mengarah pada bentuk penyatuan (proses asosiatif) dan mengarah pada bentuk pemisahan (proses disosiatif).

a. Proses asosiatif.

Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang menghasilkan kerja sama. Ada beberapa bentuk interaksi sosial asosiatif, antara lain sebagai berikut.

1) Kerja Sama (*Cooperation*)

Kerja sama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Kerja sama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut; kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerja sama yang berguna.

Ada beberapa bentuk interaksi sosial yang berupa kerja sama, yaitu:

- a) Bargaining adalah pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang atau jasa antara dua organisasi atau lebih.
- b) Cooptation (kooptasi) adalah suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi untuk menghindari kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan.
- c) Coalition (koalisi) adalah kerja sama yang dilaksanakan oleh dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang

sama. Koalisi dapat menghasilkan keadaan yang tidak stabil untuk sementara waktu, karena dua organisasi atau lebih tersebut mungkin mempunyai struktur yang berbeda satu sama lain.

- d) Join venture adalah kerja sama dengan pengusaha proyek tertentu untuk menghasilkan keuntungan yang akan dibagi menurut proporsi tertentu. Join venture jika diterjemahkan akan menjadi 'usaha patungan'.

## 2) Akomodasi (*Accommodation*)

Akomodasi adalah suatu proses di mana orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia yang mula-mula saling bertentangan, saling mengadakan penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan-ketegangan.

Bentuk-bentuk akomodasi adalah sebagai berikut:

- a) Tolerant participation (toleransi) adalah suatu watak seseorang atau kelompok untuk sedapat mungkin menghindari perselisihan. Individu semacam itu disebut toleran.
- b) Compromise (kompromi) adalah suatu bentuk akomodasi di mana masing-masing pihak mengerti pihak lain sehingga pihak-pihak yang bersangkutan mengurangi tuntutan mereka agar tercapai penyelesaiannya terhadap perselisihan. Kompromi dapat pula disebut perundingan.
- c) Coercion (koersi) adalah bentuk akomodasi yang proses pelaksanaannya menggunakan paksaan. Pemaksaan terjadi bila satu pihak menduduki posisi kuat, sedangkan pihak lain dalam posisi lemah.
- d) Arbitration adalah proses akomodasi yang proses pelaksanaannya menggunakan pihak ketiga dengan kedudukan yang lebih tinggi dari kedua belah pihak yang bertentangan. Penentuan pihak ketiga harus disepakati oleh dua pihak yang berkonflik. Keputusan pihak ketiga ini bersifat mengikat. Mediasi adalah menggunakan pihak ketiga yang netral untuk menyelesaikan kedua belah pihak yang bertikai. Berbeda dengan arbitration, keputusan pihak ketiga ini bersifat tidak mengikat.

- e) Conciliation adalah suatu usaha untuk mempertemukan keinginan yang berselisih agar tercapai persetujuan bersama. Biasanya dilakukan melalui perundingan.
- f) Ajudication adalah penyelesaian perkara melalui pengadilan. Pada umumnya cara ini ditempuh sebagai alternatif terakhir dalam penyelesaian konflik.
- g) Stalemate adalah suatu akomodasi semacam balance of power (politik keseimbangan) sehingga kedua belah pihak yang berselisih sampai pada titik kekuatan yang seimbang. Posisi itu sama dengan zero option (titik nol) yang sama-sama mengurangi kekuatan serendah mungkin. Dua belah pihak yang bertentangan tidak dapat lagi maju atau mundur.
- h) Segregasi adalah upaya saling memisahkan diri atau saling menghindar di antara pihak-pihak yang bertentangan dalam rangka mengurangi ketegangan.
- i) Gencatan senjata adalah penangguhan permusuhan atau peperangan dalam jangka waktu tertentu. Masa penangguhan digunakan untuk mencari upaya penyelesaian konflik di antara pihak-pihak yang bertikai.

### 3) Akulturasi

Akulturasi adalah suatu proses yang timbul apabila suatu kelompok manusia dan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari kebudayaan asing dengan sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri.

Biasanya unsur-unsur kebudayaan asing yang mudah diterima adalah unsur kebudayaan kebendaan dan peralatan yang sangat mudah dipakai dan dirasakan sangat bermanfaat seperti komputer, handphone, mobil, dan lain-lain. Sedangkan kebudayaan asing yang sulit diterima adalah unsur kebudayaan yang menyangkut ideologi, keyakinan, atau nilai tertentu yang menyangkut prinsip hidup seperti paham komunisme, kapitalisme, liberalisme, dan lain-lain.

### 4) Asimilasi (*assimilation*)

Asimilasi adalah usaha mengurangi perbedaan yang terdapat di antara beberapa orang atau kelompok serta usaha menyamakan sikap, mental, dan tindakan demi tercapainya tujuan bersama. Contoh asimilasi antar dua kelompok masyarakat adalah upaya untuk membaurkan etnis Tionghoa dengan masyarakat pribumi.

Faktor-faktor yang dapat mempermudah terjadinya suatu asimilasi antara lain adalah: Toleransi, Kesempatan-kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi, Sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya, Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat, Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, Perkawinan campuran (amalgamation), Adanya musuh bersama dari luar.

Selain beberapa faktor yang mempermudah terjadinya asimilasi, ada pula faktor-faktor yang menghambat asimilasi. Antara lain sebagai berikut:

- a) Adanya isolasi kebudayaan dari salah satu kebudayaan kelompok
  - b) Minimnya pengetahuan dari salah satu kebudayaan kelompok atas kebudayaan kelompok lain
  - c) Ketakutan atas kekuatan kebudayaan kelompok lain
  - d) Perasaan superioritas atas kebudayaan kelompok tertentu
  - e) Adanya perbedaan ciri-ciri badaniah
  - f) Adanya perasaan in-group yang kuat
  - g) Adanya diskriminasi
  - h) Adanya perbedaan kepentingan antar kelompok
- b. Proses Disosiatif

Interaksi sosial disosiatif disebut juga dengan oposisi, yang artinya bertentangan dengan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi sosial disosiatif dibedakan menjadi beberapa bentuk, antara lain sebagai berikut:

1. Persaingan (competition).
2. Persaingan merupakan proses sosial ketika terdapat ke-2 pihak atau lebih saling berlomba melakukan sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Persaingan terjadi jika beberapa pihak

menginginkan sesuatu dengan jumlah yang terbatas ataupun menjadi pusat perhatian umum. Seperti, ribuan remaja bersaing agar masuk jajaran 12 besar penyanyi idola. Persaingan dilakukan atas norma dan nilai yang diakui bersama dan berlaku di masyarakat tersebut. Kemungkinan kecil, persaingan menggunakan kekerasan ataupun ancaman. Jadi, dapat disebut bahwa persaingan dilakukan dengan sehat atau sportif. Persaingan disertai dengan kekerasan, bahaya, atau keinginan untuk merugikan pihak lain, hal ini dinamakan dengan persaingan tak sehat dan bukan lagi disebut dengan persaingan akan tetapi telah menjurus kepada permusuhan atau persengketaan. Hasil dari persaingan harus diterima dengan kepala dingin, tanpa dendam sedikit pun. Mulai dari awal, Setiap pihak yang bersaing menyadari akan ada yang menang dan kalah.

Macam-Macam Contoh Persaingan - Perhatikan beberapa contoh persaingan berikut ini: Contoh persaingan pada bidang ekonomi: persaingan antara produsen barang sejenis dalam merebut pasar yang terbatas. Contoh persaingan dalam sesuatu kedudukan: persaingan untuk menduduki jabatan strategis. Contoh persaingan dalam hal kebudayaan: persaingan dalam penyebaran ideologi, pendidikan, dan unsur kebudayaan yang lain.

Persaingan memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:

- 1) Menyalurkan keinginan individu atau kelompok yang sama-sama menuntut dipenuhi, padahal sulit dipenuhi seluruhnya secara serentak. Contohnya, membangun jalan desa atau memperbaiki pos keamanan di permukiman.
- 2) Menyalurkan kepentingan dan nilai dalam masyarakat, paling utama kepentingan dan nilai dengan menimbulkan konflik. Contohnya, dalam Provinsi Aceh warganya tak boleh berpakaian minim ataupun pendek, mereka harus berpakaian islami.
- 3) Menyeleksi individu dengan pantas memperoleh kedudukan dan peran yang sesuai secara kemampuannya.

### 3. Kontravensi

Kontravensi adalah sikap menentang dengan tersembunyi agar tidak adanya perselisihan (konflik) terbuka. Kontravensi merupakan proses sosial dengan tanda ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan dengan tidak diungkapkan secara terbuka. Penyebab kontravensi adalah perbedaan pendirian antara kalangan tertentu dan pendirian kalangan lainnya dalam masyarakat ataupun dapat juga pendirian menyeluruh masyarakat.

Macam-Macam Bentuk Kontrakvensi - Menurut Leopald von Wiese dan Howard Becker, terdapat lima bentuk kontravensi antara lain sebagai berikut:

- a. *Kontravensi umum*, seperti penolakan, keengganan, protes, perlawanan, gangguan, dan mengancam pihak lawan.
- b. *Kontravensi sederhana*, seperti menyangkal pernyataan orang di depan umum.
- c. *Kontravensi intensif*, seperti penghasutan dan penyebaran desas-desus.
- d. *Kontravensi rahasia*, seperti membocorkan rahasia atau berkhianat.
- e. *Kontravensi taktis*, misalnya mengejutkan kelompok lawan provokasi dan intimidasi.

### 4. Pertikaian

Pertikaian adalah proses sosial sebagai bentuk lanjut dari kontravensi. Dalam pertikaian, perselisihan sudah bersifat terbuka. Pertikaian terjadi karena adanya perbedaan yang semakin tajam antara kalangan tertentu dalam masyarakat. Kondisi perbedaan yang semakin tajam mengakibatkan amarah dan rasa benci yang mendorong adanya tindakan untuk melukai, menghancurkan, atau menyerang pihak lain. Jadi, pertikaian muncul apabila individu atau kelompok berusaha memenuhi kebutuhan atau tujuannya dengan jalan menentang pihak lain lewan ancaman atau kekerasan.

### 5. Pertentangan atau konflik (conflict)

Pertentangan atau konflik adalah suatu perjuangan individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuannya

dengan jalan menantang pihak lawan. Konflik biasa terjadi dengan disertai ancaman atau kekerasan. Konflik terjadi karena adanya perbedaan pendapat, perasaan individu, kebudayaan, kepentingan baik kepentingan individu maupun kelompok, dan terjadinya perubahan-perubahan sosial yang cepat dengan menimbulkan disorganisasi sosial.

Perbedaan-perbedaan ini akan memuncak menjadi pertentangan karena keinginan-keinginan individu tidak dapat diakomodasikan. Akibatnya, tiap individu atau kelompok berusaha menghancurkan lawan dengan ancaman atau kekerasan. Pertentangan kebanyakan yang berperan adalah perasaan. Perasaan dapat mempertajam adanya perbedaan sehingga kedua pihak berusaha saling menghancurkan. Contohnya perasaan yang menimbulkan konflik adalah benci, iri dan sentimen. Pertentangan tidak selalu bersifat negatif. Pertentangan menjadi alat untuk menyesuaikan norma-norma yang telah ada sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pertentangan juga menghasilkan suatu kerja sama karena kedua pihak saling introspeksi untuk mengadakan perbaikan-perbaikan. Contoh dampak positif pertentangan (konflik) adalah perombakan aturan-aturan yang membatasi hak politik warga negara di masa Orde Baru.

Pertentangan memiliki bentuk-bentuk khusus antara lain sebagai berikut:

- a. *Pertentangan pribadi*, adalah individu yang sejak mereka mulai berkenalan sudah tidak saling menyukai. Awal buruk dikembangkan akan menimbulkan kebencian. Masing-masing pihak akan berusaha menghancurkan pihak lawan.
- b. *Pertentangan rasial*, adalah pertentangan yang terjadi karena kepentingan kebudayaan. Keadaan bertambah buruk jika terdapat salah satu ras yang menjadi golongan minoritas.
- c. *Pertentangan antar kelas sosial*, adalah pertentangan yang terjadi karena terdapat perbedaan kepentingan, misalnya perbedaan kepentingan antara majikan dan buruh.
- d. *Pertentangan politik*, adalah pertentangan yang terjadi antar-golongan dalam masyarakat antara negara-negara berdaulat.

Contohnya, pertentangan yang terjadi antarpolisi politik menjelang pemilu atau pertentangan antarnegara.

- e. *Pertentangan yang bersifat internasional*, adalah pertentangan yang disebabkan oleh kepentingan yang lebih luas menyangkut kepentingan nasional dan kedaulatan masing-masing negara. Jika terdapat pihak yang tak dapat mengendalikan diri, maka akan terjadi peperangan.

#### **D. Pengendalian Sosial (Social control)**

##### **1. Hakikat Pengendalian Sosial**

Pengendalian sosial adalah segenap cara dan proses yang di tempuh kelompok atau orang masyarakat, sehingga para anggotanya dapat bertindak sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat. Dalam sistem pemerintahan, pengendalian sosial di artikan sebagai pengawasan yang di lakukan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, khususnya pemerintah beserta aparatnya. Pengertian pengendalian sosial tersebut mencakup segala proses yang di rencanakan atau tidak serta bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga masyarakat mematuhi kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku.

Menurut Soerjono Soekanto pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Atau, suatu sistem pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keadaan damai melalui keserasian antara kepastian dengan keadilan/ kesebandingan.

Pengendalian sosial, sangat berkaitan erat dengan norma dan nilai sosial, hal ini di sebabkan bagi anggota masyarakat, norma dan nilai sosial merupakan alat pengendali atau sebagai pedoman dalam berperilaku. Pengendalian sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena akan mengurangi terjadinya perilaku-perilaku yang menyimpang.

Menurut L. Berger, pengendalian sosial adalah suatu cara yang di gunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang membangkang. Pengendalian sosial dapat di lakukan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, bahkan antar kelompok dengan individu.

Dalam kehidupan masyarakat, pengendalian sosial memegang peranan penting. Jika pengendalian sosial tidak diterapkan, maka akan mudah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Menurut Koentjaraningrat, pentingnya penerapan pengendalian sosial disebabkan adanya ketegangan-ketegangan dalam proses sosial. Ada tiga ketegangan dalam proses sosial yang memerlukan pengendalian sosial. Ketegangan sosial yang terjadi antara ketentuan dalam adat istiadat dan kepentingan individu. Ketegangan sosial yang terjadi karena keperluan yang bersifat umum bertemu dengan kepentingan golongan yang ada di masyarakat.

## 2. Jenis-Jenis Pengendalian Sosial

- a. Cemoohan, yaitu kritikan secara langsung terhadap seseorang atau kelompok jika dianggap menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut.
- b. Gossip, yaitu bentuk pengendalian sosial atau kritik sosial yang di lontarkan secara tertutup oleh masyarakat terhadap warga masyarakat yang menyimpang perilakunya.
- c. Pendidikan, dapat membina dan mengarahkan seseorang pada pembentukan sikap dan tindakan yang baik.
- d. Teguran, yaitu kritik sosial yang disampaikan secara terbuka oleh masyarakat terhadap warga masyarakat yang menyimpang perilakunya.
- e. Ajaran agama, merupakan salah satu sarana pengendalian sosial yang efektif. Akan menjadikan ajaran agamanya sebagai pedoman hidup dalam bersikap dan berperilaku.
- f. Ostraisisme, adalah suatu bentuk pengucilan. tujuannya adalah agar seseorang atau kelompok yang bersangkutan tidak lagi mengulangi pelanggaran yang pernah di alami.
- g. Fraundules, adalah pengendalian sosial dengan jalan meminta bantuan pihak lain yang dianggap dapat menyelesaikan masalah yang di hadapi.
- h. Intimidasi, adalah pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara menekan, memaksa, meneror atau menakut-nakuti, dll
- i. Hukuman, yaitu alat pengendalian sosial yang paling tegas dan nyata sanksinya. sanksinya berupa hukuman fisik, pidana, denda, dll.

### 3. Sifat Pengendalian Sosial

Pengendalian social bertujuan mencapai keserasian antara stabilitas dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. dengan kata lain, pengendalian social bertujuan mencapai keadaan damai melalui keserasian antara kepastian dan keadilan.

Berdasarkan sifatnya pengendalian social di kelompokkan sebagai berikut :

- a. Preventiv, merupakan suatu usaha pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran, yang tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
- b. Represif, merupakan usaha pencegahan yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan.
- c. Pengendalian gabungan, merupakan usaha mencegah terjadinya preventive, sekaligus mengembalikan penyimpangan yang tidak sesuai dengan norma-norma social.

Berdasarkan pelaksanaannya, pengendalian social dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Pengendalian resmi. Pengendalian resmi (formal) adalah suatu pengawasan yang di lakukan oleh lembaga – lembaga resmi seperti lembaga Negara dan lembaga agama.
- b. Pengendalian tidak resmi. Pengendalian tidak resmi dilaksanakan demi terpeliharanya peraturan-peraturan yang tidak resmi milik masyarakat.
- c. Pengendalian institusional adalah pengaruh dari suatu pola kebudayaan yang di miliki lembaga tertentu.pola-pola perilaku dan norma-norma lembaga itu tidak saja mengawasi para anggota lembaganya tetapi juga warga masyarakat yang berada di lingkungannya.
- d. Pengendalian berpribadi adalah pengaruh baik atau buruk yang datang dari orang-orang tertentu, tokoh yang berpengaruh, atau orang-orang yang sudah di kenal.

Beberapa Cara Pengendalian Sosial. Pengendalian social dapat dilaksanakan dengan berbagai cara. Namun, pada prinsipnya berkisar pada cara tanpa kekerasan (persuasive) dan dengan paksaan (coercive). cara yang lainnya adalah kompulsif dan pervasi . cara yang sebaiknya diterapkan tergantung kepada siapa pengendalian social tersebut

hendak di perlukan dan dalam keadaan yang bagaimana akan di laksanakan.

1) Persuasive

Penegndalian social dengan cara ini lebih menekankan pada usaha untuk mengajak untuk membimbing dengan cara-cara memberikan anjuran-anjuran

2) Cara paksaan (coercive)

Cara ini di tempuh setelah usaha persuasive sudah tidak mungkin lagi dapat dijalankan.

3) Cara kompulsif ( compulsion )

Adalah teknik pengendalian dengan cara menciptakan situasi sedemikian rupa sehingga seseorang terpaksa taat atau mengubah sikapnya yang menghasilkan keptuhan secara tidak langsung.

4) Cara pervasi (pervation)

Adakah teknik pengendalian social dengan cara norma atau nilai yang ada diulang-ulang penyampainnya dengan harapan hal tersebut masuk aspek bawah sadar seseorang.

Pengendalian sosial adalah suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Dengan adanya pengendalian sosial yang baik diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang/ membangkang.

4. Pengertian Pengendalian Sosial

Pengertian pengendalian sosial menurut para sosiolog, antara lain sebagai berikut.

- a. Bruce J. Cohen . Pengendalian sosial adalah cara-cara atau metode yang digunakan untuk mendorong seseorang agar berperilaku selaras dengan kehendak kelompok atau masyarakat luas tertentu.
- b. Horton. Pengendalian sosial adalah segenap cara dan proses yang ditempuh oleh sekelompok orang atau masyarakat, sehingga para anggotanya dapat bertindak sesuai harapan kelompok atau masyarakat.
- c. Joseph S. Roucek. Pengendalian sosial adalah suatu istilah kolektif yang mengacu pada proses terencana ataupun tidak terencana yang

mengajarkan, membujuk atau memaksa individu untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai kelompok.

- d. Peter L. Berger. Pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan oleh masyarakat untuk menertibkan anggota-anggotanya membangkang.
- e. Soetandyo Wignyo Subroto. Pengendalian sosial adalah sanksi, yaitu suatu bentuk penderitaan yang secara sengaja diberikan oleh masyarakat.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian sosial adalah proses yang digunakan oleh seseorang atau kelompok untuk memengaruhi, mengajak, bahkan memaksa individu atau masyarakat agar berperilaku sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga tercipta ketertiban di masyarakat. Pengertian Pengendalian

#### 5. Macam-macam Pengendalian Sosial

Berdasarkan sifat, pengendalian sosial dapat dibedakan menjadi tiga, berikut ini.

##### a. Tindakan Preventif

Pengendalian sosial yang bertujuan untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma sosial. Contohnya, guru menasihati murid agar tidak terlambat datang ke sekolah.

##### b. Tindakan Represif bersifat aktif

Pengendalian sosial yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Contohnya, sanksi skors diberikan kepada siswa yang sering melanggar peraturan.

##### c. Tindakan Kuratif

Pengendalian sosial bersifat kuratif adalah pengendalian sosial yang dilakukan pada saat terjadi penyimpangan sosial. Contohnya, seorang guru menegur dan menasihati siswanya karena ketahuan menyontek pada saat ulangan, bertujuan untuk memberi penyadaran kepada perilaku dan memberi efek jera,

Berdasarkan Cara atau Perlakuan Pengendalian Sosial

##### d. Tindakan Persuasif

Pengendalian sosial yang dilakukan tanpa kekerasan misalnya melalui cara mengajak, menasihati atau membimbing anggota masyarakat agar bertindak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Cara ini dilakukan melalui lisan atau simbolik. Contoh pengendalian sosial melalui lisan yaitu dengan mengajak orang menaati nilai dan norma dengan berbicara langsung menggunakan bahasa lisan, sedang pengendalian secara simbolik dapat menggunakan tulisan, spanduk dan iklan layanan masyarakat. Contoh pengendalian sosial persuasif secara lisan adalah seorang ibu menasehati anaknya yang akan pergi ke sekolah agar tidak terlibat tawuran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai nilai dan norma. Sedang contoh cara pengendalian sosial simbolik misalnya pemerintah daerah menghimbau masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan, cara yang dilakukan pemerintah daerah dengan memasang spanduk di tempat tertentu yang dapat dibaca oleh masyarakat. seorang guru BP yang memberi teguran kepada murid yang melanggar karena merokok.

e. Tindakan koersif.

Tindakan koersif adalah pengendalian sosial yang dilakukan dgn cara pemaksaan dalam hal ini bentuk pemaksaan diwujudkan dengan pemberian sanksi atau hukuman sesuai dgn kadar penyimpanannya, contoh PKL.

Sedangkan berdasarkan pelakunya pengendalian sosial dibedakan menjadi, antara lain:

- a. Pengendalian pribadi; yaitu pengaruh yang datang dari orang atau tokoh tertentu (panutan). Pengaruh ini dapat bersifat baik atau pun buruk.
- b. Pengendalian institusional; yaitu pengaruh yang ditimbulkan dari adanya suatu institusi atau lembaga. Pola perilaku lembaga tersebut tidak hanya mengawasi para anggota lembaga itu saja, akan tetapi juga mengawasi dan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di sekitar lembaga tersebut berada. Misalnya kehidupan para santri di pondok pesantren akan mengikuti aturan, baik dalam hal pakaian, tutur sapa, sikap, pola pikir, pola tidur, dan sebagainya. Dalam hal ini, pengawasan dan pengaruh dari pondok pesantren

tersebut tidak hanya terbatas pada para santrinya saja, namun juga kepada masyarakat di sekitar pondok pesantren.

- c. Pengendalian resmi; yaitu pengendalian atau pengawasan sosial yang dilakukan oleh lembaga resmi negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan sanksi yang jelas dan mengikat. Pengendalian resmi dilakukan oleh aparat negara, seperti kepolisian, satpol PP, kejaksaan, ataupun kehakiman untuk mengawasi ketaatan warga masyarakat terhadap hukum yang telah ditetapkan.
- d. Pengendalian tidak resmi; yaitu pengendalian atau pengawasan sosial yang dilakukan tanpa rumusan aturan yang jelas atau tanpa sanksi hukum yang tegas. Meskipun demikian, pengendalian tidak resmi juga memiliki efektivitas dalam mengawasi atau mengendalikan perilaku masyarakat. Hal ini dikarenakan sanksi yang diberikan kepada pelaku penyimpangan berupa sanksi moral dari masyarakat lain, misalnya dikucilkan atau bahkan diusir dari lingkungannya. Pengendalian tidak resmi dilakukan oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, ataupun tokoh agama yang memiliki kharisma dan dipandang sebagai panutan masyarakat.<sup>[4]</sup>

## 6. Bentuk Pengendalian Sosial

Banyak sekali bentuk-bentuk pengendalian sosial yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang.

- a. Gosip, Gosip sering juga diistilahkan dengan desas-desus. Gosip merupakan memperbincangkan perilaku negatif yang dilakukan oleh seseorang tanpa didukung oleh fakta yang jelas. Gosip tidak dapat diketahui secara terbuka, terlebih-lebih oleh orang yang merupakan objek gosip. Namun demikian gosip dapat menyebar dari mulut ke mulut sehingga hampir seluruh anggota masyarakat tahu dan terlibat dalam gosip. Misalnya gosip tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh Si A dengan Si B. gosip seperti ini dalam waktu singkat akan segera menyebar. Warga masyarakat yang telah mendengar gosip tertentu akan terpengaruh dan bersikap sinis kepada orang yang digosipkan. Karena sifatnya yang laten, biasanya orang sangat menjaga agar tidak menjadi objek gosip.
- b. Teguran, Teguran biasanya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang yang

dianggap melanggar etika dan/atau mengganggu kenyamanan warga masyarakat. Teguran merupakan kritik sosial yang dilakukan secara langsung dan terbuka sehingga yang bersangkutan segera menyadari kekeliruan yang telah diperbuat. Di dalam tradisi masyarakat kita teguran merupakan suatu hal yang tidak aneh lagi. Misalnya teguran terhadap sekelompok pemuda yang begadang sampai larut malam sambil membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman warga yang sedang tidur, teguran yang dilakukan oleh guru kepada pelajar yang sering meninggalkan pelajaran, dan lain sebagainya.

- c. Sanksi/Hukuman. Pada dasarnya sanksi atau hukuman merupakan imbalan yang bersifat negatif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang dianggap telah melakukan perilaku menyimpang. Misalnya pemecatan yang dilakukan terhadap polisi yang terbukti telah mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba, dan lain sebagainya. Adapun manfaat dari sanksi atau hukuman antara lain adalah: (1) untuk menyadarkan seseorang atau sekelompok orang terhadap penyimpangan yang telah dilakukan sehingga tidak akan mengulangnya lagi, dan (2) sebagai peringatan kepada warga masyarakat lain agar tidak melakukan penyimpangan.
- d. Pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang agar mencapai taraf kedewasaan. Melalui pendidikanlah seseorang mengetahui, memahami, dan sekaligus mempraktikkan sistem nilai dan sistem norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.
- e. Agama. Agama mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk menjaga hubungan baik antara manusia dengan sesama manusia, antara manusia dengan makhluk lain, dan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Hubungan yang baik dapat dibina dengan cara menjalankan segala perintah Tuhan dan sekaligus menjauhi segala larangan-Nya. Melalui agama ditanamkan keyakinan bahwa melaksanakan perintah Tuhan merupakan perbuatan baik yang akan mendatangkan pahala. Sebaliknya, melanggar larangan Tuhan merupakan perbuatan dosa yang akan mendatangkan siksa. Dengan

keyakinan seperti ini, maka agama memegang peranan yang sangat penting dalam mengontrol perilaku kehidupan manusia.

## E. Perilaku Penyimpangan

### 1. Pengertian Perilaku Penyimpangan

Perilaku menyimpang yang juga biasa dikenal dengan nama penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan (agama) secara individu maupun pembenarannya sebagai bagian daripada makhluk sosial.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perilaku menyimpang diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat, semua tindakan manusia dibatasi oleh aturan (norma) untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat. Namun demikian di tengah kehidupan masyarakat kadang-kadang masih kita jumpai tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan (norma) yang berlaku pada masyarakat, misalnya seorang siswa menyontek pada saat ulangan, berbohong, mencuri, dan mengganggu siswa lain.

Berikut ini beberapa definisi dari perilaku menyimpang yang dijelaskan oleh beberapa ahli sosiologi :

1. Menurut James Worker Van der Zaden. Penyimpangan sosial adalah perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi.
2. Menurut Robert Muhamad Zaenal Lawang. Penyimpangan sosial adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan menimbulkan usaha dari yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang tersebut.
3. Menurut Paul Band Horton. Penyimpangan sosial adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat.
4. Penyimpangan terhadap norma-norma atau nilai-nilai masyarakat disebut deviasi (*deviation*), sedangkan pelaku atau individu yang

melakukan penyimpangan disebut devian (*deviant*). Kebalikan dari perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak menyimpang yang sering disebut dengan konformitas. Konformitas adalah bentuk interaksi sosial yang di dalamnya seseorang berperilaku sesuai dengan harapan kelompok.

## 2. Ciri-ciri Perilaku Menyimpang

Menurut Paul B. Horton perilaku menyimpang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Penyimpangan harus dapat didefinisikan. Perilaku dikatakan menyimpang atau tidak harus bisa dinilai berdasarkan kriteria tertentu dan diketahui penyebabnya.
- b. Penyimpangan bisa diterima bisa juga ditolak. Perilaku menyimpang tidak selamanya negatif, ada kalanya penyimpangan bisa diterima masyarakat, misalnya wanita karier. Adapun pembunuhan dan perampokan merupakan penyimpangan sosial yang ditolak masyarakat.
- c. Penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak. Semua orang pernah melakukan perilaku menyimpang, akan tetapi pada batas-batas tertentu yang bersifat relatif untuk semua orang. Dikatakan relatif karena perbedaannya hanya pada frekuensi dan kadar penyimpangan. Jadi secara umum, penyimpangan yang dilakukan setiap orang cenderung relatif. Bahkan orang yang telah melakukan penyimpangan mutlak lambat laun harus berkompromi dengan lingkungannya.
- d. Penyimpangan terhadap budaya nyata atautkah budaya ideal. Budaya ideal adalah segenap peraturan hukum yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya tidak ada seorang pun yang patuh terhadap segenap peraturan resmi tersebut karena antara budaya nyata dengan budaya ideal selalu terjadi kesenjangan. Artinya, peraturan yang telah menjadi pengetahuan umum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari cenderung banyak dilanggar.
- e. Terdapat norma-norma penghindaran dalam penyimpangan. Norma penghindaran adalah pola perbuatan yang dilakukan orang untuk memenuhi keinginan mereka, tanpa harus menentang nilai-nilai tata kelakuan secara terbuka. Jadi norma-norma penghindaran

merupakan bentuk penyimpangan perilaku yang bersifat setengah melembaga.

- f. Penyimpangan sosial bersifat adaptif (menyesuaikan). Penyimpangan sosial tidak selamanya menjadi ancaman karena kadang-kadang dapat dianggap sebagai alat pemikiran stabilitas sosial.

### 3. Penyebab Terjadinya Perilaku Menyimpang

Menurut Wilnes dalam bukunya *Punishment and Reformation* sebab-sebab penyimpangan/ kejahatan dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

- a. Faktor subjektif adalah faktor yang berasal dari seseorang itu sendiri (sifat pembawaan yang dibawa sejak lahir).
- b. Faktor objektif adalah faktor yang berasal dari luar (lingkungan). Misalnya keadaan rumah tangga, seperti hubungan antara orang tua dan anak yang tidak serasi.

Untuk lebih jelasnya, berikut diuraikan beberapa penyebab terjadinya penyimpangan seorang individu (faktor objektif), yaitu

- 1) Ketidaksanggupan menyerap norma-norma kebudayaan. Seseorang yang tidak sanggup menyerap norma-norma kebudayaan ke dalam kepribadiannya, ia tidak dapat membedakan hal yang pantas dan tidak pantas. Keadaan itu terjadi akibat dari proses sosialisasi yang tidak sempurna, misalnya karena seseorang tumbuh dalam keluarga yang retak (*broken home*). Apabila kedua orang tuanya tidak bisa mendidik anaknya dengan sempurna maka anak itu tidak akan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga.
- 2) Proses belajar yang menyimpang. Seseorang yang melakukan tindakan menyimpang karena seringnya membaca atau melihat tayangan tentang perilaku menyimpang. Hal itu merupakan bentuk perilaku menyimpang yang disebabkan karena proses belajar yang menyimpang. Misalnya, seorang anak yang melakukan tindakan kejahatan setelah melihat tayangan rekonstruksi cara melakukan kejahatan atau membaca artikel yang memuat tentang tindakan kriminal. Demikian halnya karier penjahat kelas kakap yang diawali dari kejahatan kecil-kecilan yang terus meningkat dan makin berani/nekad merupakan bentuk proses belajar menyimpang. Hal itu juga terjadi

pada penjahat berdasi putih (*white collar crime*) yakni para koruptor kelas kakap yang merugikan uang negara bermilyar-milyar. Berawal dari kecurangan-kecurangan kecil semasa bekerja di kantor/mengelola uang negara, lama kelamaan makin berani dan menggunakan berbagai strategi yang sangat rapi dan tidak mengundang kecurigaan karena tertutup oleh penampilan sesaat.

- 3) Ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial. Terjadinya ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial dapat mengakibatkan perilaku yang menyimpang. Hal itu terjadi jika dalam upaya mencapai suatu tujuan seseorang tidak memperoleh peluang, sehingga ia mengupayakan peluang itu sendiri, maka terjadilah perilaku menyimpang. Misalnya jika setiap penguasa terhadap rakyat makin menindas maka lama-kelamaan rakyat akan berani memberontak untuk melawan kesewenangan tersebut. Pemberontakan bisa dilakukan secara terbuka maupun tertutup dengan melakukan penipuan-penipuan/pemalsuan data agar dapat mencapai tujuannya meskipun dengan cara yang tidak benar. Penarikan pajak yang tinggi akan memunculkan keinginan memalsukan data, sehingga nilai pajak yang dikenakan menjadi rendah. Seseorang mencuri arus listrik untuk menghindari beban pajak listrik yang tinggi. Hal ini merupakan bentuk pemberontakan/perlawanan yang tersembunyi.
- 4) Ikatan sosial yang berlainan. Setiap orang umumnya berhubungan dengan beberapa kelompok. Jika pergaulan itu mempunyai pola-pola perilaku yang menyimpang, maka kemungkinan ia juga akan mencontoh pola-pola perilaku menyimpang.
- 5) Akibat proses sosialisasi nilai-nilai sub-kebudayaan yang menyimpang. Seringnya media massa menampilkan berita atau tayangan tentang tindak kejahatan (perilaku menyimpang) menyebabkan anak secara tidak sengaja menganggap bahwa perilaku menyimpang tersebut sesuatu yang wajar. Hal inilah yang dikatakan sebagai proses belajar dari sub-kebudayaan yang menyimpang, sehingga terjadi proses sosialisasinilai-nilai sub-kebudayaan menyimpang pada diri anak dan anak meng-

anggap perilaku menyimpang merupakan sesuatu yang wajar/biasa dan boleh dilakukan.

#### 4. Bentuk-Bentuk Perilaku Menyimpang

Bentuk-bentuk perilaku menyimpang dapat dibedakan menjadi dua, sebagai berikut.

a. Bentuk penyimpangan berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

- 1) Penyimpangan bersifat positif. Penyimpangan bersifat positif adalah penyimpangan yang mempunyai dampak positif terhadap sistem sosial karena mengandung unsur-unsur inovatif, kreatif, dan memperkaya wawasan seseorang. Penyimpangan seperti ini biasanya diterima masyarakat karena sesuai perkembangan zaman. Misalnya emansipasi wanita dalam kehidupan masyarakat yang memunculkan wanita karier.
- 2) Penyimpangan bersifat negatif. Penyimpangan bersifat negatif adalah penyimpangan yang bertindak ke arah nilai-nilai sosial yang dianggap rendah dan selalu mengakibatkan hal yang buruk. Bobot penyimpangan negatif didasarkan pada kaidah sosial yang dilanggar. Pelanggaran terhadap kaidah susila dan adat istiadat pada umumnya dinilai lebih berat dari pada pelanggaran terhadap tata cara dan sopan santun. Bentuk penyimpangan yang bersifat negatif antara lain sebagai berikut:
  - (1) Penyimpangan primer (primary deviation). Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang dilakukan seseorang yang hanya bersifat temporer dan tidak berulang-ulang. Seseorang yang melakukan penyimpangan primer masih diterima di masyarakat karena hidupnya tidak didominasi oleh perilaku menyimpang tersebut. Misalnya, siswa yang terlambat, pengemudi yang sesekali melanggar peraturan lalu lintas, dan orang yang terlambat membayar pajak.
  - (2) Penyimpangan sekunder (secondary deviation). Penyimpangan sekunder adalah perilaku menyimpang yang nyata dan seringkali terjadi, sehingga berakibat cukup parah serta mengganggu orang lain. Misalnya orang yang terbiasa minum-minuman keras dan selalu pulang dalam keadaan mabuk, serta seseorang yang melakukan tindakan

pemeriksaan. Tindakan penyimpangan tersebut cukup meresahkan masyarakat dan mereka biasanya di cap masyarakat sebagai “pencuri”, “pemabuk”, “penodong dan “pemeriksa”. Julukan itu makin melekat pada si pelaku setelah ia ditangkap polisi dan diganjar dengan hukuman.

b. Bentuk penyimpangan berdasarkan pelakunya, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

1) Penyimpangan individual (*individual deviation*).

Penyimpangan individual adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menyimpang dari norma-norma suatu kebudayaan yang telah mapan. Misalnya, seseorang bertindak sendiri tanpa rencana melaksanakan suatu kejahatan, seperti: mencuri, menodong, dan memeras. Penyimpangan individu berdasarkan kadar penyimpangannya dibagi menjadi lima, yaitu sebagai berikut.

- a) Pembandel yaitu penyimpangan yang terjadi karena tidak patuh pada nasihat orang tua agar mengubah pendiriannya yang kurang baik.
- b) Pembangkang yaitu penyimpangan yang terjadi karena tidak taat pada peringatan orang-orang.
- c) Pelanggar yaitu penyimpangan yang terjadi karena melanggar norma-norma umum yang berlaku dalam masyarakat.
- d) Perusuh atau penjahat yaitu penyimpangan yang terjadi karena mengabaikan norma-norma umum, sehingga menimbulkan kerugian harta benda atau jiwa di lingkungannya.
- e) Munafik yaitu penyimpangan yang terjadi karena tidak menepati janji, berkata bohong, mengkhianati kepercayaan, dan berlagak membela.

Yang termasuk dalam tindak penyimpangan individual antara lain:

- (a) Penyalahgunaan narkoba. Merupakan bentuk penyelewengan terhadap nilai, norma sosial dan agama. Contoh pemakaian obat terlarang/narkoba antara lain: Narkotika

- (candu, ganja, putau). Psikotropika (ectassy, magadon, amphetamin). Alkoholisme.
- (b) Proses sosialisasi yang tidak sempurna. Apabila seseorang dalam kehidupannya mengalami sosialisasi yang tidak sempurna, maka akan muncul penyimpangan pada perilakunya. Contohnya: seseorang menjadi pencuri karena terbentuk oleh lingkungannya yang banyak melakukan tidak ketidakhujuran, pelanggaran, pencurian dan sebagainya.
  - (c) Pelacuran. Pelacuran dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan menyerahkan diri kepada umum untuk dapat melakukan perbuatan seksual dengan mendapatkan upah. Pelacuran lebih disebabkan oleh tidak masaknya jiwa seseorang atau pola kepribadiannya yang tidak seimbang. Contoh: seseorang menjadi pelacur karena mengalami masalah (ekonomi, keluarga dsb), Lesbianisme dan Homosexual, Sodomi, Transvestitisme, Sadisme, Pedophilia, Perzinahan, Kumpul kebo.
  - (d) Tindak kejahatan atau criminal. Tindakan yang bertentangan dengan norma hukum, sosial dan agama. Yang termasuk ke dalam tindak kriminal antara lain: pencurian, penipuan, penganiayaan, pembunuhan, perampokan dan pemerkosaan.
  - (e) Gaya hidup. Penyimpangan dalam bentuk gaya hidup yang lain dari perilaku umum atau biasanya. Penyimpangan ini antara lain: (1) Sikap arogansi, kesombongan terhadap sesuatu yang dimilikinya seperti kepandaian, kekuasaan, kekayaan (2) Sikap eksentrik, perbuatan yang menyimpang dari biasanya, sehingga dianggap aneh, misalnya laki-laki beranting di telinga, rambut gondrong dsb.
  - (f) Penyimpangan Kolektif (Group Deviation). Penyimpangan kolektif yaitu: penyimpangan yang dilakukan secara bersama-sama atau secara berkelompok. Penyimpangan ini dilakukan oleh sekelompok orang yang beraksi secara bersama-sama (kolektif). Mereka patuh pada norma kelompoknya yang kuat dan biasanya bertentangan dengan

norma masyarakat yang berlaku. Penyimpangan yang dilakukan kelompok, umumnya sebagai akibat pengaruh pergaulan/teman. Kesatuan dan persatuan dalam kelompok dapat memaksa seseorang ikut dalam kejahatan kelompok, supaya jangan disingkirkan dari kelompoknya. Penyimpangan yang dilakukan secara kelompok/kolektif antara lain:

2) Kenakalan remaja

Karena keinginan membuktikan keberanian dalam melakukan hal-hal yang dianggap bergengsi, sekelompok orang melakukan tindakan-tindakan menyerempet bahaya, misalnya kebut-kebutan, membentuk geng-geng yang membuat onar dsb.

3) Tawuran/perkelahian pelajar

Perkelahian antar pelajar termasuk jenis kenakalan remaja yang pada umumnya terjadi di kota-kota besar sebagai akibat kompleksnya kehidupan di kota besar. Demikian juga tawuran yang terjadi antar kelompok/etnis/warga yang akhir-akhir ini sering muncul. Tujuan perkelahian bukan untuk mencapai nilai yang positif, melainkan sekedar untuk balas dendam atau pamerkekuatan/unjuk kemampuan.

4) Penyimpangan kebudayaan

Karena ketidakmampuan menyerap norma-norma kebudayaan kedalam kepribadian masing-masing individu dalam kelompok maka dapat terjadi pelanggaran terhadap norma-norma budayanya. Contoh: tradisi yang mewajibkan mas kawin yang tinggi dalam masyarakat tradisional banyak ditinggalkan karena tidak lagi sesuai dengan tuntutan zaman ( Sumber: [http://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku\\_menyimpang](http://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku_menyimpang))

5. Dampak Penyimpangan Sosial Terhadap Masyarakat

Seorang pelaku penyimpangan senantiasa berusaha mencari kawan yang sama untuk bergaul bersama, dengan tujuan supaya mendapatkan 'teman'. Lama kelamaan berkumpullah berbagai individu pelaku penyimpangan menjadi penyimpangan kelompok, akhirnya bermuara kepada penentangan terhadap norma masyarakat. Dampak yang ditimbulkan selain terhadap individu juga terhadap kelompok/

masyarakat. Dampak apa saja yang muncul akibat adanya tindak penyimpangan terhadap kelompok masyarakat?

Kriminalitas. Tindak kejahatan, tindak kekerasan seorang kadangkala hasil penularan seorang individu lain, sehingga tindak kejahatan akan muncul berkelompok dalam masyarakat. Contoh: seorang residivis dalam penjara akan mendapatkan kawan sesama penjahat, sehingga sekeluarnya dari penjara akan membentuk 'kelompok penjahat', sehingga dalam masyarakat muncullah kriminalitas-kriminalitas baru.

Terganggunya keseimbangan social. Robert K. Merton mengemukakan teori yang menjelaskan bahwa perilaku menyimpang itu merupakan penyimpangan melalui struktur sosial. Karena masyarakat merupakan struktur sosial, maka tindak penyimpangan pasti akan berdampak terhadap masyarakat yang akan mengganggu keseimbangan sosialnya. Contoh: pemberontakan, pecandu obat bius, gelandangan, pemabuk dsb.

Pudarnya nilai dan norma. Karena pelaku penyimpangan tidak mendapatkan sangsi yang tegas dan jelas, maka muncullah sikap apatis pada pelaksanaan nilai-nilai dan norma dalam masyarakat. Sehingga nilai dan norma menjadi pudar kewibawaannya untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat. Juga karena pengaruh globalisasi di bidang informasi dan hiburan memudahkan masuknya pengaruh asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia mampu memudarkan nilai dan norma, karena tindak penyimpangan sebagai eksesnya. Contoh: karenapengaruh film-film luar yang mempertontonkan tindak penyimpangan yang dianggap hal yang wajar disana, akan mampu menimbulkan orang yang tidak percaya lagi pada nilai dan norma di Indonesia.

#### 6. Upaya-upaya Mengantisipasi Penyimpangan Sosial.

Antisipasi adalah usaha sadar yang berupa sikap, perilaku atau tindakan yang dilakukan seseorang melauai langkah-langkah tertentu untuk menghadapi peristiwa yang kemungkinan terjadi. Jadi sebelum tindak penyimpangan terjadi atau akan terjadi seseorang telah siap dengan berbagai 'perisai' untuk menghadapinya. Upaya mengantisipasi tersebut melalui:

##### a. Penanaman Nilai dan Norma Yang Kuat

Penanaman nilai dan norma pada seseorang individu melalui proses sosialisasi. Adapun tujuan proses sosialisasi antara lain sebagai berikut: pembentukan konsep diri, pengembangan keterampilan, pengendalian diri, pelatihan komunikasi, pembiasaan aturan. Dengan melihat tujuan sosialisasi tersebut jelas ada penanaman nilai dan norma. Apabila tujuan sosialisasi tersebut terpenuhi pada seseorang individu dengan ideal, niscaya tindak penyimpangan tidak akan dilakukan oleh si individu tersebut.

b. Pelaksanaan Peraturan Yang Konsisten

Segala bentuk peraturan yang dikeluarkan pada hakekatnya adalah usaha mencegah adanya tindak penyimpangan, sekaligus juga sebagai sarana/alat penindak laku penyimpangan. Namun apabila peraturan-peraturan yang dikeluarkan tidak konsisten justru akan dapat menimbulkan tindak penyimpangan. Apa yang dimaksud dengan konsisten? Konsisten adalah satu dan lainnya saling berhubungan dan tidak bertentangan atau apa yang disebut dengan ajeg.

c. Berkepribadian Kuat dan Teguh

Apa yang dimaksud dengan Kepribadian? Menurut Theodore M. Newcomb kepribadian adalah: Kebiasaan, sikap-sikap dan lain-lain, sifat yang khas yang dimiliki seseorang yang berkembang apabila orang tadi berhubungan dengan orang lain. Seseorang disebut berkepribadian, apabila seseorang tersebut siap memberi jawaban dan tanggapan (positif) atas suatu keadaan. Apabila seseorang berkepribadian teguh ia akan mempunyai sikap yang melatarbelakangi semua tindakannya. Dengan demikian ia akan mempunyai pola pikir, pola perilaku, pola interaksi yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakatnya.

7. Upaya-Upaya Mengatasi Penyimpangan Sosial

Sebelum kita menemui penyimpangan sosial terjadi dalam masyarakat, secara pribadi individu hendaklah sudah berupaya mengantisipasinya. Namun, apabila penyimpangan sosial terjadi juga, kita masing-masing berusaha untuk mengatasinya. Langkah-langkah apa yang dapat kita lakukan?

a. Sanksi Yang Tegas

Apa itu sanksi? Sanksi yaitu persetujuan atau penolakan terhadap perilaku tertentu. Persetujuan adalah sanksi positif, sedangkan penolakan adalah sanksi negatif yang mencakup pemulihan keadaan, pemenuhan keadaan dan hukuman. Sanksi diperlukan untuk menjamin tercapainya tujuan dan dipatuhinya norma-norma. Pada pelaku penyimpangan sudah selayaknya mendapatkan sanksi yang tegas, yang berupa hukuman yang tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku demi pemulihan keadaan masyarakat untuk tertib dan teratur kembali.

b. Penyuluhan-Penyuluhan

Melalui jalur penyuluhan, penataran ataupun diskusi-diskusi dapat disampaikan kepada masyarakat penyadaran kembali pelaksanaan nilai, norma dan peraturan yang berlaku. Kepada pelaku penyimpangan sosial kesadaran kembali untuk berlaku sesuai dengan nilai, norma dan peraturan yang berlaku yang telah dilanggarnya, harus melalui penyuluhan secara terus menerus dan berkesinambungan. Terlebih-lebih pada pelaku tindak kejahatan/ kriminal. Peran lembaga-lembaga agama, kepolisian, pengadilan, Lembaga Permasyarakatan (LP) sangat diharapkan untuk mengadakan penyuluhan-penyuluhan ter-sebut.

c. Rehabilitasi Sosial

Untuk mengembalikan peranan dan status pelaku penyimpangan ke dalam masyarakat kembali seperti keadaan sebelum penyimpangan terjadi, itulah yang dimaksud dengan Rehabilitasi. Panti-panti rehabilitasi sosial sangat dibutuhkan untuk pelaku penyimpangan tertentu, misalnya Panti Rehabilitasi Anak Nakal, Pecandu Narkoba, Wanita Tuna Susila dsb.

8. Sikap Yang Cocok Dalam Menghadapi Penyimpangan Sosial

Dalam menghadapi baik sebelum maupun sesudah terjadinya penyimpangan sosial kita perlu bersikap. Sikap-sikap apa saja yang dapat kita perbuat?

a. Tidak Mudah Terpengaruh

Masih ingat dengan kepribadian? Asal kita punya kepribadian yang kuat dan teguh niscaya kita tidak mudah atau gampang terpengaruh pada hal-hal yang tidak baik atau

menyimpang. Seandainya setiap insan/individu masing-masing mempunyai kepribadian yang matang, maka pengaruh buruk tidak akan bisa membuatnya berperilaku menyimpang, dunia ini akan damai, tenang dan tentram. Semoga!

b. Berpikir Positif (*Positive Thinking*)

Segala sesuatu yang kita pikirkan hendaknya mengenai hal-hal yang baik-baik saja (positif). Dengan berpikir positif maka kita akan berperilaku dan berbuat hal yang positif pula. Penyimpangan sosial tidak akan muncul dari individu-individu yang berpikir positif (*positive thinking*). Kepada pelaku tindak penyimpangan kita juga harus mampu menunjukkan sikap *positive thinking*, sehingga pelaku penyimpangan tersebut akan mampu dan mau meneladanikita, yang pada akhirnya dia akan tidak lagi berperilaku menyimpang.

c. Mengurangi Arogansi dan Sikap Eksentrik

Tanpa adanya kesombongan dan menonjolkan sifat unik/eksentrik kita, maka tindakan/pelaku penyimpangan tidak akan muncul. Kenapa? Karena apabila kita memiliki dua sikap tersebut akan menimbulkan tindakan penyimpangan serta pelaku penyimpang yang lain akan merasa dirinya tersaingi sehingga ia akan berbuat lagi penyimpangan demi penyimpangan.

Pemahaman usaha mengantisipasi dan mengatasi penyimpangan sosial telah berakhir. Kami harap Anda sudah mengerti dan paham betul. Guna lebih memperdalam pemahaman Anda, marilah kita cari contoh-contoh konkritnya, dari masing-masing upaya mengantisipasi dan mengatasi penyimpangan sosial dari dalam tabel berikut ini sebelum Anda mengerjakan tugas-tugas. (<http://nilaieka.blogspot.com/2009/02/materi-perilaku-menyimpang-2.html>)

9. Teori-Teori Umum tentang Perilaku Menyimpang

Teori-teori umum tentang penyimpangan berusaha menjelaskan semua contoh penyimpangan sebanyak mungkin dalam bentuk apapun (misalnya kejahatan, gangguan mental, bunuh diri dan lain-lain). Berdasarkan perspektifnya penyimpangan ini dapat digolongkan dalam dua teori utama. Perspektif patologi sosial menyamakan masyarakat dengan suatu organisme biologis dan penyimpangan disamakan dengan

kesakitan atau patologi dalam organisme itu, berlawanan dengan model pemikiran medis dari para psikolog dan psikiatris. Perspektif disorganisasi sosial memberikan pengertian penyimpangan sebagai kegagalan fungsi lembaga-lembaga komunitas lokal. Masing-masing pandangan ini penting bagi tahap perkembangan teoritis dalam mengkaji penyimpangan. Teori-Teori Sosiologi tentang Perilaku Menyimpang

a. Teori Anomi.

Teorianomi adalah teori struktural tentang penyimpangan yang paling penting selama lebih dari lima puluh tahun. Teori anomie menempatkan ketidakseimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan, di mana tujuan-tujuan budaya lebih ditekankan dari pada cara-cara yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan budaya itu. Individu dan kelompok dalam masyarakat seperti itu harus menyesuaikan diri dan beberapa bentuk penyesuaian diri itu bisa jadi sebuah penyimpangan. Sebagian besar orang menganut norma-norma masyarakat dalam waktu yang lama, sementara orang atau kelompok lainnya melakukan penyimpangan. Kelompok yang mengalami lebih banyak ketegangan karena ketidakseimbangan ini (misalnya orang-orang kelas bawah) lebih cenderung mengadaptasi penyimpangan kelompok lainnya.

b. Teori Sosiologi.

Teori sosiologi, teori belajar memandang penyimpangan muncul dari konflik normatif di mana individu dan kelompok belajar norma-norma yang membolehkan penyimpangan dalam keadaan tertentu. Pembelajaran itu mungkin tidak kentara, misalnya saat orang belajar bahwa penyimpangan tidak mendapat hukuman. Tetapi pembelajaran itu bisa juga termasuk mengadopsi norma-norma dan nilai-nilai yang menetapkan penyimpangan diinginkan atau dibolehkan dalam keadaan tertentu. Teori Differential Association oleh Sutherland adalah teori belajar tentang penyimpangan yang paling terkenal. Walaupun teori ini dimaksudkan memberikan penjelasan umum tentang kejahatan, dapat juga diaplikasikan dalam bentuk-bentuk penyimpangan lainnya. Sebenarnya setiap teori sosiologis tentang penyimpangan

mempunyai asumsi bahwa individu disosialisasikan untuk menjadi anggota kelompok atau masyarakat secara umum.

c. Teori Labeling

Teori-teori umum tentang penyimpangan mencoba menjelaskan semua bentuk penyimpangan. Tetapi teori-teori terbatas lebih mempunyai lingkup penjelasan yang terbatas. Beberapa teori terbatas adalah untuk jenis penyimpangan tertentu saja, atau untuk bentuk substantif penyimpangan tertentu (seperti alkoholisme dan bunuh diri), atau dibatasi untuk menjelaskan tindakan menyimpang bukan perilaku menyimpang. Dalam bab ini perpektif-perpektif labeling, kontrol dan konflik adalah contoh-contoh teori-teori terbatas yang didiskusikan. Perspektif labeling mengetengahkan pendekatan interaksionisme dengan berkonsentrasi pada konsekuensi interaksi antara penyimpang dengan agen kontrol sosial. Teori ini memperkirakan bahwa pelaksanaan kontrol sosial menyebabkan penyimpangan, sebab pelaksanaan kontrol sosial tersebut mendorong orang masuk ke dalam peran penyimpang. Ditutupnya peran konvensional bagi seseorang dengan pemberian stigma dan label, menyebabkan orang tersebut dapat menjadi penyimpang sekunder, khususnya dalam mempertahankan diri dari pemberian label. Untuk masuk kembali ke dalam peran sosial konvensional yang tidak menyimpang adalah berbahaya dan individu merasa teralienasi. Menurut teori labeling, pemberian sanksi dan label yang dimaksudkan untuk mengontrol penyimpangan malah menghasilkan sebaliknya.

d. Teori Kontrol

Perspektif kontrol adalah perspektif yang terbatas untuk penjelasan delinkuensi dan kejahatan. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Kelompok-kelompok yang lemah ikatan sosialnya (misalnya kelas bawah) cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional. Jika seseorang merasa dekat dengan kelompok konvensional, sedikit sekali kecenderungan menyimpang dari aturan-aturan kelompoknya. Tapi jika ada jarak

sosial sebagai hasil dari putusanya ikatan, seseorang merasa lebih bebas untuk menyimpang.

e. Teori Konflik

Teori konflik adalah pendekatan terhadap penyimpangan yang paling banyak diaplikasikan kepada kejahatan, walaupun banyak juga digunakan dalam bentuk-bentuk penyimpangan lainnya. Ia adalah teori penjelasan norma, peraturan dan hukum daripada penjelasan perilaku yang dianggap melanggar peraturan. Peraturan datang dari individu dan kelompok yang mempunyai kekuasaan yang mempengaruhi dan memotong kebijakan publik melalui hukum. Kelompok-kelompok elit menggunakan pengaruhnya terhadap isi hukum dan proses pelaksanaan sistem peradilan pidana. Norma sosial lainnya mengikuti pola berikut ini. Beberapa kelompok yang sangat berkuasa membuat norma mereka menjadi dominan, misalnya norma yang menganjurkan hubungan heteroseksual, tidak kecanduan minuman keras, menghindari bunuh diri karena alasan moral dan agama.

10. Kenakalan Remaja Sebagai Perilaku Menyimpang

a. Pengertian Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Para ahli pendidikan sependapat bahwa remaja adalah mereka yang berusia 13-18 tahun. Pada usia tersebut, seseorang sudah melampaui masa kanak-kanak, namun masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ia berada pada masa transisi. Definisi kenakalan remaja menurut para ahli

- 1) Kartono, ilmuwan sosiologi, menjelaskan bahwa kenakalan remaja atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *juvenile delinquency* merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang".
- 2) Santrock, menjelaskan "Kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjaditindakan kriminal."

b. Jenis-Jenis dan Penyebab Kenakalan Remaja

Jenis-jenis penyimpangan kenakalan remaja akibat pengaruh globalisasi sering kita lihat di media masa baik cetak maupun elektronik, antara lain; Penyalahgunaan narkoba, Seks bebas, Tawuran antara pelajar, dll. Penyebab terjadinya kenakalan remaja atau perilaku 'nakal' remaja bisa disebabkan oleh faktor dari remaja itu sendiri (internal) maupun faktor dari luar (eksternal).

Faktor internal: 1) Krisis identitas. Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. 2) Kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah lakunya yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku 'nakal'. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya.

Faktor eksternal: 1) Keluarga. Perceraian orangtua, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga, atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun, seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak, bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja. 2) Pengaruh Kawan Sepermainan atau teman sebaya. Di kalangan remaja, memiliki banyak kawan adalah merupakan satu bentuk prestasi tersendiri. Makin banyak kawan, makin tinggi nilai mereka di mata teman-temannya. Apalagi mereka dapat memiliki teman dari kalangan terbatas. Misalnya, anak orang yang paling kaya di kota itu, anak pejabat pemerintah setempat bahkan mungkin pusat atau pun anak orang terpandang lainnya. Di jaman sekarang, pengaruh kawan bermain bukan hanya membanggakan si remaja saja tetapi bahkan juga pada orang tuanya. Orang tua juga senang dan bangga kalau anaknya mempunyai teman bergaul dari kalangan tertentu tersebut. Padahal, kebanggaan ini adalah semu sifatnya. Malah kalau tidak dapat dikendalikan, pergaulan itu akan menimbulkan kekecewaan nantinya. Sebab kawan dari kalangan

tertentu pasti juga mempunyai gaya hidup yang tertentu pula. Apabila si anak akan berusaha mengikuti tetapi tidak mempunyai modal ataupun orangtua tidak mampu memenuhinya maka anak akan menjadi frustrasi. Apabila timbul frustrasi, maka remaja kemudian akan melarikan rasa kekecewaannya itu pada narkoba, obat terlarang, dan lain sebagainya. Pengaruh kawan ini memang cukup besar. <http://www.scribd.com/doc/25032629/> -Remaja-Sebagai-Perilaku-Menyimpang-Candera

## Daftar Pustaka

- Abdulsyani. 2002. *Sosiologi Skemetika, Teori dan Terapan*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Depdiknas. 2010. *Kurikulum*. Jakarta : Graha Pustaka. Depdiknas
- Macionis, John. J. (1997). *Sociology (sixth edition)*. Prentice-Hall International, Inc.
- Mario La Panengke. 2000. Analisis Kemiskinan Pada Masyarakat nelayan. FISIP. Unila.
- Maryati, Kun dan Suryawati, Juju. 2006. Sosiologi untuk SMA dan Ma Kelas X. Jakarta : Esis. Hal: 75-82.
- Muin, Idianto. 2013. *Sosiologi untuk SMA/MA Kelompok Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga. Hal : 60 - 74.

- Ruddy, Agusyanto. 2007. Jaringan Sosial dalam Organisasi. . PT. Rajawali Pers. Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Hery Tjandrasari. J.S. Roucek. 1986. *Pengendalian Sosial*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Soerjono Soekanto. 1993. Beberapa teori sosiologi tentang struktur masyarakat. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Suyatno Bagong. 2008. *Jenis Macam Pengendalian Sosial dan Pengertian Pengendalian Sosial Pengetahuan sosiologi*.
- Schaefer, Richard T. 1989. *Sociology*. (in Collaboration with Robert P. Lamm) 3<sup>rd</sup> Editin. New York: McGraw-Hill, Inc.
- Waridah, Siti, Q., dkk. 2004. *Sosiologi Kurikulum 2004 Kelas 1 SMA*. Jakarta: Bumi Aksara.

## **BAB VI**

### **ILMU SOSIAL BEPARADIGMA GANDA**

Paradigma pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Khun yang menjadikan paradigma ini menempati posisi sentral ditengah perkembangan sosiologi hingga menempati kurun decade yang cukup lama, lalu gagasan ini yang menjadi pendorong bagi generasi setelahnya yaitu Robert Friedrichs (1970), Lodahl dan Cordon (1972) serta Philips (1973) dan juga Effrat (1973) yang ikut mempopulerkan istilah paradigma yang digagas oleh Thomas Khun

Paradigma adalah suatu pandangan yang fundamental (mendasar, prinsipiil, radikal) tentang sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dalam ilmu pengetahuan. Kemudian, bertolak dari suatu paradigma atau asumsi dasar tertentu seorang yang akan menyelesaikan permasalahan dalam ilmu pengetahuan tersebut membuat rumusan, baik yang menyangkut pokok permasalahannya, metodenya agar dapat diperoleh jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut Thomas Khun ilmu pengetahuan itu di dominasi oleh suatu paradigma tertentu pada waktu tertentu pula. Yaitu sautu pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan dari cabang ilmu tersebut. Tapi sayangnya, Thomas Khun tidak merumuskan dengan jelas tentang apa yang dimaksud dengan paradigma itu, bahkan istilah paradigma yang dipergunakan tak kurang dari dua puluh satu cara yang berbeda. Masterman mencoba meredusir kedua puluh satu konsep paradigma Khun yang berbeda itu menjadi tiga tipe, yaitu 1) Paradigma Metafisik 2) Paradigma Sosiologi 3) Parafigma Konstrak.

George Ritzer (1992) menulis secara spesifik paradigma-paradigma yang ada dalam sosiologi. Dalam bukunya 'Sociology: A Multiple Paradigm Science', Ritzer memaparkan tiga paradigma sosiologi sebagai ilmu sosial, yakni paradigma fakta sosial, definisi sosial dan perilaku sosial. Ketiga paradigma tersebut menegaskan bahwa sosiologi bukanlah ilmu yang berpandangan tunggal terhadap suatu pokok persoalan. Sosiologi adalah ilmu berparadigma multiple.

Paradigma fakta sosial ialah cara pandang yang meletakkan fakta sosial sebagai sesuatu yang nyata ada di luar individu, di luar self, di luar subjek. Penekanannya ialah fakta sosial memiliki realitasnya sendiri. Garis besar paradigma ini terbagi menjadi dua, yaitu struktur sosial dan institusi sosial. Struktur sosial dapat dicontohkan seperti kelas, kasta dan strata sosial. Institusi sosial misalnya, nilai, norma, peran dan posisi sosial. Teori structural-fungsional dan teori konflik dikategorikan oleh Ritzer ke dalam paradigma ini. Sosiolog yang mewakilinya, antara lain Durkheim dan Marx.

Paradigma definisi sosial ialah cara pandang yang menekankan bahwa realitas sosial bersifat subjektif. Eksistensi realitas sosial tidak terlepas dari individu sebagai aktor yang melakukan suatu tindakan. Struktur sosial dan institusi sosial dengan demikian dibentuk oleh interaksi individu. Melalui paradigma ini, tindakan sosial berusaha untuk dipahami dan diinterpretasikan secara subjektif. Teori tindakan Weber, teori interaksionisme simbolik, dramaturgi dan fenomenologi masuk dalam kategori paradigma ini.

Paradigma perilaku sosial ialah cara pandang yang memusatkan perhatiannya pada hubungan antara individu dengan lingkungannya. Realitas sosial merupakan realitas objektif yang dibentuk melalui perilaku-perilaku individu yang nyata dan empiris. Tingkah laku individu yang berinteraksi dengan lingkungannya merupakan bentuk dari realitas sosial itu sendiri. Teori perilaku atau behavioral dan teori pertukaran sosial Homans dan Blau dapat dikategorikan ke dalam paradigma ini.

Teori-teori sosiologi sejatinya dinamis dan tidak sempurna pada dirinya. Realitas sosial yang selalu berubah menuntut teori untuk menyesuainya. Teori-teori tersebut pada dasarnya juga merupakan cara pandang terhadap realitas sosial. Suatu realitas yang tidak bisa dijelaskan oleh satu teori, sangat mungkin dapat dijelaskan oleh teori yang lain. Semuanya saling melengkapi dalam disiplin ilmu sosiologi.

Secara lebih luas ketiga paradigma George Ritzer tersebut akan penulis uraikan berikut ini.

### **A. Paradigma Fakta Sosial**

Paradigma fakta sosial ini di ambil dari kedua karya Durkheim yang meletakkan landasan paradigma fakta sosial melalui karyanya *The Rules of Sociological Method* (1895) dan *Suicide* (1897). Fakta sosial inilah yang menjadi pokok persoalan penyelidikan sosiologi. Fakta sosial

dinyatakan oleh Emile Durkheim sebagai barang sesuatu (*thing*) yang berbeda dengan ide. Barang sesuatu menjadi objek penyelidikan dari seluruh ilmu pengetahuan. Ia tidak dapat dipahami melalui kegiatan mental murni (spekulatif). Tetapi untuk memahaminya diperlukan penyusunan data riil diluar pemikiran manusia.

Fakta sosial ini menurut Durkheim terdiri atas dua macam, yaitu; 1) Fakta social dalam bentuk material: Yaitu barang sesuatu yang dapat disimak, ditangkap, dan diobservasi. Fakta sosial inilah yang merupakan bagian dari dunia nyata contohnya arsitektur dan norma hukum. 2) Fakta social dalam bentuk non-material: Yaitu sesuatu yang ditangkap nyata (eksternal). Fakta ini bersifat inter subjective yang hanya muncul dari dalam kesadaran manusia, sebagai contoh egoisme, altruisme, dan opini.

Menurut Durkheim dari kedua fakta social itu yang bisa dijadikan objek kajian (penelitian/riset) hanya fakta social dalam bentuk metrial, sedangkan fakta sisial dalam bentuk non material tidak bisa dijadikan objek kajian (penelitian/riset).

Berbeda dengan pandangan Auguste Comte, dari kedua fakta sosial itu keduanya bisa dijadikan objek kajian (penelitian/riset). Menurut Comte, fakta social dalam bentuk non material itu berbentuk interpretasi, bisa juga disebut dunia angan-angan, dunia ide/gagasan, dunia dibalik yang tampak.

Menurut paradigma ini, fakta sosial menjadi pusat perhatian penyelidikan dalam sosiologi. Durkheim menyatakan bahwa fakta sosial itu dianggap sebagai barang sesuatu (*thing*) yang berbeda dengan ide. Ia berangkat dari realitas (segala sesuatu) yang menjadi obyek penelitian dan penyelidikan dalam studi sosiologi. Titik berangkat dan sifat analisisnya tidak menggunakan pemikiran spekulatif (yang menjadi khas filsafat), tapi untuk memahami realitas maka diperlukan penyusunan data riil di luar pemikiran manusia. Dan penelitian yang dihasilkannya pun bersifat deskriptif dan hanya berupa pemaparan atas data dan realitas yang terjadi.

Fakta sosial terdiri atas dua tipe, yaitu struktur sosial (*social structure*) dan pranata sosial (*social institution*). Menurut Ritzer, teori-teori yang mendukung paradigma fakta sosial ini adalah : Teori Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Teori Sistem, dan Teori Sosiologi Makro.

Teori Fungsionalisme Struktural dicetuskan oleh Robert K. Merton, yang menjadikan obyek analisa sosiologisnya adalah peranan sosial, pola-

pola institusional, proses sosial, organisasi kelompok, pengendalian sosial, dan sebagainya. Penganut teori ini cenderung melihat pada sumbangan satu sistem atau peristiwa terhadap sistem lain, dan secara ekstrim beranggapan bahwa semua peristiwa atau struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat.

Sedangkan Teori Konflik, yang tokoh utamanya adalah Ralp Dahrendorf, sebagai kebalikan dari teori pertama, menitikberatkan pada konsep tentang kekuasaan dan wewenang yang tidak merata pada sistem sosial sehingga bisa menimbulkan konflik. Dan tugas utama dalam menganalisa konflik adalah dengan mengidentifikasi berbagai peranan kekuasaan dalam masyarakat.

## **B. Paradigma Definisi Sosial**

Paradigma definisi ini mengacu pada apa yang ditegaskan oleh Weber sebagai tindakan sosial antar hubungan social. Inti tesisnya adalah "*tindakan yang penuh arti*" dari individu. Yang dimaksud adalah sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subyektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain.

Paradigma definisi sosial ini juga menyatakan bahwa pemikiran individu dalam masyarakat mempengaruhi struktur yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini sekalipun struktur juga berpengaruh terhadap pemikiran individu, akan tetapi yang berperan tetap individu dan pemikirannya.

Pemikiran ini dikembangkan oleh Max Weber untuk menganalisa tindakan sosial (*social action*). Bagi Weber, pokok persoalan sosiologi adalah bagaimana memahami tindakan sosial antar hubungan sosial, dalam arti "*tindakan yang penuh arti*" itu ditafsirkan untuk sampai pada penjelasan kausal.

Untuk mempelajari tindakan sosial, Weber menganjurkan metode analitiknya melalui penafsiran dan pemahaman (*interpretative understanding*) atau menurut terminologinya disebut dengan *verstehen*.

Ada tiga teori yang termasuk kedalam paradigma definisi sosial ini, yaitu; Teori Aksi (*action theory*) tokohnya Max Weber, Teori Interaksionisme Simbolik (*Simbolik Interactionism*), tokohnya G. H. Mead, dan Teori Fenomenologi (*Phenomenology*), tokohnya Alfred

Schutz. Ketiga teori tersebut mempunyai kesamaan ide dasarnya bahwa manusia adalah merupakan aktor yang kreatif dari realitas sosialnya.

### C. Paradigma Perilaku Sosial

Paradigma yang terakhir adalah Perilaku Sosial. Paradigma perilaku sosial ini menyatakan bahwa perilaku keajegan dari individu yang terjadi di masyarakat merupakan suatu pokok permasalahan. Dalam hal ini interaksi antarindividu dengan lingkungannya akan membawa akibat perubahan perilaku individu yang bersangkutan.

Paradigma ini dikembangkan oleh B. F. Skinner dengan meminjam pendekatan behaviorisme dari ilmu psikologi. Ia sangat kecewa dengan dua paradigma sebelumnya karena dinilai tidak ilmiah, dan dianggap bernuansa mistis. Menurutnya, obyek studi yang konkret-realistik itu adalah perilaku manusia yang nampak serta kemungkinan perulangannya (*behavioral of man and contingencies of reinforcement*). Skinner juga berusaha menghilangkan konsep *volunterisme* Parson dari dalam ilmu sosial, khususnya sosiologi. Yang tergabung dalam paradigma ini adalah Teori Behavioral Sociology dan Teori Exchange.

### D. Paradigma Gabungan

Dari ketiga paradigma di atas, Ritzer mengusulkan sebuah paradigma integratif yang menggabungkan kesemua paradigma di atas, yang kemudian disebut dengan istilah "*Multi-Paradigma*". Ritzer mengingatkan bahwa penggunaan paradigma fakta sosial akan memusatkan perhatian pada makro masyarakat, dan metode yang dipakai adalah interviu/kuesioner dalam penelitiannya. Sedangkan dalam paradigma definisi sosial lebih memusatkan perhatiannya kepada aksi dan interaksi sosial yang "ditelorkan" melalui proses berfikir, dan metodenya menggunakan model observasi dalam penelitian sosial. Maka jika paradigmanya adalah perilaku sosial maka perhatiannya dicurahkan pada "tingkah laku dan perulangan tingkah laku", dan metode yang dipakai lebih menyukai model eksperimen.

Ritzer kemudian menawarkan suatu exemplar paradigma yang terpadu, yang kuncinya adalah "tingkatan realitas sosial", yaitu makro-obyektif, makro-subyektif, mikro-obyektif, dan mikro-subyektif.

Berbeda dengan Ritzer, Ilyas Ba-Yunus membagi paradigma sosiologi ke dalam tiga bagian juga, yaitu: paradigma struktural-fungsional, paradigma konflik, dan interaksionisme simbolik. Paradigma pertama digagas oleh para sosiolog Eropa, yaitu Max Weber, Emile Durkheim, Vilfredo Pareto, dan yang pertama kalinya Talcott Parson. Paradigma ini didasarkan pada dua asumsi dasar: (1) masyarakat terbentuk atas substruktur-substruktur yang dalam fungsi mereka masing-masing, saling bergantung, sehingga perubahan yang terjadi dalam fungsi satu substruktur, akan mempengaruhi pada substruktur lainnya, dan (2) setiap substruktur yang telah mantap akan menopang aktivitas-aktivitas atau substruktur lainnya. Teori ini dikritik karena mengabaikan peranan konflik, ketidaksepakatan, perselisihan dan evolusi dalam menganalisis masyarakat. Pendekatan ini dianggap juga mendukung status-quo (apa yang sudah ada itu adalah baik), dan orang kemudian menduga bahwa teori ini membenarkan dan memajukan struktur kapitalistis demokrasi Barat.

Pendekatan yang dikembangkan oleh Karl Marx. Paradigma ini didasarkan pada dua asumsi, yaitu: (1) kegiatan ekonomi sebagai faktor penentu utama semua kegiatan masyarakat, dan (2) melihat masyarakat manusia dari sudut konflik di sepanjang sejarahnya. Marx, dalam Materialisme Historis-nya memasukkan determinisme ekonomi sebagai basis struktur yang dalam proses relasi sosial dalam tubuh masyarakat akan menimbulkan konflik antara kelas atas dan kelas bawah.

Habermas dalam membagi paradigma ilmu-ilmu sosial, termasuk juga kategori sosiologis. Pertama, paradigma instrumental. Dalam paradigma “instrumental” ini, pengetahuan lebih dimaksudkan untuk menaklukkan dan mendominasi obyeknya. Paradigma ini sesungguhnya adalah paradigma positivisme, atau dekat dengan paradigma fungsional. Positivisme adalah aliran filsafat dalam ilmu sosial yang mengambil cara kerja ilmu alam dalam menguasai benda, dengan kepercayaan pada universalisme dan generalisasi. Untuk itulah, positivisme mensyaratkan pemisahan fakta dengan nilai (value) agar didapati suatu pemahaman yang obyektif atas realitas sosial.

Kedua, paradigma interpretatif. Dasar dalam paradigma ini adalah fenomenologi dan hermeneutik, yaitu tradisi filsafat yang lebih menekankan pada minat yang besar untuk memahami. Semboyannya

adalah “biarkan fakta berbicara atas nama dirinya sendiri”. Yang ingin dicapai hanya memahami secara sungguh-sungguh, tapi tidak sampai pada upaya untuk melakukan pembebasan. Prinsipnya tetapi bebas nilai, walaupun kelompok paradigma ini kontra dengan positivisme.

Ketiga, paradigma kritik. Paradigma ini lebih dipahami sebagai proses katalisasi untuk membebaskan manusia dari segenap ketidakadilan. Prinsipnya sudah tidak lagi bebas nilai, dan melihat realitas sosial menurut perspektif kesejarahan (historisitas). Paradigma ini menempatkan rakyat atau manusia sebagai subyek utama yang perlu dicermati dan diperjuangkan. Positivisme telah menyebabkan determinisme dan dominasi irasional dalam masyarakat modern. Kelompok dalam paradigma ini biasanya diwakili oleh kalangan critical theory Madzhab Frankfurt.

## Daftar Pustaka

- George Ritzer. 1980. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. CV. Rajawali. 1980. Jakarta.
- Hauser Robert M. and Douglas K. Anderson. 1991. *Post-High School Plans and Aspirations of Lback and White High School Seniors: 1976-1986*. *Sociology of Educations* Vol. 64. No. 4 October 1991. p. 272.
- Malcolm Waters. 1994. *Modern Sociological Theory*. SAGE Publications. London. Thousand Oaks. New Delhi.
- Piter Berger and T. Luckmann. 1967. *The Social Construction of Reality*. Allen Lane. London.
- Robert H. Lauer. 1989. *Perspectives on Social Change*. (terj.) Alimanda Bina Aksara. Jakarta.
- Stephen Sanderson. 1991. *Macrosociology*. Haper Collis Publisher. Inc., terj., oleh Farid Wajdi. S. Menno. 1995 cet. Ke 2 *Sosiologi Makro*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

## **BAB VII**

### **LAPORA PENELITIAN**

**JUDUL:** Pengiriman TKI KeMalaysia Strategi Mengatasi Masyarakat Desa Kemiskinan Dan Biaya Pendidikan (Studi Kasus TKI Asal Jawa Tengah dengan Pendekatan Fenomenologi) Tahun 1

#### **BAB IPENDAHULUAN**

##### **A. Latar Belakang**

Secara sosiologis mobilitas penduduk baik yang permanen (migrasi) maupun non-permanen (sirkuler) merupakan fenomena yang telah berlangsung lama mengikuti perjalanan peradaban manusia. Perpindahan penduduk dari negara asal ke negara lain sering terjadi di hampir seluruh belahan dunia, dengan jumlah yang terus meningkat dan alasan yang beragam. Banyak alasan seseorang bermigrasi, antara lain; alasan kemiskinan (makna ekonomi), merubah nasib, meningkatkan status, (makna status sosial) untuk mengatsi biaya sekolah anak-anaknya (makna edukatif).

TKI merupakan bagian dari proses migrasi internasional. Pada awalnya, migrasi tenaga kerja ini terjadi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja jangka pendek (*short-terms laborshortages*), seperti yang terjadi di Amerika Serikat tahun 1950-an, dengan mendatangkan pekerja-pekerja asal Meksiko. Pertumbuhan penduduk yang lambat dikombinasikan dengan kondisi perekonomian yang cukup baik di kawasa Eropa Utara dan Eropa Barat pada tahun 1960 sampai pertengahan tahun 1970, juga membuka peluang bagi masuknya pekerja asing. (John Weeks, 1974: 203).

Di Indonesia, secara formal migrasi telah dimulai sejak tahun 1905 dengan tujuan untuk memenuhi permintaan kebutuhan pekerjaan perkebunan. Pemerintah Belanda waktu itu telah memindahkan 155 Kepala Keluarga dari Jawa ke Gedong Tataan, Sumatra Selatan (Mantra, 1988: 160).

Di Jawa Tengah juga terjadi migrasi, menurut Subadi (2013) dalam *Journal International Research on Humanities and Social Sciences*,

menjelaskan; *Nevertheless, the number of transmigration in Central Java decreased from 2003 to 2007. "In 2003, a transmigration target was 1,249 heads of households and only 1,087 heads of households did migrate (3,989 people). In 2007, a transmigration target was 856 heads of households but only 581 heads of household had migrated (2,158 people)".* (Jumlah migrasidi Jawa Tengah "pada tahun 2003 dari target 1.249 KK dapat terealisasi 1.087 KK dengan jumlah jiwa 3.989 orang, sedang pada tahun 2007 dari target 856 KK dapat terealisasi 581 KK dengan jumlah jiwa 2.158 orang").

Femomena migrasi di Jawa Tengah tersebut tidak bisa terlepas dengan jumlah penduduk, jumlah lowongan kerja dan jumlah pencari kerja, jika jumlah lowongan kerja pada suatu negara (Indonesia) lebih sedikit dari jumlah pencari kerja maka akan terjadi pengangguran. Solusinya adalah pengiriman tenaga kerja ke negara lain.

Berdasarkan study dokumentasi 2015 ditemukan data jumlah penduduk Jawa Tengah sebanyak 34, 67 juta. Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah pada tahun 2014 dicerminkan dengan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) sebanyak 25.181.967 orang. Jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2014 sebanyak 16.550.682 orang. Sedangkan jumlah pencari kerja Jawa Tengah Tahun 2015 (terhitung Januari-Mei 2015), total lowongan kerja Provinsi Jawa Tengah sebanyak 3.519, sedangkan total pencari kerja 13.271 orang, yang berarti terjadi pengangguran 9.752 orang. (Sumber: Disnakertranduk Prov. Jateng, 2015).

Angkatan kerja Tahun 2013 sebanyak 17.524.022 orang, jumlah yang bekerja 16.469.960 orang, dengan tingkat pengangguran sebanyak 1.054.062 orang. Sedangkan Angkatan kerja Tahun 2014 sebanyak 17.547.026 orang, jumlah yang bekerja 16.550.682 orang, dengan tingkat pengangguran SD 339.713 orang (34,11); SMP 262.746 orang (26,38); SMA 354.999 orang (35,63); D1-D3 14.660 orang (1,48); S1 26.226 orang (2,64).

Jumlah TKI Jawa Tengah ke luar negeri pada tahun 2014 sebanyak 41.445 orang TKI informal; dan 51.160 orang TKI formal, sedangkan pada tahun 2015 (Januari-Mei) sebanyak 12.258 orang TKI informal; dan 13.018 orang TKI formal. Sedangkan jumlah TKI Jawa Tengah ke Malaysia pada tahun 2013 sebanyak 4.750 orang TKI informal; dan 21.619 orang TKI formal. Pada tahun 2014 sebanyak 3.898 orang TKI informal;

dan 17.300 orang TKI formal. Pada tahun 2015 (Januari-Muni) sebanyak 1.024 orang TKI informal; dan 4.996 orang TKI formal. (Sumber data: Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan, dikutip 23 April, 2015).

Cukup tingginya angka pengangguran karenaterbatasnya lapangan kerja, meskipun telah diupayakan melalui pemberian pelatihan, pembinaan usaha mandiri, pembinaan sektor informal, peningkatan usaha ekonomi produktif dan perluasan kesempatan kerja ke luar negeri. Banyaknya pengangguran di Jawa Tengah akan menambah jumlah kemiskinan di Jawa Tengah, karena itu solusi untuk mengatasi kemiskinan di Jawa Tengah adalah pengiriman Tenaga Kerja ke luar negeri termasuk ke Malaysia.

Menurut Ahmad Kamil Mohamed (2007), bahwa; Malaysia merupakan salah satu negarapengimport buruh asing terbesar di Asia. Lebih kurang 20 % dari tenaga kerjanya terdiri dari pada warga asing, yang sebahagian besar ditempatkan di dalam bidang pembinaan, ladang kelapa sawit dan perkhidmatan domestik. Hampir setengah juta warga asing haram, kebanyakan warga Indonesia telah meninggalkan Malaysia semasa program pengampunan yang berakhir 28 Februari 2004. Keadaan ini telah menyebabkan kekurangan tenaga kerja yang banyak di Malaysia dan berdampak kerugian berjuta ringgit terhadap industri terbabit.

Indonesia menjadi salah satu sumber tenaga kerja terbesar di Malaysia, dan penyumbang TKI cukup besar adalah Propinsi Jawa Tengah, khususnya melalui kota Semarang. Bagi pemerintah Indonesia, arus TKI ke Malaysia adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah pengangguran (kemiskinsn) dan biaya pendidikan anak-anaknya, serta memberikan kontribusi bagi pemasukan devisa negara. Diperkirakan setiap tahun pemasukan devisa sebesar US\$ 2,6 juta dibawa masuk ke Indonesia oleh para TKI yang bekerja di luar negeri (Darwin, dkk., 2005: 280), menurut catatan Disnakertransduk remitan yang dikirim para TKI ke Jawa Tengah sebesar Rp. 926.085.803.912 pada tahun 2009. Penerimaan remittance TKI Jawa Tengah Tahun 2012-2014 (tahun 2012 Rp. 949.629.504.299; tahun 2013 Rp. 242.585.530.640; tahun 2014 RP. 1.591.515.609.090).

Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia pada satu sisi; 1) dibutuhkan pemerintah Propinsi Jawa Tengah, untuk mengatasi pengangguran (kemiskinan); 2) pekerjaan ini mampu mengubah status

ekonomi, sosial TKI, dan pendidikan anak-anaknya; 3) mampu menambah devisa negara. Pada sisi yang lain terdapat beberapa masalah antara lain; 1) banyak para TKI itu keberangkatannya ke Malaysia tanpa melalui prosedur resmi; 2) muncul banyak masalah yang dihadapi TKI di Malaysia, seperti penyiksaan TKI oleh majikan yang sampai hari ini belum tuntas, seperti kasus; Siti Hajar, Modesta Rengga Kaka dan lain-lain;

Sejumlah permasalahan tersebut di atas biasanya karena kurang faham apa yang dikehendaki oleh majikan dengan apa yang dikerjakan oleh pekerja wanita menjadi penyebab kemarahan majikan, termasuk hasil dari pekerjaannya tidak memuaskan (rendahnya kemampuannya), rendahnya kemampuan pembantu rumah, dan tingginya tuntutan majikan menjadi penyebab tidak puasnya majikan atas hasil pekerjaan pembantu rumah yang berdampak kemarahan dan penyiksaan, struktur kelembagaan yang lemah, ditambah agensi yang tidak melakukan kontrol terhadap majikan dan pembantu rumah asal Jawa Tengah juga menjadi salah satu penyebab kekerasan dan penyiksaan.

## **B. Permasalahan Penelitian**

Permasalahan penelitian ini adalah 1) Bagaimana model pengiriman TKI Indonesia ke Malaysia yang profesional sebagai alternatif mengatasi kemiskinan dan biaya pendidikan di Jawa Tengah? Masalah ini akan dikaji secara holistik dan integratif untuk menemukan model pengiriman TKI ke Malaysia yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang bersangkutan. 2) Bagaimana makna TKI Indonesia ke Malaysia, mengapa menjadi TKI di Malaysia, faktor-faktor apa sajakah yang mendorong mereka menjadi TKI di Malaysia? Masalah ini akan dikaji secara mendalam untuk menemukan makna TKI, alasan mereka menjadi TKI dan faktor utama yang mendorong mereka menjadi TKI di Malaysia. 3) Bagaimana sistem pelatihan calon Tenaga Kerja Indonesia yang profesional? Masalah ini akan dikaji untuk mengetahui sistem pelatihan calon Tenaga Kerja Indonesia yang profesional sebagai upaya mengatasi permasalahan yang disebabkan kemampuan TKI dari Indonesia. 4) Mengapa terjadi permasalahan TKI dari Indonesia di Malaysia, misalnya penyiksaan oleh majikan? Masalah ini akan dikaji secara integratif dan dari pandangan Indonesia-Malaysia. 5) Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Jawa Tengah mengurangi permasalahan TKI di Malaysia.

## **BAB II TUJUAN DAN MANFAAT**

### **A. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian tahun ini mengkaji dan mendiskripsikan: 1) Model pengiriman TKI Indonesia ke Malaysia yang profesional sebagai alternatif mengatasi kemiskinan dan biaya pendidikan di Jawa Tengah. 2) Makna TKI Indonesia ke Malaysia, mengapa menjadi TKI di Malaysia, faktor-faktor apa sajakah yang mendorong mereka menjadi TKI di Malaysia. 3) Sistem pelatihan calon Tenaga Kerja Indonesia yang professional. 4) Terjadinya permasalahan TKI dari Indonesia di Malaysia, misalnya penyiksaan oleh majikan. 5) Upaya pemerintah Daerah Jawa Tengah untuk mengurangi permasalahan TKI di Malaysia.

### **B. Manfaat Penelitian**

Manfaat peneltian ini memberikan sumangan ilmu pengetahuan tentang: 1) Model pengiriman TKI Indonesia ke Malaysia yang profesional sebagai alternatif mengatasi kemiskinan dan biaya pendidikan di Jawa Tengah. 2) Makna TKI Indonesia ke Malaysia, mengapa menjadi TKI di Malaysia, faktor-faktor apa sajakah yang mendorong mereka menjadi TKI di Malaysia. 3) Sistem pelatihan calon Tenaga Kerja Indonesia yang professional. 4) Terjadinya permasalahan TKI dari Indonesia di Malaysia, misalnya penyiksaan oleh majikan. 5) Upaya pemerintah Daerah Jawa Tengah untuk mengurangi permasalahan TKI di Malaysia.

### **C. Urgensi dan Hasil Penelitian**

#### **1. Urgensi Penelitian**

Urgensi penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam menyusun strategi kebijakan penataan kependudukan berkaitan dengan pengiriman TKI ke luar negeri sebagai upaya mengatasi kemiskinan pedesaan dan mengatasi biaya pendidikan anak-anaknya, strategi dalam menciptakan kesempatan kerja dan pengembangannya secara profesional, yang berkaitan dengan sistem informasi kesempatan kerja, jaringan sosial dan jaminan sosial; jaminan keamanan, dan kesehatan olehnegera penerima tenaga kerja Indonesia, dan lain sebagainya.

Hal ini mengingat masalah menciptakan kesempatan kerja dan pengembangannya di Indonesia sangat mendesak lebih-lebih dalam menghadapi permasalahan TKI dan krisis ekonomi yang berkepanjangan yang berdampak kesulitan pembiayaan pendidikan anak-anaknya, dalam hal ini isyarat dari Mc. Gee, dalam Abu-Lughod dan Hay eds., dalam Subadi, (2010: 16) bahwa di masa mendatang kebanyakan negara berkembang terutama yang penduduknya cukup besar seperti India dan Indonesia akan menghadapi masalah genting, kecuali bila berhasil dalam menyusun strategi dalam menciptakan kesempatan kerja dan pengembangannya.

## 2. Hasil yang Diharapkan

Hasil penelitian ini adalah terdeskripsinya; a) Model pengiriman TKI Indonesia ke Malaysia yang profesional sebagai alternatif mengatasi kemiskinan dan biaya pendidikan di Jawa Tengah. b) Makna TKI Indonesia ke Malaysia, mengapa menjadi TKI di Malaysia, faktor-faktor apa sajakah yang mendorong mereka menjadi TKI di Malaysia. c) Sistem pelatihan calon Tenaga Kerja Indonesia yang professional. d) Terjadinya permasalahan TKI dari Indonesia di Malaysia, misalnya penyiksaan oleh majikan. e) Upaya pemerintah Jawa Tengah untuk mengurangi permasalahan TKI di Malaysia.

## 3. Luaran Penelitian

Produk penelitian ini; 1) Buku Ajar Mata Kuliah “Pendidikan Ilmu Soekbud” ber ISBN. 2) Artikel seminar Nasional atau prosiding. 3) Artikel seminar internasional atau prosiding. 4) Artikel publikasi Jurnal Nasional terakreditasi.

## **BAB III STUDI PUSTAKA**

### **A. Teori Migrasi**

Migrasi selalu berhubungan dengan proses pengambilan keputusan. Teori yang cocok untuk memahami mekanisme tersebut adalah teori dorong-tarik (*push-pull theory*). Teori ini mengasumsikan bahwa setiap fenomena migrasi selalu berkaitan dengan daerah asal, daerah tujuan, dan bermacam-macam rintangan yang menghambat. Menurut Lee, ada empat faktor yang berpengaruh orang mengambil keputusan untuk melakukan

migrasi, yaitu; (1) Faktor yang terdapat di daerah asal, (2) faktor di daerah tujuan, (3) faktor rintangan, dan (4) faktor pribadi.

Faktor-faktor di daerah asal dan daerah tujuan dapat bersifat positif, negative atau bersifat netral. Faktor-faktor di daerah asal dikatakan positif kalau sifatnya mendorong migran, negatif kalau menghambat migran, dan netral kalau tidak berpengaruh terhadap migran. Sedangkan faktor-faktor di daerah tujuan dikatakan positif jika menarik calon migran, negatif kalau menghambat masuknya calon migran, dan netral kalau tidak berpengaruh terhadap migran (Lee, 1966, diterjemahkan oleh Daeng, ditinjau kembali oleh Mantra, 1987, ditinjau kembali oleh Subadi, 2004). Faktor-faktor itu terlihat dalam diagram sebagai tanda + (positif) dan – (negatif), faktor lain yang ditunjukkan dengan tanda 0 (netral) ialah faktor yang pada dasarnya tidak ada pengaruhnya sama sekali pada penduduk. Beberapa faktor itu mempunyai pengaruh yang sama terhadap beberapa orang, sedangkan ada faktor yang mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap seseorang.

Kesimpulan yang diambil dari penelitian migrasi Lee ini adalah: (1) Migrasi berkait erat dengan jarak, (2) Migrasi bertahap, (3) Migrasi arus dan migrasi arus balik. (4) Terdapat perbedaan antara desa dan kota mengenai kecendungan melakukan migrasi.(5)Motif ekonomi merupakan dorongan utama orang bermigrasi.

## **B. Kemiskinan di Jawa Tengah.**

Orang miskin di Jawa Tengah mencapai 4,733 juta jiwa (Heri Harsono, dalam **Sindonews.com**) mencata angka kemiskinan dan pengangguran di Jawa Tengah, masih cukup tinggi. Dari sekitar 32 juta penduduk yang tercatat sampai Maret 2013, jumlah angka kemiskinan di kawasan ini mencapai sekira 14,56 persen, atau 4,733 juta jiwa. Angka ini, memang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012, tetapi masih tetap memprihatinkan, dan membutuhkan berbagai upaya untuk terus mengentaskannya. <http://daerah.sindonews.com/read/2013/10/30/22/800181/orang-miskin-di-jawa-tengah-capai-4-733-juta-jiwa>.

Upaya untuk mengatasi angka kemiskinan di Jawa Tengah antara lain pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, misalnya pengiriman TKI ke Malaysia. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Malaysia sebagaimana dilaporkan oleh Harian Pikiran Rakyat 11 Mei 2004, terdapat 923.145 WNI yang berada di Malaysia pada tahun 2003, dari jumlah

tersebut 876.526 diantaranya adalah TKI dan sisanya pelajar. Sedangkan yang berstatus sebagai TKI mayoritas sebagai pekerja kasar, dan hanya 2.080 yang merupakan pekerja terampil. Demikian juga berdasarkan data yang tercatat di Atase Ketenagakerjaan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, jumlah TKI yang bekerja di berbagai sektor pekerjaan di Malaysia mengalami fluktuasi. TKI yang bekerja di sektor perkebunan pada tahun 2001 berjumlah 144.880 orang atau 26 persen.

Jumlah tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2003, yaitu berjumlah 175.219 orang atau 29 persen. Kemudian pada tahun 2004 jumlah tersebut mengalami penurunan, yaitu 164.195 atau 23 persen. Sektor industri, TKI yang bekerja di sektor ini pada tahun 2001 berjumlah 100.301 orang atau 18 persen. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sampai pada tahun 2003 berjumlah 111.579 atau 19 persen, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2004 berjumlah 114.946 orang atau 16 persen. Sektor konstruksi TKI yang bekerja pada sektor ini pada tahun 2001 berjumlah 133.735 orang. Jumlah ini mengalami penurunan hingga tahun 2003 yaitu berjumlah 103.577 atau 18 persen, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2004 yaitu berjumlah 186.991 atau 26 persen.

Jurnal Forum Geografi mencatat; migrasidi Jawa Tengah mengalami penurunan dari 2002 sampai 2007. Pada tahun 2003 target transmigrasi 1.249 kepala keluarganya hanya 1.087 kepala keluarga yang bermigrasi (3989 orang). Pada tahun 2007 target transmigrasi 856 kepala keluarga, hanya terpenuhi 581 kepala keluarga telah bermigrasi (2.158 orang). Jumlah pengangguran di Jawa Tengah pada tahun 2002 tercatat mencapai 984.234 (6,25%) pada usia produktif lebih dari 15 tahun, di antaranya 567.608 (57,67%) laki-laki dan 416.626 (42,33%) perempuan. Besarnya jumlah pengangguran di Jawa Tengah dan kesempatan kerjadi luar negeri telah mengakibatkan migrasi internasional dari Jawa ke negara lain, terutama ke Malaysia, hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi faktor dominan mendorong seseorang menjadi TKI ke negara-negara lain termasuk ke Malaysia. (Subadi, 2010).

### **C. Permasalahan Pendidikan**

Hingga saat ini masalah pendidikan masih menjadi perhatian khusus oleh pemerintah. Pasalnya Indeks Pembangunan Pendidikan untuk semua atau *education for all* (EFA) di Indonesia menurun tiap tahunnya. Tahun 2011 Indonesia berada diperingkat 69 dari 127 negara dan merosot dibandingkan tahun 2010 yang berada pada posisi 65. Indeks yang dikeluarkan tahun 2011 oleh UNESCO ini lebih rendah dibandingkan Brunei Darussalam 34.

Salah satu penyebab rendahnya indeks pembangunan pendidikan di Indonesia adalah tingginya jumlah anak putus sekolah. Sedikitnya setengah juta anak usia sekolah dasar (SD) dan 200 ribu anak usia SMP tidak dapat melanjutkan pendidikan. Data pendidikan tahun 2010 juga menyebutkan 1,3 juta anak usia 7-15 tahun terancam putus sekolah.

Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Bagaimana orang miskin bisa menyekolahkan anak-anaknya, kalau biaya pendidikan sangat tinggi, untuk masuk TK dan SDN saja saat ini dibutuhkan biaya Rp 500.000, sampai Rp 1.000.000. Bahkan ada yang memungut di atas Rp 1 juta. Masuk SLTP/SLTA bisa mencapai Rp 1 juta sampai Rp 5 juta.

### **D. Perencanaan Tenaga Kerja**

Lahirnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengisyaratkan bahwa Pemerintah berfungsi menyusun perencanaan tenagakerja sebagai dasar dan acuan penyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan pembangunan ketenaga-kerjaan, baik perencanaan ketenaga-kerjaan makro maupun perencanaan ketenaga-kerjaan mikro. Perencanaan tenagakerja makro dimaksudkan untuk menjamin pendayagunaan tenaga-tenaga kerja secara optimal dan produktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial serta pembuka kesempatan kerja produktif seluas-luasnya, baik secara internasional, nasional maupun diseluruh daerah. Perencanaan tenaga kerja mikro dimaksudkan untuk meningkatkan pendayagunaan tenagakerja secara optimal guna meningkat-

kan kinerja dan produktivitas perusahaan, instansi atau unit yang bersangkutan. (Payaman J Simanjuntak, 2003: 20)

Untuk penyusunan rencana tenaga kerja tersebut diperlukan informasi ketenaga-kerjaan meliputi; penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industri, kondisi lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja, serta jaminan sosial, kesehatan dan keamanan tenaga kerja.

Informasi ketenagakerjaan tersebut dihimpun dari semua instansi yang terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta. Lembaga pendidikan dan lembaga latihan misalnya perlu memberikan informasi mengenai jumlah dan kualitas lulusan serta jumlah putus sekolah. Perusahaan-perusahaan perlu memberikan informasi mengenai lowongan kerja, kebutuhan latihan, upah, kecelakaan kerja, dan lain-lain.

#### **E. Penelitian yang Relevan**

Penelitian Hugo (1982). Penelitian ini menyoroiti dampak migrasi terhadap perekonomian keluarga. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa besarnya remitan migran akan menentukan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Kebanyakan remitan dari migran untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok, disimpulkan bahwa 40% remitan dari migran dipergunakan untuk membeli beras, sedangkan 60% dari remitan untuk biaya pendidikan saudara dan anak-anaknya.

Penelitian Mantra dan Sumantri (1988), berkesimpulan bahwa perpindahan penduduk di daerah penelitian mempunyai peranan cukup besar di dalam mengubah kehidupan ekonomi daerah pedesaan. Juga dalam penelitiannya terhadap perantau Minangkabau, menghasilkan bahwa dari segi ekonomi merantau memperhatikan efek positif sebagai tambahan ekonomi keluarga.

Penelitian Mulyantoro (1991) tentang *Migran Asal Lamongan dan Keadaan Ekonominya* diperoleh temuan bahwa Kota Kupang menjadi faktor penarik utama migran asal Lamongan karena penghasilan dan pendapatan yang lebih besar. Sedangkan faktor pendorong migran (di daerah asal) adalah penghasilan rendah, tidak memiliki lahan pertanian, tidak ada lapangan kerja. Adapun faktor penarik (di daerah tujuan) adalah penghasilan besar, mudah mencari pekerjaan, persaingan belum banyak.

Jurnal Internasional *Humanities and Social Sciences Research* (2013) mencatat: “Indonesia has been experiencing a massive migration among its population and migration-out is more prevalent. In fact, population mobility in Indonesia had begun since 1905. Formerly, this mobility was intended to meet the need for farming workers in the agriculture sector. At that time, the Dutch government had migrated 155 heads of households from Java to the Gedong Tataan of South Sumatra. The 1980 population census indicated that migration-out from Java involved 2,402,557 people and migration-in to Java recorded 1,804,115 people. In 1990, migration-out of Java had increased to 3,416,923 people and migration-in was 3,058,725 people” (Subadi, 2013).

## F. Road Map

1. Penelitian Tjipto Subadi (2004) berjudul: Migrasi Masyarakat Desa Tegalombo Sragen. Secara umum penelitian ini bertujuan; memahami fenomena migrasi sirkuler sebagai mobilitas penduduk dan gejala sosial dari proses dan makna yang dilihat sebagai realitas subjektif. Secara khusus penelitian ini bertujuan; memahami struktur masyarakat desa, pelaku migrasi sirkuler dan sebab-sebab mereka melakukan *migrasi sirkuler*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada analisis pemahaman dan pemaknaan, paradigmanya definisi sosial yang bergerak pada kajian mikro. Metode analisis data menggunakan *first order understanding* yakni meminta peneliti aliran ini menanyakan kepada subjek penelitian guna mendapatkan penjelasan yang benar, informasi inilah yang disebut eksternalisasi menurut pemahaman Berger. Selanjutnya peneliti melakukan *second order understanding* yakni peneliti memberikan interpretasi terhadap interpretasi subjek penelitian guna memperoleh suatu makna baru mengenai alasan yang mendasari tindakan mereka melakukan migrasi sirkuler, konstruksi sosial proses migrasi sirkuler dan maknanya, informasi inilah yang disebut objektivasi menurut pemahaman Berger.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa; struktur masyarakat desa terdiri dari; kuli kenceng, kuli setengah kenceng dan, kuli ngindung. Migrasi sirkuler dilakukan oleh sebagian masyarakat kuli setengah kenceng yang memiliki kesadaran jaringan, memiliki sedikit modal

untuk beralih mata pencaharian dari petani ke pedagang di daerah tujuan, memiliki jaringan sosial dengan migran lama, ada jaminan keamanan dan kesehatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Proses migrasi sirkuler menganut sistem siklus dan hubungan sepesukuan. Migrasi sirkuler memiliki banyak makna (*meaningfull*) yaitu makna ekonomi (materi) dan makna non-ekonomi, seperti; makna relegiusitas, makna kesadaran akan jaringan dan jaminan sosial, makna kesadaran akan ilmu pengetahuan, dan makna stratifikasi sosial.

2. Penelitian Tjipto Subadi (2008) berjudul: Migrasi Masyarakat Desa Tegalombo Sragen (Kajian Migrasi Sirkuler dari Perspektif Fenomenologi). Penelitian ini berkesimpulan bahwa; Struktur Masyarakat Desa terdiri dari: kuli kenceng, kuli setengah kenceng dan kuli ngindung. Migran Sirkuler dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat “kuli setengah kenceng” yang; (1) memiliki kesadaran jaringan dengan orang yang sedang *migrasi sirkuler* (2) memiliki sedikit modal untuk beralih mata pencaharian petani ke pedagang di daerah tujuan *migrasi sirkuler* (3) memiliki jaringan sosial dengan migran lama, jaminan keamanan dan jaminan kesehatan bagi dirinya dan bagi keluarga yang ditinggalkan. Proses Migrasi Sirkuler; Kelompok Kuli Setengah Kenceng → menghadapi kesulitan ekonomi (penghasilan rendah, susah mencari pekerjaan, gagal panen) → mempunyai jaringan sosial (hubungan dengan migran lama), sedikit modal, dan jaminan sosial seperti keamanan dan kesehatan bagi dirinya dan keluarga yang ditinggalkan → mengikuti saudara/migran yang sukses (diharapkan dapat mencarikan pekerjaan, memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal pada hari-hari pertama di daerah migran) → menjadi migran mandiri → mengajak saudaranya di desa untuk migrasi sirkuler, dan seterusnya.

Proses *Migrasi sirkuler* menggunakan sistem siklus yang teratur dan sistem sepesukuan. “Sistem siklus” menjelaskan bahwa *migrasi sirkuler* dilakukan dengan mengikuti *migran* berhasil, sedangkan sistem sepesukuan menjelaskan bahwa antara *migran* baru dengan *migran* lama masih memiliki hubungan keluarga atau sedesa. Keputusan Bermigrasi tidak bisa lepas dengan Jaringan sosial dan Jaminan sosial, Jaminan keamanan dan kesehatan.

Makna *Migrasi sirkuler* adalah (*meaningfull*, seperti (1) makna relegiusitas, (2) makna kesadaran akan jaringan., dan jaminan sosial, keamanan dan kesehatan (3) makna kesadaran akan ilmu pengetahuan, dan (5) makna stratifikasi sosial.

3. Penelitian Tjipto Subadi (2009) dengan judul; Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia (Studi Kasus TKI Asal Jawa Tengah dengan Pendekatan Fenomenologi).

Penelitian ini berkesimpulan, antara lain: Permasalahan utama terjadinya kasus penyiksaan terhadap TKI asal Jawa Tengah adalah karena faktor (1) Miskomunikasi, kesalahan komunikasi antara majikan dengan pembantu rumah menjadi penyebab kemarahan majikan (1) Rendahnya kompetensi, rendahnya kemampuan pembantu rumah, dan tingginya tuntutan majikan menjadi penyebab tidak puasnya majikan atas hasil pekerjaan pembantu rumah yang berdampak kemarahan dan penyiksaan (3) Perbedaan Kultur, kebiasaan sebagian majikan di Malaysia “tidak ada kesalahan besar atau kecil” dan “membantah dianggap melawan”. Kesalahan yang dilakukan oleh pembantu rumah harus mendapat hukuman. Pembantu rumah tidak boleh membantah, dan jika membantah dianggap melawan kepada majikan, sikap melawan kepada majikan ini harus mendapatkan hukuman yang berat. (4) Sikap Feodalistik, sikap feodal, perbudakan masih mempengaruhi majikan terhadap pembantu rumah, anggapan pembantu rumah disamakan dengan budak masih mewarisi sebagian majikan di Malaysia. (5) Lemahnya Struktur Kelembagaan, Kelemahan Agensi, agensi yang tidak melakukan kontrol terhadap majikan dan pembantu rumah asal Jawa Tengah juga menjadi salah satu penyebab kekerasan dan penyiksaan.

## **BAB 4 METODE PENELITIAN**

### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif fenomenologi dengan paradigma definisi sosial yang bergerak pada kajian mikro. Perspektif fenomenologi dengan paradigma definisi sosial ini akan memberi peluang individu sebagai subjek penelitian melakukan interpretasi, dan kemudian peneliti melakukan interpretasi terhadap interpretasi

itu sampai mendapatkan pengetahuan tentang: 1) Model pengiriman TKI Indonesia ke Malaysia yang profesional sebagai alternatif mengatasi kemiskinan dan biaya pendidikan di Jawa Tengah. 2) Makna TKI Indonesia ke Malaysia, mengapa menjadi TKI di Malaysia, faktor-faktor apa sajakah yang mendorong mereka menjadi TKI di Malaysia. 3) Sistem pelatihan calon Tenaga Kerja Indonesia yang profesional. 4) Terjadinya permasalahan TKI di Malaysia, misalnya penyiksaan oleh majikan. 5) Upaya pemerintah Jawa Tengah untuk mengurangi permasalahan TKI di Malaysia.

## **B. Subjek dan Informan Penelitian**

Subjek penelitian adalah TKI di Malaysia yang berasal dari Jawa Tengah. Sedangkan sampel yang dipilih sebagai subjek penelitian atas dasar pertimbangan kualitas keterandalan, sang informan ini sebagai sumber yang sungguh informatif.

Informan dipilih secara purposif (bukan secara acak), yaitu atas dasar apa yang peneliti ketahui tentang variasi-variasi yang ada atau elemen-elemen yang ada. Dalam hubungan ini, maka dalam proses pengumpulan data tentang suatu topik, bila variasi informasi tidak muncul maka peneliti tidak perlu lagi melanjutkannya dan kemudian mencari informasi (informan) baru, artinya jumlah informan bisa sangat sedikit (beberapa orang saja), tetapi bisa juga sangat banyak. Hal itu sangat tergantung pada; (1) pemilihan informan, (2) kompleksitas dan keragaman fenomena yang diteliti.

Setelah ditentukan informan penelitian sebagai subjek penelitian, untuk memperlancar peneliti dalam pengambilan data dibutuhkan informan lain yang dianggap memiliki/kaya informasi, dan dapat memberikan informasi yang benar, yaitu: a) Tetangga TKI, b) Keluarga TKI, c) PJTKI, d) Pejabat terkait di Malaysia, e) Pejabat terkait Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

## **C. Strategi dan Taktik Penelitian**

Ada dua strategi yang harus peneliti tempuh:

1. Peneliti menjalin hubungan komunikasi dengan ilmuwan di Malaysia, Mahasiswa dari Indonesia yang belajar di Malaysia. Strategi ini untuk memperlancar peneliti mencari informasi/ data dari penyalur/pengguna

TKI dari Indonesia di Malaysia, berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian ini.

2. Menjalin hubungan komunikasi dengan Pemerintah Indonesia (*Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan*), ini telah dilakukan dengan dibuktikan Surat Keterangan Mitra. Strategi yang kedua ini juga penting untuk memperlancar memperoleh data di dalam negeri.

Strategi dan taktik penelitian ini hanya dapat diperoleh jika peneliti sebelumnya telah menyatu dan mampu berinteraksi dengan masyarakat setempat (informan penelitian), maka langkah yang ditempuh berikutnya adalah: penciptaan "*rapport*". Menurut Faisal (1990) penciptaan *rapport* ini merupakan prasyarat yang amat penting. Peneliti tidak akan dapat berharap untuk memperoleh informasi secara produktif dari informan apabila tidak tercipta hubungan harmonis yang saling mempercayai antara pihak peneliti dengan pihak yang diteliti. Terciptanya hubungan harmonis satu dengan yang lain saling mempercayai, tanpa kecurigaan apapun untuk saling membuka diri, merupakan permasalahan yang berkaitan dengan penciptaan *rapport* (Faisal, 1990: 53).

Selanjutnya peneliti melakukan pengumpulan data penelitian kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

*Pertama*, pada awal penelitian peneliti berusaha mencari data TKI yang bermasalah (data dokumentasi dari *Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan* Provinsi), selanjutnya berusaha mencari alamat rumah, kemudian bersilaturahmi kepada Kepala Desa untuk menyampaikan tujuan bersilaturahmi, yaitu tugas penelitian.

*Kedua*, selanjutnya, peneliti segera mengadakan pencatatan data-data keadaan geografis dan data-data lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini, selain itu peneliti bersilaturahmi kepada keluarga TKI diantar perangkat desa.

*Ketiga*, langkah selanjutnya peneliti bertemu beberapa informan (TKI serta keluarganya) untuk mengadakan wawancara. Wawancara dengan mereka itu tidak hanya sekali dua kali, tetapi peneliti lakukan beberapa kali sampai peneliti bisa mendapatkan informasi yang benar dan sampai peneliti bisa menyusun laporan penelitian ini. Wawancara mendalam tersebut peneliti lakukan tidak hanya sekali tetapi peneliti lakukan beberapa kali dalam kurun waktu selama 6 bulan. Hal ini

peneliti lakukan untuk mendapatkan data yang benar dan data yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah sampai peneliti dapat membuat laporan ini secara tertulis.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan langsung terjun ke lapangan terutama untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan peserta TKI, majikan, dan PJTKI, untuk itu dibutuhkan metode (1) observasi (2) dokumentasi, dan (2) wawancara mendalam.

##### **1. Metode Observasi dan Dokumentasi**

Observasi dan dokumentasi ini digunakan untuk mempertahankan kebenaran ilmiah, sebagaimana ditegaskan oleh Gordon (1991), bahwa; “dasar-dasar pembatasan secara luas diterima oleh ilmuwan itu sendiri adalah *kesaksian empirik*, sebuah pernyataan adalah ilmiah jika diuji oleh observasi dan eksperimen.

Observasi dan Dokumentasi dalam suatu penelitian kualitatif lazimnya berkaitan dengan situasi sosial tertentu. Setiap situasi sosial setidaknya mempunyai tiga elemen utama, yaitu: (1) lokasi tempat suatu situasi sosial itu berlangsung (2) manusia-manusia pelaku atau *actors* yang menduduki status/posisi tertentu dan memainkan peranan-peranan tertentu, dan (3) kegiatan atau aktivitas peran pelaku pada lokasi/ tempat berlangsungnya sesuatu situasi sosial. Metode observasi dan dokumentasi ini digunakan dalam rangka mengumpulkan data yang memberikan gambaran tentang situasi setempat atau *social setting* yang menjadi konteks TKI. *Social setting* diperoleh melalui observasi dan dokumentasi yaitu melihat data lapangan dan mendengar informasi dari informan, dan cerita warga setempat. Sedangkan Metode dokumentasi, digunakan untuk memperoleh data-data antara lain: (1) keadaan geografis daerah penelitian, (2) data jumlah pelaku TKI, (3) data pribadi pelaku TKI, (4) data PJTKI, (5) data mjikan dan catatan lain yang relevan dengan penelitian.

Relevansi penggunaan metode observasi dan dokumentasi dengan permasalahan adalah, dalam rangka peneliti memperoleh data pelengkap, metode ini digunakan juga untuk mencocokkan beberapa informasi dengan data yang ada di lapangan.

##### **2. Metode Wawancara Mendalam**

Wawancara ini peneliti gunakan dalam situasi dialogis maupun wawancara mendalam (*in-depth*) dengan subjek penelitian, peneliti wawancara dengan pelaku TKI yang sukses dan TKI yang gagal dan bermasalah. Selanjutnya, peneliti juga wawancara dengan orang Indonesia yang bekerja di Malaysia, Perwakilan PJTKI, Pemerintah Indonesia. Untuk melengkapi data peneliti wawancara dengan tokoh masyarakat dan sesepuh desa dan kepada informan lain yang bisa memberikan informasi dengan benar.

Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan subjek penelitian tersebut dengan alasan karena penelitian ini ingin memperoleh realitas senyatanya (*emic-factors*), karena itu peneliti harus memperoleh data langsung dari subjek penelitian agar diperoleh data yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hasil dari wawancara mendalam tersebut kemudian berikutnya dilakukan transkripsi, dan pemahaman agar ada kejelasan perbedaan antara bahasa sehari-hari dengan bahasa literatur sehingga dapat diperoleh bahasa ilmiah yang tepat.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Pada tahap analisis data ini menurut Dilthey, sebagaimana dikemukakan juga oleh pemikir fenomenologi Lukman Berger mengatakan bahwa peristiwa sejarah dapat dipahami dalam tiga proses yaitu: (1) memahami sudut pandang atau gagasan para pelaku asli; (2) memahami arti atau makna kegiatan-kegiatan mereka pada hal-hal yang secara langsung berhubungan dengan peristiwa sejarah; dan (3) menilai peristiwa-peristiwa berdasarkan gagasan yang berlaku saat sejarawan itu hidup. Proses (1) dan (2) merupakan *first order understanding* dan proses (3) merupakan *second order understanding*.

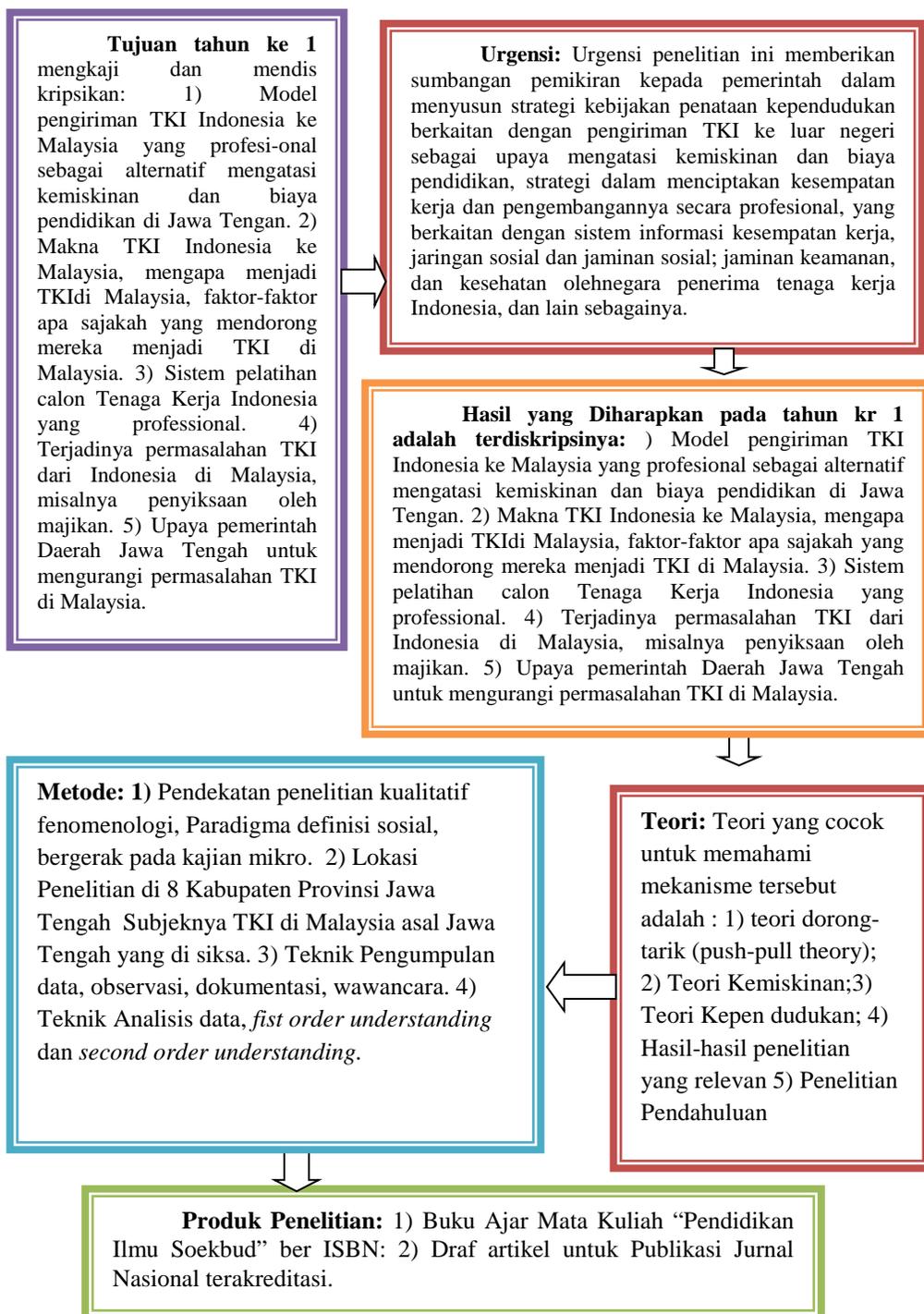
Teknis analisis data tersebut dilakukan di lapangan atau bahkan bersamaan dengan proses pengumpulan data dan sesudahnya. Menurut Milles (1992) ada dua hal yang penting dalam analisis tersebut; *Pertama*, analisis data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), dan yang biasanya “diproses” kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih tulis, tetapi analisis ini tetap menggunakan kata-

kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperlukan. *Kedua*, analisis ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu; reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

#### **F. Keabsahan Data**

Data merupakan fakta atau bahan-bahan keterangan yang penting dalam penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan (aktivitas), dan selebihnya, seperti dokumen (yang merupakan data tambahan). Kesalahan data berarti dapat dipastikan menghasilkan kesalahan hasil penelitian. Karena begitu pentingnya data dalam penelitian kualitatif, maka keabsahan data perlu diperoleh melalui teknik pemeriksaan keabsahan, seperti disarankan oleh Lincoln dan Guba, yang meliputi: kredibilitas (*credibility*), transferabilitas (*transferability*), dependabilitas (*dependability*), konfirmabilitas (*confirmability*) (Lincoln, dan Guba, 1985: 298-331).

## BAGAN ALUR PENELITIAN



## **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil Penelitian (Data Skunder)**

#### **1. Kondisi Ketenaga Kerjaan Jawa Tengah**

Study dokumentasi jumlah penduduk Jawa Tengah tahun 2013 sebanyak 33.264.339 yang terdiri laki-laki 16.499.377, wanita 16.764.962 dengan kepadatan penduduk 1.022 perjiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan jumlah penduduk Jawa Tengah tahun 2014 sebanyak 33.501.978 yang terdiri laki-laki 16.617.793, wanita 16.884.185 dengan kepadatan penduduk 1.022 perjiwa/km<sup>2</sup> (Sumber Data: Jawa Tengah Dalam Angka 2014, BPS Provinsi Jawa Tengah).

Keadaan ketenagakerjaan di Jawa Tengah pada Februari 2014 menunjukkan adanya perbaikan, perbaikan itu digambarkan dengan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja maupun jumlah penduduk bekerja, dan penurunan tingkat pengangguran. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2014 bertambah sebanyak 192 ribu orang dibanding keadaan Agustus 2013 dan bertambah sebesar 249 ribu orang dibanding keadaan Februari 2013. Penduduk yang bekerja pada Februari 2014 bertambah sebanyak 281 ribu orang dibanding keadaan Agustus 2013, dan bertambah 246 ribu orang dibanding keadaan setahun yang lalu. Sementara jumlah penganggur pada Februari 2014 mengalami penurunan sebesar 89 ribu orang jika dibanding keadaan Agustus 2013, dan bertambah sebanyak 3 ribu orang jika dibanding keadaan Februari 2013.

Sedangkan keadaan ketenagakerjaan di Jawa Tengah pada Februari 2015 menunjukkan adanya perubahan yang digambarkan dengan adanya peningkatan kelompok penduduk yang bekerja, dan penurunan tingkat pengangguran. Jumlah angkatan kerja mencapai 18,29 juta orang bertambah sebesar 746 ribu orang dibanding keadaan Agustus 2014 dan bertambah sebesar 576 ribu orang dibanding keadaan Februari 2014. Penduduk yang bekerja pada Februari 2015 naik sebesar 771 ribu orang dibanding keadaan Agustus 2014, dan bertambah 571 ribu orang dibanding keadaan setahun yang lalu (Februari 2014). Sementara jumlah penganggur pada Februari 2015 mengalami penurunan sebesar 26 ribu orang jika dibanding keadaan

Agustus 2014 dan naik sebesar 5 ribu orang jika dibanding keadaan Februari 2014.

Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah pada tahun 2014 dicerminkan dengan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) sebanyak 25.181.967 orang. Jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2014 sebanyak 16.550.682 orang. Sedangkan jumlah pencari kerja Jawa Tengah Tahun 2015 (terhitung Januari-Mei 2015), total lowongan kerja Provinsi Jawa Tengah sebanyak 3.519, sedangkan total pencari kerja 13.271 orang, yang berarti apabila dari total pencari kerja harus bekerja di Negeranya sendiri (Indonesia) akan terjadi pengangguran 9.752 orang.

Angkatan kerja Tahun 2013 sebanyak 17.524.022 orang, jumlah yang bekerja 16.469.960 orang, dengan tingkat pengangguran sebanyak 1.054.062 orang. Sedangkan Angkatan kerja Tahun 2014 sebanyak 17.547.026 orang, jumlah yang bekerja 16.550.682 orang, dengan tingkat pengangguran SD 339.713 orang (34,11); SMP 262.746 orang (26,38); SMA 354.999 orang (35,63); D1-D3 14.660 orang (1,48); S1 26.226 orang (2,64).

Jumlah TKI Jawa Tengah ke luar negeri pada tahun 2014 sebanyak 41.445 orang sebagai TKI informal; dan 51.160 orang sebagai TKI formal, sedangkan pada tahun 2015 (Januari-Mei) sebanyak 12.258 orang sebagai TKI informal; dan 13.018 orang sebagai TKI formal. Sedangkan jumlah TKI Jawa Tengah ke Malaysia pada tahun 2013 sebanyak 4.750 orang sebagai TKI informal; dan 21.619 orang sebagai TKI formal. Pada tahun 2014 sebanyak 3.898 orang sebagai TKI informal; dan 17.300 orang sebagai TKI formal. Pada tahun 2015 (Januari-Muni) sebanyak 1.024 orang sebagai TKI informal; dan 4.996 orang sebagai TKI formal. (Sumber data: Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan dikutip 23 April, 2015)

## 2. Tujuan Penempatan TKI Ke Luar Negeri

Untuk lebih menambah khasalah laporan deskripsi data penelitian ini terlebih dahulu peneliti paparkan hasil wawancara dengan Aziz (Kabag penempatan TKI Luar Negeri Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan) Provinsi Jawa Tengah tentang; tujuan PCTKI (Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia) ke luar negeri, adapun hasilnya sebagai berikut:

Penempatan calon tenaga kerja TKI di Negara pengguna bertujuan memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, menjamin dan melindungi calon TKI dan meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya, karena itu orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Kewenangan pemerintah Provinsi dalam penempatan TKI di luar negeri adalah; 1) Melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang atau tugas pembantuan dari pemerintah pusat dalam mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri; 2) Bersama pemerintah mengurus keperluan TKI sampai ke daerah asal apabila terjadi permasalahan; 3) Membantu penyelesaian masalah antar calon TKI dengan lembaga penempatan TKI; 4) Melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI ke pusat; 5) Melakukan penyidikan tindak pidana. (Wawancara 30 April 2015).

Pemerintah sebagai pelaksana penempatan TKI swasta, berpendapat bahwa perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta wajib mendapat izin tertulis berupa SIPPTKI (Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia) dari Menteri, selanjutnya pelaksana penempatan TKI swasta dapat membentuk Kantor Cabang di Provinsi Jawa Tengah dengan Izin dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah.

Adapun kewenangan Kantor Cabang adalah; 1) Melakukan penyuluhan dan pendataan calon TKI. 2) Melakukan pendaftaran dan seleksi calon TKI. 3) Menyelesaikan kasus calon TKI pada pra atau purna penempatan. 4) Menandatangani perjanjian penempatan dengan calon TKI atas nama pelaksana penempatan TKI swasta.

## **B. Hasil Penelitian (Data Primer)**

1. Model pengiriman TKI ke Malaysia secara profesional sebagai alternatif mengatasi kemiskinan dan biaya pendidikan di Jawa Tengah.
  - a. Model Pengiriman TKI, berdasarkan studi wawancara dengan Aziz Syakir, tentang model pengiriman TKI ke luar negeri hasilnya sebagai berikut:

- 1) Pengiriman dan penempatan TKI ke luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang telah membuat perjanjian tertulis dengan pemerintah RI atau ke negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing.
- 2) Setiap orang dilarang menempatkan calon TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan, serta peraturan perundang-undangan.
- 3) Ijin penempatan.
- 4) Kegiatan penempatan di bagi menjadi tiga tahapan: Pra penempatan; Masa penempatan; dan Purna penempatan” (Wawancara 21 Mei 2015 dengan Aziz Syakir).

a) *Pertama, Pra-Penempatan.*

Kegiatan Pra Penempatan TKI di Luar Negeri, Menurut Aziz kegiatan pra-penempata TKI di luar Negeri ini antara lain; 1) Pengurusan SIP, 2) Perekrutan dan seleksi, 3) Pendidikan dan pelatihan kerja, 4) Pemeriksaan kesehatan dan psikologi, 5) Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), 6) Perjanjian kerja, 7) KTKLN, 8) Pengurusan dokuman dan 9) Pemberangkatan.

- (1) Pengurusan SIP (Surat Izin Penempatan). Pelaksana penempatan TKI swasta yang akan melakukan perekrutan wajib memilik SIP dari Menteri. Syarat mendapatkan SIP; perjanjian kerjasama penempatan, ada surat permintaan TKI dari pengguna, rancangan perjanjian penempatan, rancangan perjanjian kerja. Dari SIP tersebut harus dimintakan rekomendasi/ surat pengantar rekrut dari Dinakertransduk Provinsi Jawa Tengah. Jangka waktu masa berlakunya SIP 1-6 bulan.
- (2) Perekrutan dan Seleksi. Kegiatan rekrutmen dan seleksi antara lain: (1) Bersama Dinas Kabupaten/Kota. PPTKIS/Cabang berdasarkan SIP yang dimiliki melakukan penyuluhan kepada calon TKI yang sudah terdaftar di Dinas/Kantor Kab/Kota. (2) Materi pendidikan dan pelatihan meliputi; informasi lowongan

pekerjaan, jenis dan uraian pekerjaan, lokasi dan lingkungan kerja, persyaratan calon TKI, besaran upah/gaji, waktu kerja, cuti, lembur & fasilitas. Peraturan perundangan di negara tujuan; Kelengkapan dokumen TKI; Biaya & kewajiban; Waktu, tempat dan syarat pendaftaran. (3) Persyaratan Calon TKI yang akan di rekrut. Berusia sekurang-kurangnya 18 tahun dan untuk TKI pada perseorangan 21 tahun dibuktikan KTP dan Akte lahir; Surat keterangan sehat dari Dokter, dan tidak dalam keadaan hamil dari dokter pada rumah sakit; Surat izin dari suami/istri/orang tua/wali yang diketahui oleh kepala Desa/Lurah; Kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja dari Dinas/Kantor Kab/Kota. (4) Seleksi calon TKI dilakukan bersama-sama antara PPTKIS/ Cabang dengan Dinas/Kantor Kab/Kota, yang meliputi: Seleksi administrasi; Seleksi minat dan keterampilan calon TKI. (5) Bagi calon TKI yang telah lulus seleksi wajib menandatangani Perjanjian Penempatan TKI dengan PPTKIS/Cabang dan diketahui oleh Dinas/kantor Kab/Kota. (6) Perjanjian penempatan memuat : Nama dan alamat pelaksana. Nama, jenis kelamin, umur, status & alamat. Nama dan alamat calon pengguna. Hak dan kewajiban para pihak. Jabatan dan jenis pekerjaan. Jaminan pelaksana. Waktu keberangkatan. Biaya penempatan. Tanggungjawab pengurusan penyelesaian masalah. Akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian. Tanda tangan para pihak. (7) Calon TKI yang telah menandatangani Perjanjian Penempatan, PPTKIS/Cabang wajib: Mengikutsertakan program Asuransi; Pelatihan kerja; Pemeriksaan kesehatan dan psikologi; Pengurusan dokumen TKI. (8) Peserta program asuransi: Konsorsium asuransi

- (3) Pendidikan dan Pelatihan Kerja. Kegiatan pendidikan dan latihan ini (1) Calon TKI wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan persyaratan jabatan. (2)

Calon TKI berhak mendapat pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. (3) Calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan dilarang untuk dipekerjakan. (4) Pelatihan kerja dilaksanakan di BLKLN milik PPTKIS/cabang di Jawa Tengah dan BLKLN milik Prov. Jateng.

- (4) Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi. Kegiatan ini antara lain (1) Setiap calon TKI yang telah lulus seleksi wajib mengikuti pemeriksaan kesehatan dan psikologi yang diselenggarakan oleh sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan psikologi yang di tunjuk oleh pemeriksaan psikologi yang di tunjuk oleh Pemerintah. (2) Pemeriksaan kesehatan dilakukan di Klinik/ Laboratorium/ Rumah Sakit yang telah di akreditasi oleh negara pengguna dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI.
- (5) Pembekalah Akhir Pemberangkatan. Aktivitas dalam pembekalan akhir pemberangkatan antara lain: (1) Penanggungjawab PAP adalah BP3TKI. (2) PPTKIS wajib mengikutsertakan setiap calon TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam PAP. (3) Persyaratan mengikuti PAP adalah harus melampirkan Paspor dan Visa kerja. (4) Bagi TKI yang telah mengikuti PAP diberikan surat keterangan. (5) PAP dilaksanakan sekurang-kurangnya 8 jam pelajaran. (6) Materi PAP meliputi : Peraturan perundang-undangan di negara tujuan penempatan; Materi perjanjian kerja; Materi penunjang (Adat istiadat, budaya; Narkoba dan HIV/AIDS; Asuransi; Resiko kerja; Tata cara Pengiriman uang; Mental kerohanian; pengetahuan tentang dokumen perjalanan; dan pelaksanaan perjalanan).
- (6) Perjanjian Kerja. Aktivitas perjanjian kerja ini (1) Hubungan kerja antara pengguna dan TKI terjadi setelah perjanjian kerja disepakati dan ditandatangani oleh para pihak. (2) Setiap TKI wajib menandatangani

perjanjian kerja sebelum TKI diberangkatkan keluar negeri, di hadapan pejabat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. (3) Perjanjian kerja memuat; Nama dan alamat pengguna, Nama dan alamat TKI, Jabatan atau jenis pekerjaan TKI, Hak dan kewajiban para pihak, Kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran hak cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan sosial.

- (7) KTKLN (Ketentuan Tenaga Kerja Luar Negeri). Kegiatan yang berkaitan KTKLN ini (1) Setiap TKI yang ditempatkan di luar negeri, wajib memiliki dokumen KTKLN yang dikeluarkan oleh pemerintah. (2) KTKLN merupakan tanda pengenal bagi TKI yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk bekerja keluar negeri dan berfungsi sebagai keterangan bebas fiskal keluar negeri (BFLN). (3) Persyaratan mendapatkan KTKLN: Papor dan visa kerja, telah membayar biaya pembinaan TKI, telah ikut program asuransi, telah menandatangani perjanjian kerja, telah mengikuti PAP telah membuka rekening tabungan.
- (8) Pengurusan dokumen. Dokumen yang harus dimiliki calon TKI: Pengurusan paspor dilakukan pada kantor imigrasi di Jawa Tengah (Semarang, Surakarta, Wonosobo, Cilacap, Pemalang dan Pati); Pembukaan rekening tabungan dapat dilakukan pada bank – bank peserta program yaitu bank BNI 46, bank mandiri, BRI dan Bank Jateng; KTP, ijazah terakhir, akte kelahiran; Surat keterangan status perkawinan / copy buku nikah; Surat izin suami / istri / orang tua; Sertifikat kompetensi kerja; Surat keterangan sehat; Paspor; Visa kerja; Perjanjian penempatan TKI; Perjanjian kerja; KTKLN.
- (9) Pemberangkatan. Kegiatan pemberangkatan ini antara lain (1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib memberangkatkan TKI keluar negeri yang memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen dan sesuai dengan perjanjian penempatan. (2) Pelaksana penempatan TKI

swasta wajib melaporkan setiap keberangkatan calon TKI kepada perwakilan RI di negara tujuan. (3) Pemberangkatan di lakukan dari bandara yang ada di Jawa Tengah.

b) *Kedua, Masa Penempatan.*

Dalam masa penempatan ini; 1) TKI sampai di negara tujuan penempatan di jemput oleh mitra usaha / pengguna. 2) TKI bekerja diluar negeri melapor ke KBRI setempat yang dilakukan oleh PPTKIS/Mitra Usaha/Pengguna. 3) Apabila timbul permasalahan dalam masa bekerja melapor ke KBRI/Mitra Usaha/PPTKIS yang menempatkan. 4) Apabila masa kontrak berakhir TKI segera melaporkan.

c) *Ketiga, Masa Purna Penempatan.*

Pada masa ini; a) Kepulangan TKI terjadi karena; Berakhirnya masa perjanjian kerja; Pemutusan hubungan kerja; Terjadi perang; bencana alam atau wabah penyakit di negara tujuan; Mengalami kecelakaan kerja; Meninggal dunia di negara tujuan; Cuti; dan dideportasi oleh pemerintah setempat. b) TKI yang pulang dilakukan pemantauan sampai di daerah asal. Pada prinsipnya penempatan TKI di luar negeri, sebagai berikut bahwa pengiriman dan penempatan TKI ke luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang telah membuat perjanjian tertulis dengan pemerintah RI atau ke negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing. b) Setiap orang dilarang menempatkan calon TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan, serta peraturan perundang-undangan.

2. Strategi TKI Mengatasi Kemiskinan dan Biaya Pendidikan.

a. Sarmini TKI Yang Sukses Menjadi Sarjana S 1

Berdasarkan studi wawancara dengan Sarmini pada tanggal 30 Juli 2015 menghasilkan data sebagai berikut; Saya menggunakan 4 cara (pendekatan) untuk mengatasi kemiskinan agar secepatnya saya bisa bangkit, keluarga saya juga lebih baik

ekonominya, bisa membiayai sekolah saya, keempat pendekatan itu adalah; a) pendekatan relegius, yakni; selalu berdoa dan berbakti kepada orang tua, b) pendekatan manajemen keuangan, yaitu manajemen gemi, seliti, ngati-ati (perilaku tidak konsumtif dan tidak salah langkah dalam memilih dan mengatur skala prioritas kebutuhan yang bermanfaat), c) pendekatan bekerja sambil menabung, yaitu; tabungan masa depan dan tabungan pendidikan, dan d) Pendekatan bekerja sambil kuliah.

Kisah TKI, rupanya tidak selalu kisah sedih dalam perantauan. Di Malaysia, TKI yang bernama Sarmini (28) asal Banyumas sukses menjadi Sarjana S1 Jurusan Manajemen dari Universitas Terbuka Malaysia.

Sarmini, asal Desa Adisana, Kecamatan Kebasen, Banyumas, Jawa Tengah ini awalnya pergi ke Malaysia pada 2004. Dia sudah mengantungi ijazah D2 dari Sekolah Tinggi Agama Budha di Semarang, Sarmini ingin melanjutkan kuliah, sayang orang tuanya tidak mampu menyekolahkan anaknya (Sarmini) karena terbentur masalah biaya, Sarmini menjelas-kan: *Pada saat itu, saya (Sarmini) pergi ke Jakarta untuk men-cari kerja, tapi tidak mendapatkan pekerjaan. Karena ke-inginan saya untuk melanjutkan sekolahsedangkan orang tua saya tidak mampu, makanya saya pergi ke Malaysia untuk mencari modal. Setelah tiga tahun lamanya saya bekerja sebagai PR, pada 2007 saya meminta izin kepada majikan untuk pulang, majikan bertanya untuk apa pulang? Ketika saya mengatakan ingin meneruskan kuliah, majikan saya justru bersimpati dan menawarkan kepada saya kuliah di Malaysia sambil bekerja. Karena majikan saya tahu kalau keuangan saya tidak memungkinkan, maka dia menawarkan agar saya kuliah di Malaysia dan dijanjikan akan dibantu 50% dari keseluruhan biaya kuliah. Tawaran itu saya sanggupi dan pada tahun ke empat, saya kuliah di Open University of Malaysia setelah tiga tahun saya bekerja. Kalau ingin sukses menjadi TKW harus menggunakan pendekatan agama,berbakti kepada Orang Tua dan harus tekun gemi setiti ati ati ( wawancara 3 Agustus 2015)*

- b. RokhimahTKI Yang Sukses Menjadi Pengusaha Sapu

Di balik kisah sedih yang dialami para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, ternyata ada juga TKI yang mampu meraih kesuksesan setelah kembali ke kampung halamannya.

Seperti kisah Rokhimah TKI asal Kabupaten Purbolinggo, Jawa Tengah. Seorang mantan TKI sukses menjadi pengusaha sapu usai pulang bekerja dari Singapura, Malaysia. Tidak tanggung-tanggung omzet usaha sapunya bisa mencapai Jutaan rupiah. Bahkan, produk sapunya ini telah merambah ke beberapa negara seperti Taiwan, Korea Selatan, dan Malaysia.

Inilah kesuksesan yang diraih oleh Rokhimah (37), istri dari Bambang Triono warga Desa Karang Gambas, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbolinggo. Di rumah yang sederhana dijadikan kantor, serta tempat produksi sapunya Rokhimah beserta suaminya mengedalikan usaha sapunya yang terbuat dari lidi, dan rumput glagah.

Usaha pembuatan sapu, yang sebelum ia ke Malaysia (sejak 2005), kini telah menjadi lapangan kerja bagi puluhan warga sekitar.

Kesuksesan pabrik sapu milik Rokhimah ini ternyata tidak datang begitu saja. Namun beberapa kali mengalami pasang surut. Bahkan, usaha sapunya ini sempat vakum selama dua bulan akibat ketiadaan modal serta buruknya administrasi. Kondisi inilah kemudian yang membuat Rokhimah memutuskan untuk menjadi TKI ke Singapura, Malaysia. Namun, Rokhimah hanya bekerja selama satu tahun di Singapura. Meski demikian, banyak pengalaman yang didapat hingga ia bersama suaminya melanjutkan usaha sapunya ini, Rokhimah mengatakan: *Wah, usaha sapu saya ini semula sempat pasang surut, pokoknya untuk sukses tidak gampang dan harus bekerja tekun pak, ujar Rokhimah, mantan TKI. Tentu saja, kesuksesan saya juga tak lepas dari peran Mas Bambang Triono suami saya. Mas Bambang inilah yang bekerja untuk mencari tempat pemasaran produk sapu, hingga kualitas produk sapu ini dipercaya untuk diekspor ke beberapa negara Asia. Kita saling mendorong dan bahu membahu pak, ujar Bambang Triono. Saya oleh teman-teman dan oleh tetangga dikatakan TKI yang sukses. Saya prinsip kalau ingin sukses dalam segala hal jangan lupa tekun ibadah, gemar*

*menabung gemi setiti ati ati.* (Wawancara 3 September 2015)

Dalam studi literatur diperoleh data yang diakses dari <http://isugosip.blogspot.co.id/2011/01/tkw-berlalu-jadilah-pengusaha-sapu.html> bahwa; banyaknya permintaan sapu dari berbagai negara membuat Rokhimah dan Bambang tak bisa mengerjakan sendiri, mereka harus mempekerjakan beberapa warga sekitar, kondisi ini sangat menguntungkan warga sekitar.

Meski telah sukses, namun masih banyak kendala yang dihadapi Rokhimah dan Bambang dalam mengembangkan usahanya ini, misalnya; modal yang sangat terbatas dan peralatan yang masih manual, mereka berharap pemerintah bisa membantu masalah yang dihadapi.

Dengan strategi gemi setiti ngati-ati, TKI bisa sukses, mereka yang sukses sebagai TKI di Malaysia adalah Sarmini TKI yang berhasil diwisuda di *Open University of Malaysia* dan Rokhimah TKI yang sukses menjadi pengusaha sapu dengan omzet jutaan rupiah.

Selain kesuksesan yang diraih oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut, mereka juga memberikan kontribusi cukup fantastik sebagai sumber devisa Negara, berdasarkan data yang diterima Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi Jawa Tengah dari Bank Mandiri, BRI dan BNI bahwa hingga akhir tahun 2011 yang lalu, para TKI di mancanegara mengirim uang (remitansi) ke Provinsi Jawa Tengah mencapai angka Rp 600 miliar. Angka sebesar itu belum termasuk remitansi TKI melalui bank lain seperti Western Union dan PT. Pos Indonesia. Sedangkan penerimaan Remitansi TKI Jawa Tengah tahun 2012-2014 mencapai Rp 949.629.504.299,- remitansi tahun 2012; Rp. 242.585.530.640,- remitansi tahun 2013; dan Rp. 1.591.515.609.090,- untuk remitansi tahun 2014 (Sumber: Disnakertransduk 2014).

### 3. Makna TKI dan Faktor yang mendorong mereka menjadi TKI di Malaysia?

Fenomena TKI memiliki banyak makna (*meaning full*), antara lain:

- a. TKI memiliki makna pendidikan, seperti pengalaman Sarmini, ia menjadi TKI didorong keinginan yang paling dalam ingin

melanjutkan sekolah, yang akhirnya ia berhasil diwisuda di Open University of Malaysia sebagai Sarjana S1.

- b. TKI memiliki makna ekonomi, seperti fenomena Rokhimah, ia menjadi TKI didorong oleh keinginan yang paling dalam ingin mengembangkan perusahaan sapunya yang akhirnya ia berhasil mempunyai pabrik sapu yang omzetnya ratusan juta rupiah, dan produk sapunya diekspor ke beberapa negara di Asia.
- c. Selain makna pendidikan dan ekonomi, TKI juga memiliki makna religiusitas.

Kisah TKI Daryanti, ia rela menjadi TKI didorong oleh keyakinan keagamaan yang dianutnya, “Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum, jika kaum itu sendiri tidak mau merubahnya”. Daryanti menjadi TKI, didorong oleh perintah agama bahwa setiap orang wajib berusaha untuk mengubah nasibnya.

- d. TKI juga memiliki makna meningkatkan status sosial di masyarakat.

Fenomena TKI mampu memberikan konstruksi sosial, bahwa masyarakat memandang atau beranggapan bahwa seseorang yang bekerja diluar negeri sebagai TKI memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan seseorang yang hanya tinggal di desanya.

#### 4. Sistem Pelatihan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang Professional

Sebelum pelatihan, calon TKI harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Calon TKI wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan persyaratan jabatan. 2) Calon TKI berhak mendapat pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. 3) Calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan dilarang untuk dipekerjakan. 4) Pelatihan kerja dilaksanakan di BLKLN milik PPTKIS / cabang di Jawa Tengah dan BLKLN milik Provinsi Jawa Tengah.

Adapun sistem pelatihan calon TKI yang professional, menurut penjelasan Aziz Syakir bahwa:

*Sistem pelatihan calon TKI dengan menggunakan dua pendekatan yaitu general approach dan spesifik approach, dengan sistem ini setiap calon TKI wajib mengikuti pelatihan dengan durasi pelatihan sesuai Negara tujuan (negara penempatan), Malaysia 200 jampel, Singapura 400 jampel dan Hong Kong 600 jampel. Pelatihan*

*TKI menggunakan sistem workshop dan pelatihan yang disesuaikan dengan jabatan TKI yang akan ditempuh. Pelatihan dilakukan di BLKLN PPTKIS atau BLK cabang dan BLKLN milik pemerintah. Adapun materi workshop dan pelatihan juga disesuaikan dengan pekerjaan TKI di Negara yang ditempati, sedangkan alokasi waktu workshop dan pelatihan untuk sektor informal sebanyak 200 JPL yang meliputi materi umum meliputi; psikologi, K3, Bahasa melayu, Bahasa Inggris. Sedangkan materi khusus meliputi Tatagraha, Tataboga, Perawatan lansia, Perawatan bayi, Perawatan anak yang disesuaikan minat mereka (calon TKI). Adapun durasi pelatihan bagi calon TKI jumlah jam pelajarannya tidak sama, hal ini tergantung ke Negara mana yang mereka tuju, sebab di tiap-tiap negara penempatan berbeda-beda, Malaysia 200 jampel, Singapura 400 jampel dan Hong Kong 600 jampel.*

Apa fungsi pelatihan kerja? Buat apa anda susah-susah harus mengikuti *training* padahal anda sudah mendapat pekerjaan? Berikut rangkuman jawaban yang peneliti himpun dari beberapa calon TKI yang mengikuti pelatihan di PJTKI Kabupaten Semarang, hasilnya sebagai berikut:

Ada banyak manfaat yang bisa di ambil dengan mengikuti pelatihan kerja, diantaranya adalah: a) *Mewujudkan pelatihan kerja nasional yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja.* b) *Memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pelatihan kerja.* c) *Mengoptimalkan pendaya gunaan dan pemberdayaan seluruh sumber daya pelatihan kerja.* d) *Untuk menyesuaikan diri terhadap tuntutan bisnis dan operasional-operasional industri sejak hari pertama masuk kerja.* e) *Untuk mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru agar menjadi kompeten.* f) *Untuk mempersiapkan kan promosi ketenagakerjaan pada jabatan yang lebih rumit dan sulit, serta mempersiapkan tenaga kerja pada jabatan yang lebih tinggi yaitu tingkatan pengawasan atau manajerial.*

Apa saja jenis atau program pelatihan kerja? Hasil wawancara dengan peserta pelatihan calon TKI sebagai berikut; *Pelatihan ini disesuaikan dengan jop saya bekerja di Malaysia, karena saya akan bekerja menjadi beby sister di Malaysia maka saya dilatih bagaimana*

*menjadi beby sister yang professional. Ada juga yang berlatih memasak karena mereka memilih pekerjaan dapur.*

Apa jenis program pelatihannya? Menurut menjelaskan instruktur bahwa jenis program pelatihan sebagai berikut: (a) *Skills training (pelatihan ketrampilan) yaitu pelatihan yang sering di jumpai dalam organisasi. Program pelatihannya relatif sederhana: kebutuhan atau kekurangan diidentifikasi rnelalui penilaian yang jeli. Kriteria penilaian efektifitas pelatihan juga berdasarkan pada sasaran yang diidentifikasi dalam tahap penilaian.* (b) *Profesional training/ Pelatihan profesional, yaitu pelatihan ini berupaya memberikan kepada para calon TKI keahlian-keahlian yang mereka butuhkan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Seperti pelatihan untuk tenaga rumah tangga (khusus memasak), pelatihan khusus beby sister dll.* (c) *Cross functional training/ Pelatihan lintas fungsional, pelatihan ini melibatkan pelatihan calon TKI untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain dan pekerjaan yang ditugaskan.* (d) *Team training/Pelatihan tim, pelatihan yang terdiri dari sekelompok individu dimana mereka harus menyelesaikan bersama sebuah pekerjaan demi tujuan bersama dalam tim.* (e) *Creativity training/Pelatihan kreatifitas, pelatihan ini berlandaskan pada asumsi hahwa kreativitas dapat dipelajari. Maksudnya tenaga kerja diberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin yang berdasar pada penilaian rasional dan biaya.*

Apa saja metode atau teknik yang digunakan dalam pelatihan kerja?

Teknik pelatihan kerja secara umum dibagi menjadi dua, yaitu; *on the job training* dan *off the job training*. *On the job training* lebih banyak digunakan dibandingkan dengan *off the job training*. Kenapa begitu? Karena program *on the job training* lebih berfokus pada peningkatan produktivitas secara cepat. Sedangkan metode *off the job training* lebih cenderung berfokus pada perkembangan dan pendidikan jangka panjang.

##### 5. Permasalahan TKI di Malaysia

Menjadi TKI di luar negeri sudah sejak lama dikenal oleh Warga Negara Indonesia melalui hubungan tradisional antar penduduk seperti lintas batas dengan Malaysia dan Singapura yang didasari atas

kedekatan wilayah, hubungan keagamaan dengan Saudi Arabia dan Negara-negara lain di Timur Tengah, dan hubungan sosial dengan negara-negara dikawasan Asia Pasifik, Eropa dan Afrika, Australia dan negara-negara di Kawasan Amerika.

Setelah pemerintah menyadari pentingnya lapangan kerja luar negeri dan kemudian menyerahkan pengelolaannya kepada pihak swasta, penempatan TKI menjadi lebih marak. Semaraknya penempatan TKI ke luar negeri memunculkan permasalahan baik pada tahap Pra Penempatan, masa penempatan dan purna penempatan.

a. Permasalahan Pra Penempatan.

Berdasarkan data dan berita-berita yang pernah dipublikasikan oleh mas media, baik cetak maupun elektronik maupun kasus-kasus yang ditangani oleh BNP2TKI, permasalahan permasalahan yang menimpa Calon Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (CTKIP) adalah:

- 1) Direkrut secara illegal seperti; a) direkrut oleh PPTKIS illegal (tidak memiliki SIUP), b) direkrut oleh seponsor dijual kepada PPTKIS resmi, c) direkrut dan diberangkatkan oleh calo, d) direkrut oleh PPTKIS resmi, tetapi tidak memiliki job order, e) Perekrutan anak masih dibawah umur, f) Perekrutan CTKI buta huruf.
- 2) Pemalsuan dokumen KTP, Kartu Keluarga(KK), Ijazah palsu, Surat ijin keluarga, Hasil tes kesehatan asli tapi palsu (aspal), Sertifikat kompetensi asli tapi palsu (aspal). Termasuk jenis pemalsuan yaitu pemalsuan identitas pada dokumen seperti nama, umur, alamat, status perkawinan, dll.
- 3) Pungutan oleh calo dan dijual ke PPTKIS, pemotong gaji terlampau besar oleh PPTKIS bekerjasama dengan Agency-nya di luar negeri.
- 4) Terjebak rentenir/calo CTKI dan di penampungan oleh PPTKIS disuruh menanda tangani surat, apabila batal berangkat CTKI harus membayar ganti rugi yang cukup besar (pemerasan ketika membatalkan diri berangkat).
- 5) Penipuan oleh calo/PPTKIS illegal/dan berbagai pihak dan diperjualbelikan antar calo atau PPTKIS.

b. Permasalahan Masa Penempatan.

Pada umumnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) perempuan, di negara-negara tujuan penempatan bekerja pada sektor-sektor pekerjaan yang sudah ditinggalkan atau tidak diminati oleh Warga Negara pemberi kerja karena kondisi kerja yang keras, upah rendah, status rendah dan perlindungan minim.

Memperhatikan kondisi demikian, maka TKI menghadapi berbagai permasalahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan TKI/TKW (nama tidak boleh ditulis), bahwa permasalahan-permasalahan tersebut antara lain: 1) Dijebak menjadi pelacur di daerah transit; 2) Diperjualbelikan antar Agency diluar negeri; 3) Jenis pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kerja (PK); 4) Jam kerja melampaui batas tanpa ada uang lembur; 5) Tidak memegang dokumen apapun karena semua dokumen ditahan majikan; 6) Dilarang berkomunikasi dengan orang lain termasuk dengan keluarga; 7) Akomodasi dan makanan di rumah majikan tidak memadai; 8) Dilarang menjalankan ibadah, dipaksa memasak dan makan-makanan haram (daging babi); 9) Gaji dipotong oleh PPTKIS bekerjasama dengan Agency yang besarnya melampaui ketentuan bahkan terkadang gaji tidak dibayar; 10) Memperpanjang kontrak kerja tidak ijin dari keluargadan menggunakan kontrak kerja yang lama; 11) Punggutan yang tinggi oleh Agency saat perpanjangan kontrak kerja; 12) Disiksa, dianiaya, makan-makanan basi dan bekas, diperkosa oleh majikan atau oleh pegawai Agency; 13) Di PHK sepihak dan dipulangkan majikan tanpa diberikan hak-haknya.

c. Permasalahan Purna Penempatan

Keberadaan terminal IV Selepajang Bandara Sorkarno-Hatta, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada para TKI sejak dari terminal II dan terminal IV Selepajang sampai kekampung halamannya, tujuan dari dipilihnya terminal IV sebagai tempat proses pemberian pelayanan dalam rangka perlindungan kepulauan TKI menuju kampung halamannya. Tetapi sangat disesalkan justru dalam proses pemberian pelayanan dalam rangka perlindungan ini lah telah terjadi berbagai pelanggaran hukum, aturan, etika, moral sampai penghilangan nyawa TKI telah terjadi, yang membuat rasa keadilan dan terkesan

orang kecil dan miskin dari kampung tidak ada tempat untuk hidup di negeri yang tercinta ini.

Masalah-masalah tersebut antara lain: 1) Tak terpenuhinya hak-hak asuransi, restitusi pajak, tabungan dan barang-barang bawaan yang tertinggal di luar negeri/di Bandara Soekarno Hatta; 2) Pemerasan dan perlakuan diskriminatif; 3) Luka-luka yang diderita TKI tidak mendapatkan perawatan medis karena tidak ada krisis centre pada pos kedatangan; 4) Barang tertukar/sengaja dihilangkan untuk dalih berbagai punggutan; 5) Pelayanan yang tidak professional; 6) Fasilitas tempat pelayanan buruk; 7) Terpaksa membeli sesuatu dengan harga yang sangat mahal; 8) Punggutan liar dari berbagai pihak; 9) Kekerasan fisik dan psikis (dibentak dan sikap tidak ramah) ; 10) Pelecehan seksual; 11) Perampokan hasil kerja diperjalanan; 12) Masuk perangkap calo dan 13) Pemerasan uang dan barang oleh sopir angkutan diperjalanan menuju kampung halaman; 14) Dipindahkan keangkutan lain dan dipungut biaya tambahan; 15) Diminta iuran tambahan oleh sopir dalam perjalanan pulang.

d. Permasalahan TKI Dideportasi

Pasang surut hubungan ke dua negara bertetangga dekat ini telah mewarnai penanganan TKI illegal. Sebagai contoh: hampir setiap bulan pemerintah Malaysia mendeportasi ribuan TKI illegal ke Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan laut debarkasi. Pelabuhan debarkasi Sri Bintan Pura yang terletak di Tanjung Pinang Provinsi KEPRI merupakan salah satu pelabuhan laut yang digunakan sebagai tempat deportasi TKI illegal.

Berdasarkan data yang ada yang dilaporkan oleh SP3TKI Tanjung Pinang kepada BNP2TKI, selama tahun 2007 jumlah TKI illegal yang dideportasi melalui Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang sebanyak 30.574 orang dengan rincian bulan April 2007 sebanyak 3343 Orang, bulan Mei 2007 sebanyak 3714 Orang, bulan Juli 2007 sebanyak 2322 Orang, bulan September 2007 sebanyak 6244 Orang, bulan Oktober 2007 sebanyak 3289 Orang, bulan Nopember sebanyak 3061 dan bulan Desember sebanyak 2594 Orang.

e. Permasalahan Trafiking

Di samping permasalahan-permasalahan tersebut diatas, yang dialami oleh TKI (khususnya TKI perempuan), juga kerap kali menjadi korban trafiking dengan dalih penempatan. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 trafiking adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi pembayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antara negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang lain tereksplotasi dan trafiking menurut Protocol PBB, adalah Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima pembayaran, memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.

Eksploitasi untuk melacurkan orang lain, atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambatan atau pengambilan organ tubuh. Kedua definisi tersebut di atas tidak hanya untuk kasus trafiking pekerja seks saja, tapi juga termasuk kerja paksa dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya yaitu lebih mengedepankan pencegahan trafiking, melindungi dan mendampingi korban, dan untuk menghukum pelakunya (trafiker).

Ciri-ciri dan bentuk perdagangan orang di Indonesia adalah sebagai berikut: Korban trafiking manusia dapat menimpa siapa saja yang direkrut, dikirim kesuatu tempat, dipindahkan, ditampung atau diterima, untuk tujuan eksploitasi dengan menggunakan salah satu atau lebih cara-cara sebahai berikut: diancam, dipaksa dengan berbagai cara, dipaksa dengan cara-caralain, diculikdengan menggunakan kekerasan, ditipu dengan janji-janji manis, pemalsuan, manipulasi (dimanipulasi dengan informasi yang salah)

f. Permasalahan Perlakuan Kasar oleh Majikan kepada TKI

1) Permasalahan Siti Septini

Siti Supeni (TKI asal Telogorejo RT.05/07 Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah), Siti Supeni tidak kerasan bekerja di Malaysia karena tidak tahan mendapat perlakuan kasar oleh majikannya di Malaysia, ia sering dipukul, dan tidak tahu kesalahan yang diperbuatnya, majikan itu main pukul, hampir setiap hari ia dipukul, ia menjelaskan: *Majikan saya yang perempuan galak, sering main pukul, saya sering dipukul, saya tidak tahu kesalahan saya, tahu-tahu dia marah-marah, kalau saya membantah dituduh berani kepada majikan, pernah saya pernah disiram air panas, kemudian saya lari melapor minta tolong kepada tetangga kemudian tetangga telpon polisi, kemudian saya dijemput polisi dibawa ke klinik untuk berobat, saya minta pulang tidak boleh, Saya sebenarnya tidak tahan tetapi minta pulang tidak boleh, boleh pulang asalkan suami saya kirim uang dulu ke mereka, baru saya boleh pulang.* (Wawancara 11 Juni 2015)

2) Permasalahan Umdiyah.

Umdiyah (TKI asal Bandar, Batang, Jawa Tengah). Umdiyah sering diperlakukan kasar oleh majikan, dan tidak mengerti sebabnya, ia tidak merasa salah tetapi selalu mendapatkan perlakuan kasar dengan kata-kata kasar dan dipukulan, ia menjelaskan: *Saya disuru membersihkan kamar mandi sudah saya bersihkan, tahu-tahu saya dipukul, saya tidak mengerti kesalahan saya, menurut saya “saya tidak salah”, Saya disuruh membersihkan kolah bagian-bagian yang lumuten saya sikat, dinding yang belum dikramik pada bagian yang kotor saya bersihkan, katanya salah saya dimarahi, saya dipukul, Pada saat saya menjemur pakaian diluar saya dijambak rambut saya, saya dikatakan berani dengan majikan, kemudian saya dijambak, saya bekerja lagi mencuci saya ditarik kuping saya. Saya sering dituduh makan makanan kecil (snek) padahal saya tidak makan, kalau ada makanan kecil habis saya yang dituduh yang makan dan yang menghabiskan. Kemudian saya dipukul. Saya benar-benar tidak kerasan baru*

*7 bulan saya bekerja saya minta pulang. (Wawancara 11 Juni 2015)*

3) Kasus Sutilah

Sutilah (TKI asal Desa Bango, Demak, Jawa Tengah). Sutilah ini menjadi TKI legal di Malaysia, berangkat sebagai Tenaga Kerja Indonesia melalui PJTKI Arini Famili Ungaran, Jawa Tengah, Ia mengalami depresi karena mendapatkan perlakuan kasar oleh majikannya selama bekerja di Kuala Lumpur.

*Study dokumentasi di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan, diperoleh data, bahwa; “Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Siswo Laksono dalam Nota Dinasnya yang disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Sekda, Nomor 560/6974 tertanggal 26-8-2009 Perihal Laporan Kasus TKI a.n. Sutilah Dari Demak, dijelaskan bahwa: Sutilah yang bekerja di Malaysia melalui PJTKI PT Arni Famili Kabupaten Semarang telah diberlakukan sebagai budak dan disiksa oleh majikan karena menolak menuruti hawa nafsu majikan. Disamping itu majikan juga melakukan kekerasan dan hanya memberi makan roti dan apel. Memasuki bulan ketiga Sutilah menderita sakit dan oleh majikan diusir dari rumahnya, kemudian ditemukan oleh seorang sopir yang berasal dari Surabaya lalu dibawa ke KBRI Kuala Lumpur. (Dokumen diambil 11 Juni 2015)*

6. Permasalahan Mendasar TKI

Masalah Mendasar TKI di Malaysia adalah permasalahan tindak kekerasan oleh majikan terhadap TKI, hal ini disebabkan karena adanya miskomunikasi antara majikan dengan tenaga kerjanya, selain itu karena rendahnya kemampuan kerja pekerja rumah tangga (rendahnya kompetensi), perbedaan kultur, sikap feodal, lemahnya struktur kelembagaan, dan perbedaan undang-undang.

Menurut Azis Syakir, selain permasalahan tindak kekerasan masalah yang mendasar bagi ketenaga kerjaan di Malaysia adalah; banyak TKI yang tidak memperpanjang kontrak kerja tapi tetap kerja di Malaysia; banyaknya TKI yang berangkat ke Malaysia secara ilegal

dengan paspor kunjung; dan banyaknya TKI yang berangkat tanpa dokumen secara ilegal murni yakni lewat calo /sponsor. Sehubungan dengan 3 hal tersebut, maka TKI tidak mendapatkan perlindungan.

Berita penyiksaan TKI di Malaysia oleh majikannya sama sekali tidak menyurutkan niat warga Jawa Tengah untuk menjadi tenaga kerja ke Malaysia. Jumlah pengiriman TKI ke Malaysia tahun 2013 sebanyak 21.619 orang, tahun 2014 sebanyak 17.300 orang, sedangkan tahun 2015 (terhitung sampai bulan Mei 2015) sebanyak 4.996 orang.

7. Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Mengurangi Permasalahan TKI di Malaysia.

Langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah Jawa Tengah untuk mengurangi permasalahan TKI adalah a) memberikan jaminan kepada majikan yang tidak bermasalah menggunakan saja Tenaga Kerja Indonesiab) Membentuk Badan Bersama Penyelidikan Masalah c) Memberi cuti TKI satu hari/minggu d) Jika cuti tidak diberikan, pihak majikan membayar pampasan kepada pembantu rumah tersebut. e) Semua kasus pembantu rumah diselesaikan oleh Kumpulan Kerja Bersama antara Malaysia dan Indonesia f)Mengkaji kembali MoU Ketenagakerjaan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Aiz Syakir diperoleh keterangan bahwa terdapat kesepakatan dalam pembicaraan yang diambil kedua negara Indonesia dan Malaysia untuk mengatasi permasalahan TKI Indonesia di Malaysia adalah:

- a. Indonesia memberikan jaminan kepada Majikan di Malaysia bahwa majikan yang telah membayar iuran, kepada agensi-agensi pembekal pembantu rumah di Malaysia dan Indonesia, akan dibenarkan membawa masuk pembantu rumah dari Indonesia ke Malaysia untuk bekerja dengan majikan-majikan berkenaan.
- b. Jaminan itu diberi oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia Dr Erman Suparno dalam pertemuannya dengan Menteri Sumber Manusia Datuk Dr S. Subramaniam.
- c. Dr Subramaniam, dalam satu kenyataan akhbar, berkata kedua-dua pihak juga telah bersetuju untuk menumbuhkan sebuah badan penyelaras untuk memastikan semua isu berkaitan pentadbiran pengambilan pembantu rumah dari Indonesia dapat diselesaikan.

- d. Kedua-dua pihak juga bersetuju bahawa pembantu rumah akan diberi cuti satu hari seminggu oleh para majikan tetapi terpulang kepada majikan dan pembantu rumah untuk menetapkan hari cuti tersebut. Jika cuti tidak diberikan, maka pihak majikan akan membayar pampasan kepada pembantu rumah tersebut.
- e. Kementerian Sumber Manusia menjangkakan bahawa cuti satu hari seminggu ini akan dijadikan sebagai satu peraturan melalui pindaan pada Akta Kerja 1955 di persidangan Dewan Rakyat pada bulan Oktober 2009, katanya.
- f. Mengenai isu-isu yang dibangkitkan oleh pihak Indonesia seperti pasport pembantu rumah, gaji dan kebajikan mereka, kami telah bersetuju supaya perkara-perkara tersebut diselesaikan oleh Kumpulan Kerja Bersama antara Malaysia dan Indonesia.
- g. Selain kesepakatan dua negara kerjasama Indonesia-Malaysia tersebut, secara khusus yang telah diambil oleh Malaysia ialah (1) memastikan agar setiap majikan membuka akaun bank bagi pembantu rumah mereka supaya pihak Jabatan Tenaga Kerja (JTK), Kementerian Sumber Manusia dapat memantau pembayaran gaji kepada mereka. (2) Langkah lain ialah setiap pembantu rumah dilindungi oleh Akta Pampasan Pekerja. (3) Lagi satu ialah kontrak standard akan disediakan oleh JTK untuk ditandatangani oleh majikan dan pembantu rumah mengenai tempoh kontrak dan sebagainya. (4) Indonesia-Malaysia akan mengkaji (MoU) mengenai tenaga kerja yang ditandatangani pada Mei 2006.

### **C. Pembahasan Penelitian**

1. Model pengiriman TKI Indonesia ke Malaysia yang profesional sebagai alternatif mengatasi kemiskinan dan biaya pendidikan di Jawa Tengan
  - a. Model Pengiriman TKI.

Pengiriman dan penempatan TKI ke luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang telah membuat perjanjian tertulis dengan pemerintah RI. Setiap orang dilarang menempatkan calon TKI. Memiliki ijin penempatan. Sedangkan Kegiatan penempatan di bagi menjadi tiga tahapan: Pra penempatan; Masa penempatan; dan Purna penempatan.

Hal ini sesuai dengan pandangan Presiden Jokowi bahwa model pengiriman TKI ke Malaysia menggunakan model satu pintu, dengan cara akan diterapkan dengan cara menyeleksi perusahaan pengarah tenaga kerja yang bonafide di Indonesia sebagai pengirim. Sebaliknya, Malaysia juga akan menyeleksi agen penyalur tenaga kerja. Kesepakatan tersebut dicapai Jumat (06/02), hari kedua kunjungan Presiden Joko Widodo ke Malaysia. "Mungkin ke depan hanya ada 10 agen tapi bonafide," kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNPT2TKI) Nusron Wahid yang mengikuti perundingan bilateral di Kuala Lumpur. "Kita akan segera menyeleksi agen, baik agen di Malaysia maupun agen di Indonesia sehingga kalau ada masalah, ya tidak masuk dalam 10 agen tersebut," Nusron Wahid menjelaskan kepada BBC Indonesia. Format satu pintu akan dirumuskan oleh tim kedua negara sebelum pertemuan tingkat menteri pada akhir bulan ini.

Pengiriman tenaga kerja lewat satu pintu dapat mencegah penyelundupan manusia dan tenaga kerja gelap. Selama ini tenaga kerja Indonesia ke Malaysia diberangkatkan oleh sekitar 515 perusahaan dan banyak pula yang berangkat lewat jalur tidak resmi. Oleh sebab itu, Menurut Nusron Wahid, tidak mengherankan bila terdapat 105.000 tenaga kerja ilegal yang masuk ke Malaysia pada tahun 2014, sedangkan yang resmi hanya 4.000 orang. Rencana pengiriman tenaga kerja Indonesia melalui satu pintu resmi akan membantu mengurangi kekurangan tenaga kerja sektor pekerja domestik di Malaysia. Itulah yang diharapkan oleh Presiden Persatuan Agensi Pembantu Rumah Asing (PAPA) Malaysia, Jeffrey Foo. "Saya sambut baik karena ini adalah satu jalan keluar yang baik setelah kita menghadapi masalah setelah moratorium dilepas, sudah dua atau tiga tahun lalu tapi masih kesulitan mengambil pekerja domestik dari Indonesia yang mencukupi,"

Menurut **Warta Kota, Kualalumpur**; Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Najib Razak menyetujui perjanjian bahwa pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia akan dilakukan melalui satu pintu resmi dalam waktu dekat. Model satu pintu akan

diterapkan dengan cara menyeleksi perusahaan pengerah tenaga kerja yang bonafide di Indonesia sebagai pengirim. Sebaliknya, Malaysia juga akan menyeleksi agen penyalur tenaga kerja Kesepakatan tersebut dicapai Jumat (06/02), hari kedua kunjungan Presiden Joko Widodo ke Malaysia. "Mungkin ke depan hanya ada 10 agen tapi bonafide," kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNPT2TKI) Nusron Wahid yang mengikuti perundingan bilateral di Kuala Lumpur. "Kita akan segera menyeleksi agen, baik agen di Malaysia maupun agen di Indonesia sehingga kalau ada masalah, ya tidak masuk dalam 10 agen tersebut," Nusron Wahid menjelaskan kepada BBC Indonesia. Format satu pintu akan dirumuskan oleh tim kedua negara sebelum pertemuan tingkat menteri pada akhir bulan ini.

b. Strategi TKI mengatasi kemiskinan dan biaya pendidikan.

Strategi TKI mengatasi kemiskinan dan biaya pendidikan dengan menggunakan “pendekatan relegius (berdoa, berbakti kepada orang tua)” dan “manajemen keuangan gemi, setiti, ngati-ati”. Dengan strategi itu Sarmini (mantan TKI sukses), ia lulus sarjana S1 di Universitas Terbuka Malaysia (*Open University of Malaysia*). Keberhasilan Sarmini sebagai TKW yang lulus S1 Jurusan Manajemen di di Universitas Terbuka Malaysia (*Open University of Malaysia*) di publikasikan di internet dengan alamat <http://news.detik.com/berita/1674221/hebat-tkw-sukses-jadi-sarjana-manajemen-di-malaysia> dijelaskan bahwa; "Sarmini pergi ke Jakarta untuk mencari kerja tapi tidak dapat. Karena keinginannya untuk melanjutkan sekolah namun orang saya tidak mampu, makanya saya pergi ke Malaysia untuk mencari modal" kata Sarmini kepada wartawan di Balai Desa Adisana, Senin (4/7/2011).

Tiga tahun lamanya Sarmini bekerja sebagai PRT. Pada 2007 dia meminta pulang dan majikannya pun bertanya untuk apa. Ketika Sarmini mengatakan ingin meneruskan kuliah, sang majikan justru bersimpati dan menawarkan Sarmini kuliah di Malaysia.

"Karena majikan saya tahu kalau keuangan saya tidak memungkinkan, maka dia menawarkan saya kuliah di sana. Dan pada

tahun ke empat, saya kuliah di Open University of Malaysia setelah tiga tahun saya bekerja" jelasnya dengan semangat.

Kini Sarmini yang telah mempunyai gelar Sarjana Management dari Open University of Malaysia, dengan Indeks Prestasi Kumulatif 3,39. Walaupun banyak tawaran bekerja dari kawan-kawannya, namun dia berharap dapat bekerja di mana saja sesuai kemampuan yang dia punya. Saat itu ia mengatakan;"Saya belum tahu akan bekerja dimana, walaupun ada kawan yang menawari saya bekerja sebagai guru, tapi di mana saja saya akan terima" tambahnya.

Selama kuliah, dia mengaku tidak kesulitan membagi waktu untuk bekerja sebagai pembantu. Sarmini hanya kuliah pada hari Minggu, setiap dua minggu sekali. Setiap hari dia bekerja dan baru pada setelah pukul 21.00 dia belajar untuk keperluan kuliahnya dan pagi hari setelah mengantar anak majikan ke sekolah.

"Biasanya saya membagi waktu untuk belajar dan bekerja setelah pukul 21.00. Setelah semua pekerjaan rumah selesai, saya gunakan untuk belajar. Selain itu pada pagi hari setelah anak-anak majikan saya berangkat sekolah saya gunakan juga untuk belajar lagi" kata dia.

Sang majikan sangat mendukung, hingga semua fasilitas yang dibutuhkan dirinya (Sarmini) dipenuhi oleh sang majikan yang merupakan seorang dosen di sebuah kampus swasta di Malaysia."Majikan saya mendukung sekali pendidikan saya, mereka juga memberikan fasilitas, mulai dari komputer, printer, kertas, alat-alat tulis. Yang jelas semua alat-alat yang dibutuhkan untuk belajar" jelasnya.

Selain itu lanjutnya, majikan juga ikut membantu dalam membiayai kuliahnya. Dari seluruh biaya kuliah yang mencapai 1.000 Ringgit Malaysia atau Rp 28 juta, Sang Majikan membantu Sarmini sekitar 50 persen. Kuliah selama empat tahun itu 1.000 ringgit dan jika dikurs rupiah sekitar Rp 28 juta tapi dibantu sama majikan sekitar 50 persen. Sumber <http://news.detik.com/berita/1674221/hebat-tkw-sukses-jadi-sarjana-manajemen-di-malaysia>*Pembantu Jadi Sarjana, Majikan Dapat Penghargaan.*

2. Makna TKI ke Malaysia, Mengapa menjadi TKI di Malaysia, Faktor-faktor Apa Sajakah yang Mendorong Mereka Menjadi TKI di Malaysia?

Selain makna ekonomis, TKI juga memiliki makna merubah nasib, makna relegiusitas, makna pendidikan, fenomena Daryanti yang telah penulis uraikan di atas menunjukkan bahwa menjadi TKW di Malaysia yang dilaitkan dengan agama (Tuhan tidak akan murugah nasib suatu kaum kalau kaum iru tidak merugahnya” menunjukkan bahwa menjadi TKI memiliki makna merubah nasib dan makna relegiusitas.

Selain makna merubah nasib dan makna religius, menjadi TKI memiliki makna pendidikan seperti penjelasan Ibu Nunung (Kasi Penempatan TKI Dinas Tenaga Kerja Transmigradi dan Kependudukan) Provinsi Jawa Tengah, bahwa: Ibu Nunung sering bertanya kepada TKI usia muda, “Mengapa kalian mau manjadi TKI formal, dan akan bekerja di luar negeri? Kebanyakan dari mereka menjawab setelah TKI tersebut pulang dari luar negeri, mereka akan melanjutkan kuliah, *dorongan yang paling dalam mereka rela menjadi TKI karena mereka ingin melanjutkan kuliah.*

Dari informasi Ninung itu dapat disimpulkan bahwa tidak selamanya TKI itu memiliki makna ekonomi, ada makna lain selain makna ekonomi, yaitu makna pendidikan (*educative*). Dikatakan memiliki makna pendidikan karena dorongan yang paling kuat mereka rela menjadi TKI karena ingin melanjutkan kuliah. Selain itu, TKI jугan ingin mencari ilmu, mencari pengalaman, meningkatkan status didesanya, hal itu menunjukkan bahwa fenomena TKI memiliki “makna kesadaran akan ilmu pengetahuan” dan “makna meningkatkan status sosial”

Faktor yang mendorong mereka menjadi TKI di Malaysia, karena faktor kesamaan bahasa, faktor adat istiadat, faktor geografis (Negara Malaysia adalah Negara yang menerima TKI dari Indonesia secara geografis paling dekat dengan Negara Indonesia). Menurut Nunung ada 2 faktor yang paling menonjol calon TKI memilih ke Malaysia yaitu adalah faktor bahasa yang sama, dan faktor adat istiadat yang sama.

Hal tersebut sejalan pendapat Darwin dkk, bahwa: dalam usaha untuk memperoleh peluang kerja di luar negeri atau menjadi TKI dengan berbagai cara. Ada menjadi TKI dengan cara perantara yang tidak resmi yang secara luas dikenal dengan istilah calo. Gaji yang tinggi dan godaan yang menggairkan sering memicu orang untuk mencari cara yang paling mudah supaya dapat pergi ke luar negeri. Akan tetapi, banyak beberapa pencari kerja menggunakan saluran khusus yang disediakan pemerintah, yaitu melalui agen rekrutmen yang secara resmi ditunjuk oleh pemerintah yang disebut dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). PJTKI adalah institusi swasta yang diberi monopoli oleh Pemerintah Indonesia untuk merekrut dan memroses pengiriman tenaga kerja Indonesia ke negara-negara lain, dan menjamin penempatan tenaga kerja (Darwin, dkk., 2005: 254).

### 3. Sistem Pelatihan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang Professional

Calon TKI wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan persyaratan jabatan, calon TKI berhak mendapat pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan, calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan dilarang untuk dipekerjakan, dan pelatihan kerja dilaksanakan di BLKLN milik PPTKIS / cabang di Jawa Tengah dan BLKLN milik Prov. Jawa Tengah.

Pelatihan TKI menggunakan sistem workshop dan pelatihan yang disesuaikan dengan jabatan TKI yang akan ditempuh, pelatihan dilakukan di BLKLN PPTKIS atau BLK cabang dan BLKLN milik pemerintah, materi workshop dan pelatihan disesuaikan dengan pekerjaan TKI di Negara yang ditempati. alokasi waktu workshop dan pelatihan untuk sektor informal sebanyak 200 JPL yang meliputi materi umum meliputi; psikologi, K3, bahasa melayu, dan bahasa Inggris. Sedangkan materi khusus meliputi; Tatagraha, Tataboga, Perawatan lansia, Perawatan bayi, Perawatan anak yang disesuaikan minat mereka (calon TKI). Adapun durasi pelatihan bagi calon TKI jumlah jam pelajarannya tidak sama, hal ini tergantung ke Negara mana yang mereka tuju, sebab di tiap-tiap negara penempatan berbeda-beda, Malaysia 200 jampel, Singapura 400 jampel dan Hong Kong 600 jampel.

Hal ini berarti bahwa sistem pelatihan calon TKI dengan menggunakan dua pendekatan yaitu *general approach* dan *spesifik approach*, dengan sistem setiap calon TKI wajib mengikuti pelatihan dengan durasi pelatihan sesuai Negara tujuan (negara penempatan), Malaysia 200 jampel, Singapura 400 jampel dan Hong Kong 600 jampel.

Hal ini sesuai PP No.31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, Pelatihan kerja atau yang sekarang biasa kita kenal dengan istilah *training* adalah seluruh kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Singkatnya, pelatihan kerja merupakan proses mengajarkan pengetahuan dan pengembangan keterampilan bekerja (*vocational*) serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik sesuai dengan standar.

#### 4. Permasalahan TKI di Malaysia

Semaraknya penempatan TKI ke luar negeri memunculkan banyak permasalahan baik pada tahap pra-penempatan, masa penempatan dan purna penempatan.

##### 1) Permasalahan Pra-Penempatan.

Yang termasuk permasalahan pra-penempatan antara lain; TKI direkrut secara illegal, pemalsuan dokumen, pemalsuan identitas, pungutan liar oleh calo dan dijual ke PPTKIS, pemotongan gaji terlalu besar oleh PPTKIS bekerjasama dengan Agency-nyadiluar negeri, terjebak rentenir/calor CTKI dan lain-lain

##### 2) Permasalahan Masa Penempatan.

Permasalahan masa penempatan antara lain: dijebak menjadi pelacur didaerah transit, diperjual belikan antar Agency diluar negeri, jenis pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kerja(PK), jam kerja melampaui batas tanpa ada uang lembur, tidak memegang dokumen apapun karena (semuadokumen ditahan majikan), larangan berkomunikasi dengan orang lain termasuk dengan keluarga, akomodasi dan makanan dirumah majikan tidak memadai, dilarang menjalankan ibadah, dipaksa memasak dan makan-makanan haram (dagingbabi), gaji dipotong oleh PPTKIS

bekerjasama dengan Agency yang besarnya melampui ketentuan, Gaji tidak dibayar, memperpanjang kontrak kerja tidak ijin dari keluargadan menggunakan kontrak kerja yang lama.

- 3) Permasalahan Purna Penempatan antara lain; tidak terpenuhinya hak-hak asuransi, pemerasaanperlakuan diskriminatif, luka-luka yang diderita TKI tidak mendapatkan perawatan medis, karena tidak ada krisis centre pada pos kedatangan.
- 4) Permasalahan lain yang berkaitan dengan dideportasi permasalahan Trafiking, permasalahan perlakuan kasar oleh majikan seperti kasus Siti Septini, Umdiyah, Sutilah dan kawan kawannya.

Hal ini sejalan dengan pendapat Aziz Syakir (2014) bahwa masalah mendasar TKI di Malaysia adalah; banyak TKI yang tidak memperpanjang kontrak kerja, tapi tetap kerja di Malaysia; banyaknya TKI yang berangkat ke Malaysia secara ilegal dengan paspor kunjung; dan banyaknya TKI yang berangkat tanpa dokumen secara ilegal murni yakni lewat calo /sponsor. Sehubungan dengan 3 hal tersebut menurut Aziz “TKI tidak mendapatkan perlindungan”

Berita penyiksaan TKI di Malaysia oleh majikannya sama sekali tidak menyurutkan niat warga Jawa Tengah untuk menjadi tenaga kerja ke Malaysia. Jumlah pengiriman TKI ke Malaysia tahun 2013 sebanyak 21.619 orang, tahun 2014 sebanyak 17.300 orang, sedangkan tahun 2015 (terhitung sampai bulan Mei 2015) sebanyak 4.996 orang.

5. Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Mengurangi Permasalahan TKI di Malaysia.

Langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah Jawa Tengah untuk mengurangi permasalahan TKI adalah a) memberikan jaminan kepada majikan yang tidak bermasalah menggunakan saja Tenaga Kerja Indonesiab) Membentuk Badan Bersama Penyelesaian Masalah c) Memberi cuti TKI satu hari/minggu d) Jika cuti tidak diberikan, pihak majikan membayar pampasan kepada pembantu rumah tersebut. e) Semua kasus pembantu rumah diselesaikan oleh Kumpulan Kerja Bersama antara Malaysia dan Indonesia f) Mengkaji kembali MoU Ketenagakerjaan.

Pembahasan ini sesuai dengan upaya yang telah ditempuh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Dinas Trans Tenaga Kerja dan Kependudukan Jawa Tengah), dalam wawancara peneliti dengan Azis Syakir (2015) di ruang kerjanya diperoleh keterangan bahwa dalam rangka pelaksanaan program penempatan TKI ke Luar Negeri Pemerintah Propinsi Jawa Tengah melakukan berbagai upaya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap calon TKI/TKI Jateng, antara lain:

- 1) Melalui Surat Gubernur Nomor 560/00946/2003 dimana mewajibkan bagi PPTKIS yang Kantor Pusatnya berada di luar Jawa Tengah apabila akan merekrut Warga Jawa Tengah sebagai TKI wajib membentuk/ memiliki Kantor Cabang PPTKIS di Jawa Tengah terlebih dahulu dan proses dokumen TKI, pemberangkatan dan pemulangan dilakukan di Jawa Tengah.
- 2) Dengan Surat Gubernur Nomor 560.55/18895/2009 tentang pelatihan bagi calon TKI asal Jawa Tengah. (Khususnya calon TKI Informal wajib mengikuti pelatihan dan uji kompetensi).
- 3) Bersama-sama dengan instansi terkait membentuk SATGAS penanganan TKI bermasalah deportasi.
- 4) Melakukan pembenahan kinerja/Revitalisasi BLK/BLKLN milik pemerintah sehingga tercipta tenaga kerja yang memiliki kompetensi.
- 5) Telah dilakukan evaluasi dan pembinaan kinerja Kantor Cabang untuk mengendalikan Kantor Cabang PPTKIS dalam pelaksanaan penempatan.
- 6) Pelaksanaan secara teknis penempatan TKI di daerah dilakukan oleh BP3TKI Jawa Tengah dan sebagian kecil lainnya oleh Dinas Kabupaten/Kota)

## **BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

1. Model pengiriman TKI ke Malaysia menggunakan pendekatan paparan (*exposure approach*) dan pendekatan dari bawah ke atas (*a bottom-up approach*), melalui tiga tahap; yaitu Pra-penempatan, Masa penempatan dan Purna penempatan. Strategi TKI mengatsi kemiskinan

dan biaya pendidikan dengan menggunakan pendekatan religius (berdoa, berbakti kepada orang tua) dan manajemen keuangan gemi setiti ngati-ati”.

2. TKI memiliki banyak makna, selain makna ekonomi TKI juga memiliki makna *educative*, makna *religiusitas*, makna kekrabatan dan makna mengatasi kemiskinan dan beaya pendidikan. Faktor yang mendorong mereka menjadi TKI di Malaysia adalah faktor bahasa dan adat istiadat yang sama.
3. Sistem pelatihan calon TKI dengan menggunakan dua pendekatan yaitu *general approach* dan *spesifik approach*, dengan sistem setiap calon TKI wajib mengikuti pelatihan dengan durasi pelatihan sesuai Negara tujuan (negara penempatan), Malaysia 200 jampel, Singapura 400 jampel dan Hong Kong 600 jampel.
4. Permasalahan utama terjadinya tindak kekerasan oleh majikan terhadap TKI karena; miskomunikasi, rendahnya kompetensi, perbedaan kultur, sikap feodal, lemahnya struktur kelembagaan, dan perbedaan undang-undang
5. Langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah Jawa Tengah untuk mengurangi permasalahan TKI adalah a) memberikan jaminan kepada majikan yang tidak bermasalah menggunakan saja Tenaga Kerja Indonesiab) Membentuk Badan Bersama Penyelasaan Masalah c) Memberi cuti TKI satu hari/minggu d) Jika cuti tidak diberikan, pihak majikan membayar pampasan kepada pembantu rumah tersebut. e) Semua kasus pembantu rumah diselesaikan oleh Kumpulan Kerja Bersama antara Malaysia dan Indonesia f)Mengkaji kembali MoU Ketenagakerjaan

## **B. Saran-Saran**

Disarankan kepada pengambil kebijakan; hendaknya dalam menyusun strategi kebijakan penataan kependudukan, strategi dalam menciptakan kesempatan kerja, dan strategi pengembangan pengiriman tenaga kerja Indonesia secara profesional, antara lain (1) Sistem informasi kesempatan kerja yang menyangkut; jaringan sosial dan jaminan kesehatan dan jaminan keamanan di daerah/negara potensi pengiriman TKI (2) Mendorong menyempurnakan atau memperbaharui MoU, terutama (a) Kenaikan upah Tenaga Kerja Indonesia (b) Paspor tetap dipertahankan

(dibawa) oleh TKW (c) Pemberian hak untuk libur setiap akhir pekan (d) Pembentukan SATGAS bersama untuk penanganan kasus-kasus yang terjadi (3) Membuat Undang-undang Ketenagakerjaan yang disepakati bersama dan aturan pelaksanaannya (4) Aturan Hukum yang tegas bagi kedua belah pihak (5) Hak dan Kewajiban bagi TKW dan pengguna (6) Perlu adanya Persyaratan / Standar Resmi yang digunakan sebagai dasar (7) Perjanjian Kerja yang adil. (8) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan anti Perbudakan, Diskriminasi, Persamaan Jender, dan Anti Perdagangan Manusia.

Kepada Pemda, disarankan agar ada kebijakan untuk memfasilitasi TKI dan keluarganya, misalnya; perbankan (koperasi simpan pinjam), asuransi jaminan sosial, kesehatan dan keamanan TKI dan keluarganya.

Ucapan Terima kasih

Terimakasih peneliti sampaikan kepada: a) Pemerintah c.q Kopertis VI dan Dikti DP2M yang telah memberikan persetujuan dan dana penelitian ini. b) Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah yang telah bersedia menjadi mitra dalam penelitian ini. c) LPPM dan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan rekomendasi dan ijin penelitian.

## **Daftar Pustaka**

- Abu-Loghod and Richard Hay Jr. (eds.), *Strid World Urbanization*, London, Longman.
- Berger, P. and T. Luckmann, 1967, *The Social Construction of Reality*, London, Allen Lane.
- Faisal, S., 2009, *Penelitian Kualitatif: dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang: YA3.
- Firman, T., 2008, *Migrasi Antar Propinsi dan Pengembangan Wilayah di Indonesia*, dalam Prisma No. 7 tahun XXIII Juli, LP3ES.
- Gordon, S., 1991, *The History and Philosophy of Science*, London-New York : Routledge.

- Lee, E. S., 1966, *A Theory of Migration*, Demography 3 (1) 47-57. Alexandria: Population Association of America.
- Lincoln, Y. S., Guba, E.G., 1984, *Naturalistic Inquiry*, California: Sage Publication.
- , 1984, *Teori migrasi*, Seri Terjemahan No. 3, Yogyakarta, Pusat Peneitian Kependudukan, Universitas Gajah Mada.
- , 1992, *Teori Migrasi: Seri Terjemahan di Terjemahkan oleh Hans Daeng, ditinjau Kembali oleh Ida Bagus Mantra*, Yogyakarta, Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gajah Mada.
- Mardiyanto, 2003, *Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 14 Tahun 2002 Tentang REPETADA Prop. Jateng*, Semarang, Pemerintah Daerah Propinsi Jateng.
- Mantra, I. B., 1981, *Population Mobility in West Java*, Ph.d Thesis. Yogyakarta: GajahMada University Press.
- , *Population Movement In West Rice Communities: A Case Study of Two Dukuh In Yogyakarta Special Region*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- , dan Sumantri, 1988, *Migrasi Penduduk Aceh Berdasarkan Data Supas 1985*, Jakarta, Kerjasama LDFE Universitas Syah Kuala dan Kantor Menteri Negara KLH.
- Miles, B. M., Michael, H., 1984, *Qualitative Data Analisis*, dalam H.B. Sutopo, *Taman Budaya Surakarta dan Aktivitas Seni di Surakarta*, Laporan Penelitian, FISIPOL UNS.
- Mulyantoro, A., 1991, *Migran Asal Lamongan dan Keadaan Sosial Ekonominya*, Kupang: Penelitian FKIP, Undana.
- Santoso, T., 2002, *Kekerasan Politik-Agama: Suatu Studi Konstruksi Sosial tentang Perusakan Gereja di Situbondo, 1996*, Ringkasan Disertasi, Surabaya, Pascasarjana UNAIR.
- Simanjuntak, P.J., 2003, *Undang-Undang Yang Baru Tentang Ketenagakerjaan*, Jakarta, ILO/USA Declaration Project Indonesia.
- Subadi, T 2010, *Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia (Studi Kasus TKI Asal Jawa Tengah dengan Pendekatan Fenomenologi*. Jurnalterakreditasi.

Forum Geografi. Vol. 24 No. 2 Desember 2010. ISSN: 0852-2682, 18 halaman. Penerbit: FKIP- UMS

Subadi, T., Ismail, R., 2013, *Indonesian Female Migrants And Employers' Mistreatment In Malaysia: A Case Of Domestic Servants From Central Java* Jurnal Internasional (Research Humanities and social science Internasional, ISSN : 222-1719 (paper) 2222-2863 (online) ,Vol.3.No.6, Mei 2013),

Subadi, T., Sutarni, Rita, 2013, *A Lesson Study as a Development Model of Professional Teachers*, **Jurnal Internasional** (International Journal of Educationl, ISSN: 1948-5476, vol.5. No.2, Juni.2013). <http://www.macrothink.org/journal/index.php/ije/article/view/3831/3148>

Subadi, T., 2009, *Pengembangan Model Untuk Meningkatkan Kualitas Guru Melalui Lesson Study di Sekolah Dasar Kodya Surakarta*. **Jurnal terakreditasi**; Sekolah Dasar Kajian Teori dan Praktik Pendidikan, terakreditasi, Tahun 18 No. 2 Edisi November 2009. ISSN: 0854-8285, 7 halaman. Penerbit: PGSD Universitas Malang. (<http://jurnal.fip.um.ac.id/sekolahdasar/pengembangan-model-untuk-m...>)

Susanto, H., *Orang Miskin di Jawa Tengah Mencapai 4.773 Juta Jiwa*, <http://daerah.sindonews.com/read/2013/10/30/22/800181/orang-miskin-di-jawa-tengah-capai-4-733-juta-jiwa>

Sutomo, H., 1993, *Hubungan Antara Mobilitas Horizontal dan Mobilitas Vertikal Migran Sirkuler Sektor Informal di Kota Wonosobo dan Cilacap*, Yogyakarta, Disertasi, UGM.

Todaro, Michael, P., 1992, *Kajian Ekonomi Migrasi Internal di Negara Berkembang : Telaah Atas Beberapa Model*, Seri Terjemahan No. 25, Pusat Penelitian Kependudukan, Yogyakarta, UGM.

-----, 1976, *Internal Migration in Developing Countries A Review of Theory, Evidence, Methodology, and Research Priorities*, Geneva International Labour office.

-----, 1979, *Economic For A Developing World an Introduction to A Principle, Problems and Policies for Development*, Longman, London.

## GLOSARIUM

- Education* = *Education is the process of facilitating learning, or the acquisition of knowledge, skills, values, beliefs, and habits.*
- Ilmu = Ilmu atau sains, atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia
- Ilmu social = Ilmu sosial (bahasa Inggris: social science) atau ilmu pengetahuan sosial (Inggris: social studies) adalah sekelompok disiplin akademis yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya.
- Ilmu ekonomi = Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran.
- Budaya = Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi, dan akal manusia.
- Fenomenologi = Fenomenologi adalah sebuah studi dalam bidang filsafat yang mempelajari manusia sebagai sebuah fenomena.
- TKI = Tenaga Kerja Indonesia (disingkat TKI) adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang lowlife dan unskill yang bekerja di luar

negeri (seperti Malaysia, Timur Tengah, Taiwan, uganda dan somalia) dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Namun, istilah TKI seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar karena TKI sejatinya memang adalah kumpulan tenaga kerja unskill yang merupakan program pemerintah untuk menekan angka pengangguran. TKI perempuan seringkali disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Kemiskinan

= Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dll.

*Homeschooling*

= *Homeschooling or homeschool (also called home education or home based learning) is the education of children at home, typically by parents or by tutors, rather than in other formal settings of public or private school.*

Fundamental

= Fundamental dapat merujuk pada Prinsip adalah sebuah pernyataan fundamental atau kebenaran umum atau dasar realitas

- intelligence quotient = Kecerdasan intelektual (bahasa Inggris: *intelligence quotient*, disingkat *IQ*) adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan, seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa, dan belajar. Kecerdasan erat kaitannya dengan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh individu. Kecerdasan dapat diukur dengan menggunakan alat psikometri yang biasa disebut sebagai tes IQ. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa IQ merupakan usia mental yang dimiliki manusia berdasarkan perbandingan usia kronologis.
- Tarbiyah* = *Tarbiyah* berasal dari bahasa Arab yang berarti pendidikan, sedangkan orang yang mendidik dinamakan Murobi.
- Fir'aun = Fir'aun adalah gelar yang dalam diskusi dunia modern digunakan untuk seluruh penguasa Mesir kuno dari semua periode. Dahulu, gelar ini mulai digunakan untuk penguasa yang merupakan pemimpin keagamaan dan politik kesatuan Mesir kuno, hanya selama Kerajaan Baru, secara spesifik, selama pertengahan dinasti kedelapanbelas. Untuk penyederhanaan, terdapat kesepakatan umum di antara penulis modern untuk menggunakan istilah ini untuk merujuk penguasa Mesir semua periode. Firaun juga mengaku sebagai Tuhan.
- Humanisme = Humanisme adalah istilah umum untuk berbagai jalan pikiran yang berbeda yang

memfokuskan dirinya ke jalan keluar umum dalam masalah-masalah atau isu-isu yang berhubungan dengan manusia. Humanisme telah menjadi sejenis doktrin beretika yang cakupannya diperluas hingga mencapai seluruh etnisitas manusia, berlawanan dengan sistem-sistem beretika tradisional yang hanya berlaku bagi kelompok-kelompok etnis tertentu.

Everett Lee = Penemu teori migrasi (*A Theory of Migration*)

*Push-pull theory* = teori dorong-tarik (teori Lee)

Mobilitas penduduk = *Mobilitas penduduk* atau *gerakan penduduk* ialah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Jenis-jenis Mobilitas Penduduk ada dua macam mobilitas penduduk, 1) *Migrasi*, yaitu mobilitas penduduk yang bertujuan untuk menetap di daerah baru. 2) *Mobilitas sirkuler (mobilitas sementara)*, yaitu mobilitas penduduk untuk sementara waktu, tidak untuk menetap. Contohnya, setelah panen dan tidak ada kegiatan, para petani pergi ke kota untuk mencari nafkah (migrasi musiman); atau para pekerja yang pada waktu pagi pergi ke kota, sorenya kembali ke tempat tinggalnya di pinggiran kota.

Nilai = Nilai adalah alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa "cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seorang

individu mengenai hal-hal yang benar, baik, atau diinginkan.

#### Norma social

- = Norma sosial adalah kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat dan batasan wilayah tertentu. Norma akan berkembang seiring dengan kesepakatan-kesepakatan sosial masyarakatnya, sering juga disebut dengan *peraturan sosial*. Norma menyangkut perilaku-perilaku yang pantas dilakukan dalam menjalani interaksi sosialnya. Keberadaan norma dalam masyarakat bersifat memaksa individu atau suatu kelompok agar bertindak sesuai dengan aturan sosial yang telah terbentuk. Pada dasarnya, norma disusun agar hubungan di antara manusia dalam masyarakat dapat berlangsung tertib sebagaimana yang diharapkan.

## INDEKS

- active learning*  
akhlak mulia  
*because motive* (motif karena)  
bentuk pemisahan  
berdimensi ke-Tuhan-an  
*Buddhayah*  
citra sosial (*social image*)  
*classroom management*  
*culture*  
ekonomi fundamental  
Ekonomi makro  
Ekonomi Mikro  
Eksistensialis  
*e-learning*  
Esensialis  
*evaluator*  
Fakta sosial (*social fact*)  
faktor penghalang (*intervening obstacles*)  
fasilitator,  
Filsafat Pendidikan Eksistensialis  
Filsafat Progresivisme  
Fungsi sosial (*social function*)  
gaya hidup (*social lifestyle*)  
*historical structuralist perspective*  
*home-schooling*  
human capital  
ilmiah  
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).  
ilmu sosial  
Ilmu Sosial (*Social Sciences*)  
imajinasi  
*in order to motive* (motif supaya)  
instruktur,  
integrasi sosial  
Intelektual  
intelligence quotient  
interaksi simbolik (*symbolic interaction*)  
Interaksi Sosial  
*Inter-disciplinary Approach*  
interpretivisme  
jasmaniah  
kecerdasan  
*kepatuhan kolektif*  
kepribadian  
keterampilan kognitif  
khazanah  
komitmen  
konselor  
konspirasi simbolik (*symbolic conspiracy*).  
Kontravensi  
*Kontravensi intensif*  
*Kontravensi rahasia*  
*Kontravensi sederhana*  
*Kontravensi taktis*  
*Kontravensi umum*  
Kovenan Internasional  
landasan ekonomi  
landasan filsafat  
landasan hukum  
landasan psikologi  
landasan sejarah  
landasan sosial budaya  
level meso dan mikro  
lingkungan sosio-psikologis  
linguistic  
lintas-disiplin  
*manajer pembelajaran*  
Mark Twain  
masyarakat agrikultural tradisional.  
migrasi balik (*return migration*)  
*neo-classical economics equilibrium perspective*  
nilai kefaedahan (*place utility*)  
*organizer*  
pamong belajar  
Paradigma Metafisik  
Paradigma Sosiologi  
Paradigma Konstrak  
partisipasi demokratis  
pendekatan interdisiplin  
Pendidikan Ilmu Sosekbud  
Pendidikan Islam

pengendalian diri	sosio-budaya
Pengendalian institusional	Spiritual
Perenialis	struktur sosial ( <i>social structure</i> )
perspektif fenomenologi	<i>strukturasi</i>
<i>Pertentangan antar kelas sosial</i>	<i>student-centered</i>
<i>Pertentangan politik</i>	Studi Sosial ( <i>Social Studies</i> )
<i>Pertentangan pribadi</i>	<i>ta'dib</i>
<i>Pertentangan rasial</i>	<i>ta'lim</i>
pertukaran simbolik ( <i>symbolic exchange</i> )	<i>tarbiyah</i>
<i>planner</i>	tataran nasional (makroskopik)
positivisme	Teori Anomi.
posmodern	Teori dorong-tarik ( <i>push-pull theory</i> )
pranata sosial ( <i>social institution</i> )	Teori Konflik
profitabilitas	Teori Kontrol
Progresivis	Teori Labeling
Proses asosiatif.	Teori Sosiologi.
proses disosiatif	Tindakan koersif.
<i>Psikologi perkembangan</i>	<i>transfer of knowledge</i>
Rekonstruksionis	<i>transfer of value</i>
<i>social</i>	tutor,
<i>social science</i>	<i>Wage effects</i>
<i>social structure</i>	widyaiswara

## BIODATA PENULIS

E-mail: [tjipto.subadi@ums.ac.id](mailto:tjipto.subadi@ums.ac.id).

Penulis, Dr. Tjipto Subadi, M.Si., Lahir di Sukoharjo 7 Juni 1953. Menikah 1 Januari 1979. Istri; Hj. Siti Badiriyah. Tjipto Subadi adalah dosen Pendidikan Geografi dan dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selain itu mengajar juga pada prodi PGSD, Pendidikan Matematika FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis adalah Alumni MI Muhammadiyah Gatak Kelasaman tahun 1966, SMP YAPI Tegalgondo dan menempuh Ujian Persamaan PGAP Negeri Klaten tahun 1971, PGAA Negeri Surakarta tahun 1972, Sarjana Pendidikan FKIP-UNS tahun 1979, S2 Sosiologi Pendidikan UMM tahun 1996. Gelar Doktor Pendidikan Ilmu Sosial UNAIR Surabaya tahun 2004.

Mengajar S1 Mata Kuliah: Pendidikan IPS, Pendidikan Ilmu SOSEKBUD, Pengantar Sosiologi, Pendidikan Kewarganegaraan, Studi Kemuhammadiyah, Studi Islam III, Psikologi Umum, Layanan Bimbingan Belajar, dan Inovasi Pendidikan, Pengembangan Profesi Keguruan dan PTK (Penelitian Tindakan Kelas).

Mengajar S2 Mata Kuliah: Sosiologi Pendidikan, Metodologi Penelitian Kualitatif dan, Paradigma Ilmu Sosial Pendidikan.

Buku-buku yang telah terbit, antara lain: 1) Micro Teaching (Penerbit FKIP-UMS, 1983); 2) Metodologi Pengajaran (Penerbit FKIP-UMS, 1984); 3) Alat Peraga Pendidikan (Penerbit FKIP-UMS, 1985); 4) Pengantar Teknologi Pendidikan (Penerbit FKIP-UMS, 1988); 5) IPS Paket A Setara SD (Penerbit Widya Duta, 2006); 6) Psikologi Umum (Penerbit Zie Informatika, 2007); 7) Sosiologi (Badan Penerbit FKIP-UMS, 2008); 8) Sosiologi dan Sosiologi Pendidikan (Penerbit Fairuz Media Duta Pertama Ilmu, Tahun 2009. ISBN. 978-979-19459-5-0); 9) Pendidikan Kewarganegaraan (Penerbit BP-FKIP UMS Tahun 2010. ISBN. 978-602-8649-68-1); 10) *Lasson Study* Berbasis PTK/Penelitian Tindakan Kelas (Badan Penerbit FKIP-UMS, Tahun 2010); 11) Sosiologi: Bahan Ajar PLPG Pendalaman Materi (Tahun 2011; 12) Penerbit Badan Penerbit FKIP-UMS. ISBN: 978-602-8649-07-0); 13) Metode Penelitian Kualitatif. (Tahun 2011. Penerbit MUP. ISBN 978-979-636-128-1); 14) PTK Berbasis Lesson Study. (Penerbit MUP Tahun 2011. ISBN 978-979-636-127-4); 15) Inovasi Pendidikan (Penerbit MUP. Tahun 2012. ISBN 978-979-636-126-7); 16) Lesson Study sebagai Inovasi Pendidikan (Penerbit Kafilah Publishing Tahun 2013. ISBN 978-602-7522-17-6); 17) Landasan Pendidikan (Penerbit Gaca

Media Tahun 2013. ISBN 978-602-8545-37-2); 18) Landasan Pendidikan (Edisi Revisi) Penerbit Gava Media Tahun 2014. ISBN 978-602-7869-68-4).

Publikasi Artikel di Mass Media Tahun 2008, dengan judul; Kalkulasi Resiko Serangan Israel ke Iran (Solo Pos 21/7/2008). Isra' Mi'raj dan Pemberantasan Korupsi (Republika 25/7/ 2008). Kasus Supriyadi dan Misteri Sejarah (Joglo Semar 21/8/2008). Menyelamatkan Senjata Nuklir Pakistan (Joglo Semar 26/8/2008). Koalisi Permanen Golkar - PDIP (Joglo Semar 29/8/2008). Pisowanan Agung Jilid II (Joglo Semar 19/9/2008). Sikap Politik Sultan HB X (Suara Merdeka 7/10/2008). Malaysia Setelah Badawi (Suara Merdeka 15/10/2008). Terorisme Pasca Eksekusi Amrozi CS (Suara Merdeka 11/11/2008). Menelisik Misteri Pembunuhan Munir (Suara Merdeka 3/12/2008). Mega Hidayat dan Rakornas PDIP Solo (Joglo Semar 2/1/2008).

Publikasi Artikel di Mass Media Tahun 2009, dengan judul; Perang Besar di Timur Tengah (Pikiran Rakyat 5/1/2009). Tiga Target Baru Israel (Suara Merdeka 12/1/2009). Prospek Suara Partai Islam (Suara Merdeka. 27/3/2009). Masa Depan Malaysia (Suara Merdeka 13/4/2009). Gunung Api sebagai Pasak Bumi (Suara Merdeka 8/6/2009). Menakar Kesiapan BRT di Kota Atlas (Joglo Semar. 13/5/2009). Isra' Mi'raj & Perjalanan ke Luar Angkasa (Solo Pos 17/7/2009). Mendidik Anak Terorisme (Suara Merdeka 30/7/2009). Mengkritisi UU Jaminan Produk Halal (Wawasan 5/8/2009). Prospek Penanganan Terorisme (Suara Merdeka 15/8/2010). Pat Gulipat di Bank Century (Suara Merdeka. 3/9/2009). Di Balik Politik Nuklir Iran (Suara Merdeka 9/10/2009). Namru-2 (dua) Siap Bangkit Kembali (Suara Merdeka 24/10/2009). Mesteri Kasus Kriminalisasi KPK (Wawasan 16/11/2009). Islam Membatasi Poligami (Joglo Semar 17/9/2009). Berspekulasikah Amerika Serikat di Afganistan (Suara Merdeka 7/12/2009).

Publikasi Artikel di Mass Media Tahun 2010, dengan judul; Wasiat Gusdur dan Rekonsiliasi (Suara Merdeka 5/1/2010). Apabila Listrik Diprivatisasi (Joglo Semar 29/1/2010). Nikah Siri dan Poligami (Joglo Semar 20/2/2010). Susno dan Reformasi Penegak Hukum (Suara Karya 8/4/2010). Hukum Mati bagi Koruptor (Suara Karya 22/4/2010). Policy Obama Terhadap Dunia Islam (Pelita 27/4/2010). Masa Depan Afganistan (Pelita 3/5/2010). Mengakhiri Terorisme (Suara Merdeka 17/5/2010). Teroris dan Negara Islam (Wawasan 24/5/2010). Peluang Jadi Putra Mahkota SBY (Suara Merdeka 2/6/2010). Naik Motorpun Bisa Mahal (Suara Merdeka 12/6/2010). Tarikan Di Muhammadiyah (Suara Merdeka 2/7/2010). Mencari Figur Pemimpin Muhammadiyah (Suara Karya. 2/7/2010). Penyimpangan ESQ (Pelita. 12/8/2010).

Publikasi Artikel di Media Masa Thun 2011: Menafsirkan Utuh Bangsa Pemaaf (Suara Merdeka 15 Juni 2011). Pasca terbunuhnya Osama (Joglo Semar9 Juni 2011). Swastanisasi Haji, Mungkinkah (Pelita, 29 Juli 2011). Renegosiasi Kontrak Karya PT

Freeport Indonesia (Pelita, 9 Agustus 2011). Hikmah Tumbangnya Kekuasaan Khadafi (Pelita, 26 Oktober 2011). Arab Saudi Pasca Raja Abdullah (Pelita, 2 November 2011). Risiko Berat Menyerang Iran (Pelita, 15 November 2011). Pangkalan Militer Darwin dan Politik Hegemoni AS (Republika, 2 Desember 2011). Demokratisasi Afganistan (Pelita, 12 Desember 2011). Masa Depan Korea Utara (Pelita, 28 Desember 2011),

Publikasi Artikel di Media Masa Tahun 2012, dengan judul; Bulan Sabit Syiah di TimurTengah (Pelita, 9 Januari 2012). NKRI Harga Mati (Pelita, 18 Januari 2012). Miras dan Narkoba Musuh Abadi Bangsa Indonesia (Pelita, 30 Januari 2012). Bukan Bangsa Pemabuk (Suara Merdeka 30 Januari 2012). Timur Tengah Diambang Perang (Pelita, 1 Februari 2012). Maulud Nabi dan SemangatPemberantasanKorupsi (Pelita, 4 Februari 2012). Prospek Hubungan Indonesia Iran (Pelita, 11 Februari 2012). Hubungan Harmonis Buruh dan Pengusaha (Pelita, 25 Februari 2012). Problematika Penyelenggaraan Ibadah Haji (Pelita, 29 Februari 2012). Harga BBM Tidak Perlu Dinaikkan (Pelita, 8 Maret 2012). Risiko Berat Menaikkan Harga BBM (Pelita, 14 Maret 2012). Solusi Anak Diluar Nikah (Pelita, 21 Maret 2012). BLSM Menyuaup Rakyat ? (Pelita, 3 April 2012). Peluang untuk Jokowi (Suara Merdeka 17 April 2012). Bencana Alam dengan Maksiyat (Pelita, 14 April 2012). Perjudian Politik bagi Jokowi (Suara Merdeka 7 Mei 2012). Sulitnya MemberantasTeroris (Pelita, 16 Mei 2012). Biaya Haji Makin Mahal (Pelita, 26 Mei 2012). Politik Dinasti SBY (Pelita, 31 Mei 2012). SP3 Sismimbakum, Yusril dan SBY (Pelita, 13 Juni 2012). Galaksi dan Kemahakuasaan (Suara Merdeka 16 Juni 2012). Zina, Film Porno dan Kondomisasi Remaja (Pelita 2 Juli 2012). Bulan Ramadhan dan PemberantasanTerorisme (Pelita, 14 Juli 2012). Monopoli Penerbangan Penyebab Tingginya BPIH (Pelita, 23 Juli 2012). Mengatasi Kemacetan DKI Jakarta (Pelita, 1 Agustus 2012). Zakat Memberantas Kemiskinan (Pelita, 11 Agustus 2012). Mahzab Syiah dan Politik Kenegaraan (Pelita, 3 September 2012). Sulitnya Mempersatukan Sunni Syiah (Pelita, 19 September 2012). Tugas Berat Mengadang di Jakarta (Suara Merdeka 24 September 2012). Realisasi Janji Pemerintahan Jokowi (Pelita, 22 Oktober 2012). Masa Depan Partai Islam (Pelita, 7 November 2012). Langkah Cepat Golkar ( Suara Merdeka 22 Nov 2012). Mencegah Penyebaran Virus HIV/AIDS (Pelita, 29 November 2012). Terjadinya Kiamat Menurut Islam (Pelita, 7 Desember 2012). Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba (Pelita, 17 Desember 2012). MenungguTerbitnya UU Halal (Pelita, 28 Desember 2012).

Publikasi Artikel di Media Masa Tahun 2013, dengan judul; Kontroversi Film Hanung Bramantyo (Pelita, 11 Januari 2013). Mencegah Kembalinya Bakso Daging Babi (Pelita, 22 Januari 2013). Solusi Masalah Kashmir (Pelita, 20 Februari 2013). Antara Teroris dan Separatis (Pelita, 14 Maret 2013). Mengapa Barisan Nasional Menang (Pelita, 8 Mei 2013). Isra Miraj Perjalanan Luar Biasa Dahsyat (Pelita, 4 Juni

2013). Mempersoalkan Kehalalan Stunning Sapi (Pelita, 17 Juli 2013). Masa Depan Mesir (Pelita, 23 Juli 2013). Habib Rizieq versus SBY (Pelita, 29 Juli 2013). Pak Harto dan UU Peradilan Agama (Pelita, 21 Agustus 2013). Tarmizi Taher dan Jamaah Haji 1998 (Pelita, 28 Agustus 2013). Jatuhnya Nilai Rupiah dan Dampaknya Bagi Kemenag (Pelita, 4/9/2013). Kitab Suci Al Quran dan Gunung Api (Pelita, 20 November 2013).

Publikasi Artikel di Media Masa Tahun 2014, dengan judul; Maulid Nabi dan Pemberantasan Korupsi (Pelita, 6 Januari 2014). Partai Islam Menghadapi Pemilu 2014 (Pelita, 19 Februari 2014). Rebutan Jokowi (Pelita, 19 Maret 2014). Amplop Wartawan Termasuk Suap ? (Pelita, 15 April 2014). Obama dan Suksesi di Saudi (Suara Merdeka 29 April 2014). Strategi Mengalahkan Jokowi (Pelita, 6 Mei 2014). Presiden Baru dan Subsidi BBM (Pelita, 21 Juli 2014). Presiden Jokowi, Koperasi dan UKM (Pelita, 21 Oktober 2014). Stop Komersialisasi Air (Suara Merdeka 4 Nov 2014). Islam dan Kepemimpinan Nasional (Pelita, 12 November 2014).

Publikasi Artikel di Media Masa Tahun 2015, dengan judul; Suriyah dan Perang dunia ke III (Suara Merdeka, 18 November 2015). IS dan Teori Konspirasi (Suara Merdeka, 30 Desember 2015)

Menulis artikel pada jurnal ilmiah, dengan judul; 1) Pendidikan dalam Perspektif Perubahan Sosial (Varidika, ISSN:0852-0976); 2) Manajemen Pendidikan Dasar sebagai Determinan Mutu Pendidikan di Indonesia (Varidika, ISSN: 0853-2974); 3) Boro: Mobilitas Penduduk Suatu Pendekatan Kualitatif Fenomenologis (Akademika, ISSN: 0216-8219); 4) Kepuasan Siswa Ditinjau dari Unjuk Kerja Guru Fasilitas Pembelajaran dan Keselamatan Kerja Siswa di SMK Negeri 1 Ngawen Gunungkidul.(Pengelolaan Pendidikan ISSN 2085-126X); 5) Peningkatan Kualitas Micro Teaching dan PPL Melalui Lesson Study bagi Calon Guru Matematika FKIP-UMS (Pengelolaan Pendidikan ISSN -126XI); 6) Pengembangan Model Peningkatan Kualitas Guru Melalui Pelatihan Lesson Study bagi Guru SD Surakarta 2009 (Sekolah Dasar, PGSD UM Malang Terakreditasi, Tahun 18. Nomor 2, November 2009). 7) Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Ke Malaysia: Studi Kasus TKW Asal Jawa Tengah dengan Pendekatan Fenomenologi (Forum Geografi-UMS. Terakreditasi. ISSN: 0852-2682); 8) PARTISIPASI KELUARGA PRA-SEJAHTERA DALAM PEMBANGUNAN DESA: Suatu Kajian Pedagogis Fenomenologis Pemberdayaan Masyarakat Desa Ngabeyan, Kartasura (Jurnal Activita Tidak Terakreditasi LPPM-UNS ISSN 2087-9091); 9) Implementasi Pembelajaran IPS Berbasis Kur 13 Melalui Lesson Study di Sekolah Muhammadiyah Kartasura, pada jurnal : Warta LPPM UMS (Jurnal Nasional tidak terakreditasi). Vol. 18, No.1, Maret 2015; 10) Model Pelatihan Guru IPS, IPA Tematik terpadu Kur 13 di

Sekolah Dasar muhammadiyah Kaertasura. Pada jurnal Warta LPPM UMS (Jurnal Nasional tidak terakreditasi). Vol. 19, No.1, Maret, 2016.

Menulis artikel dipublikasikan pada Jurnal Internasional, dengan judul; 1) A Lesson Study as a Development Model of Professional Teachers (Macrothink Institute International Journal of Education. ISSN 1948-5476.. Vol 5. No. 2, tahun 2013); 2). Indonesian Female Migrants and Employers' Mistreatment in Malaysia: a Case of Domestic Servants from Central Java (Research on Humanities and Social Sciences ISSN 2222-1719 (Paper) ISSN 2222-2863 (Online). Vol.3, No.6, 2013.

Melakukan Penelitian Hibah Kompetitif, dengan judul: 1) Peningkatan Kualitas Micro Teaching dan PPL (Program Pengalaman Lapangan) Melalui Lesson Study bagi Calon Guru Matematika pada Program Studi Pendidikan Matematika FKIP-UMS 2007 (Dikti, PHK Matematika); 2) Pengembangan Model Peningkatan Kualitas Guru Melalui Pelatihan Lesson Study bagi Guru SD Surakarta 2009 Tahun I (DP2M Dikti); 3) Peningkatan Kualitas Pembelajaran Mata Kuliah Psikologi Umum dengan Model Lesson Study pada Program Studi PGSD FKIP-UMS 2009 (Dikti, PHK PGSD); 4) Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia (Studi Kasus TKW Asal Jawa Tengah dengan Pendekatan Fenomenologi Tahun 2009) Penelitian untuk Publikasi Internasional Batch II DP2M Dikti); 5) Pengembangan Model Peningkatan Kualitas Guru Melalui Pelatihan Lesson Study bagi Guru SD Surakarta 2010 Tahun II (Hibah DP2M Dikti); 6) Pengembangan Model Peningkatan Kualitas Guru Melalui Pelatihan *Lesson Study* Bagi Guru SD Se-Eks Karesidenan Surakarta 2011 Tahun ke 3 (Hibah DP2M Dikti); 7) MODEL PEMBINAAN PENDIDIK PROFESIONAL (Suatu Penelitian dengan Pendekatan *Lesson Study* pada Guru-Guru Sekolah Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo) 2012 Tahun ke 1 (Hibah PUPT DP2M Dikti); 8) MODEL PEMBINAAN PENDIDIK PROFESIONAL Suatu Penelitian dengan Pendekatan *Lesson Study* pada Guru-Guru Sekolah Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo 2013 Tahun ke 2. (Hibah PUPT DP2M Dikti); 9) MODEL PEMBINAAN PENDIDIK PROFESIONAL Suatu Penelitian dengan Pendekatan *Lesson Study* pada Guru-Guru Sekolah Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo 2014 Tahun ke 3(Hibah PUPT DP2M Dikti); 10) PENGIRIMAN TKI KEMALAYSIA STRATEGI MENGATASI KEMISKINAN DAN BIAYA PENDIDIKAN (Studi Kasus TKI Asal Jawa Tengah dengan Pendekatan Fenomenologi) 2015 Tahun 1 (Hibah Stranas DP2M Dikti); Sudah disetujui pada tahun 2016 Penelitian dengan judul; PENGIRIMAN TKI KEMALAYSIA STRATEGI MENGATASI KEMISKINAN DAN BIAYA PENDIDIKAN (Studi Kasus TKI Asal Jawa Tengah dengan Pendekatan Fenomenologi) 2016 Tahun ke 2 (Hibah Stranas DP2M Dikti).